



**PENENTUAN PUSAT PERTUMBUHAN PADA SATUAN
WILAYAH PENGEMBANGAN (SWP) KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh

**Danu Hadi Basito
NIM 130810101205**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**PENENTUAN PUSAT PERTUMBUHAN PADA SATUAN
WILAYAH PENGEMBANGAN (SWP) KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**Danu Hadi Basito
NIM 130810101205**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Indah Ariyani dan Ayahanda Sasmiyono tercinta yang senantiasa memberikan dorongan, doa, dan semangat dalam menempuh perjalanan meraih kesuksesan;
2. Kakak saya Sevira Agista yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang;
3. Guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang tak ternilai;
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka
mengubah keadaan diri mereka sendiri.

(terjemahan Surat *Ar-Rad* ayat 11)

Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya dan
sesungguhnya usahanya itu kelak akan di perlihatkan (kepadanya) kemudian akan
diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.

(terjemahan Surat *An-Najm* ayat 39-41)

Perjalanan ribuan mil dimulai dengan langkah pertama.

(Lao Tzu)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Danu Hadi Basito

NIM : 130810101205

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Penentuan Pusat Pertumbuhan pada Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Kediri Provinsi Jawa Timur” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 Juni 2017

Yang menyatakan

Danu Hadi Basito
NIM 130810101205

SKRIPSI

**PENENTUAN PUSAT PERTUMBUHAN PADA SATUAN
WILAYAH PENGEMBANGAN (SWP) KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

Oleh

Danu Hadi Basito
NIM 130810101205

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Riniati, MP

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penentuan Pusat Pertumbuhan Pada Satuan Wilayah
Pengembangan (SWP) Kediri Provinsi Jawa Timur
Nama Mahasiswa : Danu Hadi Basito
NIM : 130810101205
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Regional
Tanggal Persetujuan : 2 Juni 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Riniati, MP
NIP. 19600430 198603 2 001

Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes
NIP. 19641108 198902 2 001

Mengatahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes
NIP. 19641108 198902 2 001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**PENENTUAN PUSAT PERTUMBUHAN PADA SATUAN
WILAYAH PENGEMBANGAN (SWP) KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Danu Hadi Basito
NIM : 130810101205
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Telah dipertahankan didepan penitia penguji pada tanggal :

16 Juni 2016

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Rafael Purtomo Somaji, M.Si. (.....)
NIP. 19581024 198803 1 001
2. Sekretaris : Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si. (.....)
NIP. 19600412 198702 1 001
3. Anggota : Dr. Siswoyo Hari Santosa, SE, M.Si. (.....)
NIP. 19680715 199303 1 001

Foto

4 x 6

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan

Dr. Muhammad Miqdad SE, MM, Ak, CA
NIP. 19710727 199512 1 001

*Penentuan Pusat Pertumbuhan pada Satuan Wilayah Pengembangan (SWP)
Kediri Provinsi Jawa Timur*

Danu Hadi Basito

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk : (1) mengidentifikasi sektor ekonomi yang berpotensi sebagai sektor basis sebagai penentu wilayah pusat pertumbuhan Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur; (2) mengidentifikasi sektor ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif di Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur; (3) mengklasifikasikan wilayah pada masing-masing Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur ; (4) mengidentifikasi wilayah berdasarkan ketersediaan fasilitas pelayanan di Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur; dan (5) mengidentifikasi wilayah yang memiliki potensi kekuatan interaksi antar wilayah sebagai lokasi pusat pengembangan di Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur. Jenis penelitian yang digunakan yakni bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik masing-masing wilayah dan instansi terkait. Alat analisis yang digunakan adalah analisis *location quotient*, analisis *shift share*, analisis tipologi klassen, analisis skalogram, dan analisis model gravitasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kota Kediri muncul sebagai pusat pertumbuhan pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur dengan keunggulan wilayah dari dua segi yakni segi kemampuan basis wilayah (*Location Quotient*) dan segi pendapatan perkapita yang tinggi (Tipologi Klassen) dengan daerah *hinterland* antara lain Kab. Nganjuk, Kab. Trenggalek, serta Kab. Kediri dan Kab. Tulungagung.

Kata Kunci : Pusat Pertumbuhan Satuan Wilayah Pengembangan Kediri, Skalogram, Location Quotient, Shift Share, Gravitasi, Tipologi Klassen.

*Determination The Growth Poles Of Region Development Unit (RDU) Kediri East
Jawa Province*

Danu Hadi Basito

*Department of Economics and Development Study, the Faculty of Economics and
Business, Jember University*

ABSTRACT

Research conducted aims to: 1) to identify the potential economic sectors as the base sector as a determinant of the central region of growth in the Region Development Unit (RDU) Kediri East Java; 2) to identify economic sectors that have a competitive advantage in the Region Development Unit (RDU) Kediri East Java; (3) to classify the region in each Regency / City in the Region Development Unit (RDU) Kediri East Java; (4) to identify region based on the availability of service facilities in Region Development Unit (RDU) Kediri East Java; and (5) to identify region with potential interaction strength among regions as the central development areas in Region Development Unit Kediri East Java'. An analysis method that used a method of quantitative descriptive analysis by using secondary data obtained from the Statistic Indonesia and other institutions needed. The analysis is use location quotient analysis, shift share analysis, typologi klassen analysis, scalogram analysis, dan gravitation model analysi. The Analysis showed Kediri City emerges as a growth poles in Region Development Unit Kediri East Java with regional advantages from two aspects namely regional capability (Location Quotient analysis) and high per capita income (Tipology Klassen analysis) with hinterland area such as Kab. Nganjuk, Kab. Trenggalek, and Kab. Kediri and Kab. Tulungagung.

Keyword : Growth Poles, Region Development Unit Kediri, Scalogram, Location Quotient, Shift Share, Gravitation, Typologi Klassen.

RINGKASAN

Penentuan Pusat Pertumbuhan pada Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Kediri Provinsi Jawa Timur; Danu Hadi Basito, 130810101205; 2017: 195 halaman; Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Pembangunan ekonomi merupakan perubahan kondisi yang lebih baik dari kondisi sebelumnya dari segala aspek baik dari segi sosial maupun ekonomi. Pertumbuhan merupakan salah satu dari beberapa aspek yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu sendiri terbagi menjadi dua yakni pembangunan seimbang dan pembangunan tidak seimbang. Di Indonesia pada praktiknya menggunakan pembangunan tidak seimbang seperti yang telah tercantum pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2012 bahwa kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi sembilan wilayah Satuan Wilayah Pengembangan. Wilayah pengembangan adalah suatu kesatuan wilayah yang terdiri atas satu dan/atau beberapa kabupaten/kota yang memberntuk kesatuan struktur pelayanan serta berhirarki yang didalamnya terdapat pusat pertumbuhan dan wilayah pendukung.

Penelitian ini dilakukan guna untuk menentukan pusat pertumbuhan pada wilayah Satuan Wilayah Pengembangan Kediri dengan menggunakan lima alat analisis yang sudah ditetapkan. Tujuan penelitian ini antara lain : mengidentifikasi potensi sektor ekonomi pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur, mengidentifikasi sektor ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif di Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur, mengklasifikasikan wilayah pada masing-masing Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur, mengidentifikasi wilayah atas ketersediaan sarana infrastruktur sebagai penunjang pusat pertumbuhan di Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur, dan mengidentifikasi wilayah yang memiliki kekuatan interaksi sehingga berpotensi sebagai lokasi pusat pengembangan di Satuan Wilayah Pengembangan

Kediri Jawa Timur. Alat analisis yang digunakan yakni analisis *location quotient*, analisis *shift share*, analisis tipologi klassen, analisis skalogram, dan analisis model gravitasi. Jenis penelitian yang digunakan yakni bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik masing-masing wilayah dan dinas/instansi lain yang terkait.

Berdasarkan hasil dari kelima alat analisis yang digunakan bahwa Kota Kediri ditetapkan sebagai lokasi pusat pertumbuhan pada wilayah Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur, dengan memiliki dua keunggulan diantara lima alat analisis yang digunakan yakni dari segi kemampuan basis (*Location Quotient*) dan pendapatan perkapita daerah (Tipologi Klassen).

Analisis *location quotient* menunjukkan bahwa masing – masing wilayah memiliki kemampuan basis yang berbeda-beda yakni Kab. Nganjuk sebesar 2,231; Kab. Tulungagung sebesar 1,346; Kab. Trenggalek sebesar 1,696; Kab. Kediri sebesar 1,923; dan Kota Kediri sebesar 2,753 sekaligus menjadikan Kota Kediri sebagai daerah unggulan dari segi kemampuan basis wilayah.

Perhitungan analisis *differential shift (shift share)* diperoleh Kab. Trenggalek sebagai wilayah yang potensial dari segi keuntungan lokasional dengan persentase 3,4% dari nilai pertambahan PDRB tahun 2011-2012 yakni sebesar 70,139 miliar rupiah sedangkan kabupaten/kota lainnya memiliki kemerosotan dari segi keuntungan lokasional dan cenderung lebih ditopang oleh *national share* sebagai akibat dari ada kebijakan secara nasional.

Analisis tipologi klassen diperoleh Kota Kediri yang termasuk dalam klasifikasi daerah tertinggi dibanding dengan kabupaten/kota lainnya karena Kota Kediri memiliki kriteria meskipun pertumbuhan ekonomi wilayah yang rendah dibanding provinsi tetapi pendapatan perkapita wilayah lebih tinggi dibanding dengan provinsi dan dengan kriteria tersebut Kota Kediri menempati kuadran II termasuk pada daerah maju tapi tertekan. Sedangkan kabupaten/kota lain menempati pada kuadran IV termasuk pada daerah relatif tertinggal dengan kriteria pertumbuhan ekonomi wilayah dan pendapatan per kapita lebih rendah dibanding provinsi.

Perhitungan analisis skalogram menunjukkan Kab. Nganjuk merupakan daerah yang paling berpotensi dari segi keberadaan fasilitas pelayanan dengan nilai indeks sentralitas sebesar 318.645. Sedangkan hirarki II diperoleh Kab. Kediri, hirarki III diperoleh Kab. Trenggalek, hirarki IV diperoleh Kab. Tulungagung, dan hirarki V dengan nilai indeks sentralitas terendah diperoleh Kota Kediri.

Model gravitasi menunjukkan seberapa besar kekuatan interaksi antar wilayah. Pada analisis ini menunjukkan bahwa Kab. Kediri memiliki potensi dengan nilai kekuatan interaksi antar wilayah sebesar 25.851.825.728,91 yang menempatkan Kab. Kediri dengan nilai kekuatan interaksi terbesar dibanding kabupaten/kota lain yang dapat menjadi stimulus pemerataan pertumbuhan pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur.

Berdasarkan lima alat analisis yang digunakan diperoleh Kota Kediri sebagai pusat pertumbuhan wilayah dengan keunggulan kemampuan basis (*location quotient*) dan pendapatan per kapita daerah (tipologi klassen) yang lebih tinggi dibanding kabupaten/kota lain dan dengan daerah *hinterland* antara lain Kab. Nganjuk, Kab. Tulungagung, Kab. Trenggalek, dan Kab. Kediri.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penentuan Pusat Pertumbuhan pada Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Kediri Provinsi Jawa Timur”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Riniati, MP., selaku Dosen Pembimbing Utama, Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
2. Drs. Agus Luthfi, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
3. Bapak Dr. Muhammad Miqdad SE, MM, Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi, dan Ibu Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Ayahanda Sasmiyono dan Ibunda Indah Ariyani tercinta atas segala doa, dukungan dan kasih sayang yang tak pernah berhenti diberikan dengan tulus, terimakasih atas semua yang telah diberikan dan semoga kelak dapat menjadi anak yang lebih berbakti dan bisa membanggakan keluarga;
6. Kakak tersayang Sevira Agista yang tidak pernah henti memberikan dorongan dan semangat;
7. Agung Nugroho, Agam Nur, dan Zainnul Alam yang telah membantu kelancaran sekaligus menjadi teman lembur;

8. Saudara-saudara Big Tupa Fam's (KKN 110 Bulujaran Lor) Pak Lukman, Bunda Tika, Papi Juangga, Bu dokter Gifta, Dedek Fikri, Tante Nisa, Kak Renny, Kak Dewi, dan Kak Rosita; dan
9. Keluarga besar IESP 2013 serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan, dukungan, doa, serta bimbingan yang telah diberikan kepada saya, akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Tidak ada yang sempurna di dunia ini dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata, begitu juga dengan skripsi ini yang tidak luput dari kurang sempurnanya penyelesaian skripsi ini. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi segala pihak khususnya untuk Program Studi Ekonomi Pembangunan.

Jember, 2 Juni 2017

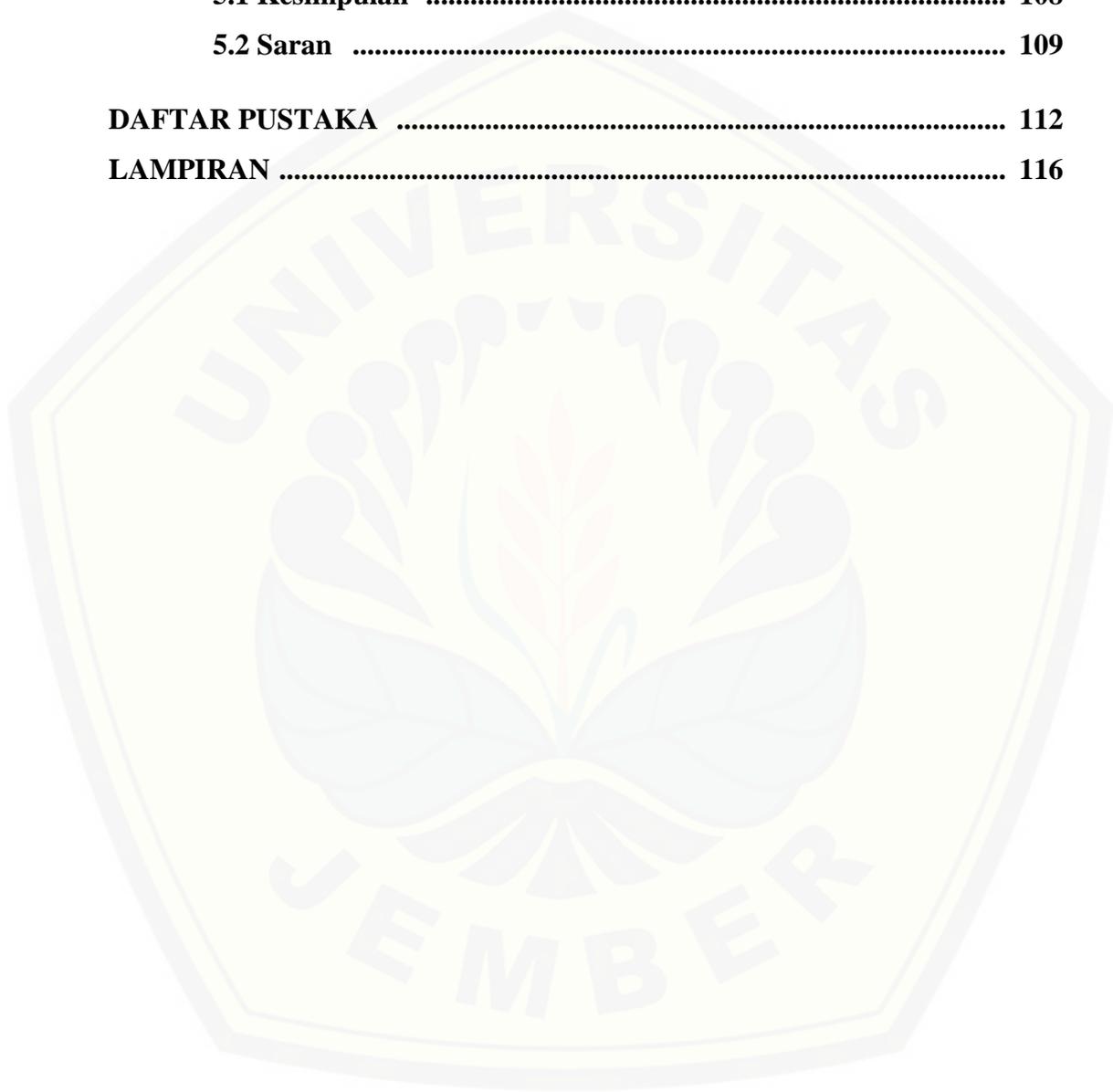
Danu Hadi Basito

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	v
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian	19
1.4 Manfaat Penelitian	19
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Landasan Teori	20
2.1.1 Teori Pusat Pertumbuhan	20
2.1.2 Teori Tempat Sentral	21
2.1.3 Teori Kutub Pertumbuhan	21
2.1.4 Teori Sektor	22

2.1.5 Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah	23
2.1.6 Teori Pembangunan Ekonomi	24
2.1.7 Teori Basis Ekonomi	25
2.1.8 Model Gravitasi	27
2.1.9 Infrastruktur	27
2.2 Penelitian Terdahulu	28
2.3 Kerangka Konseptual	30
BAB 3. METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis dan Pendekatan	32
3.2 Unit Analisis	32
3.3 Data dan Prosedur Pengumpulan	32
3.4 Metode Analisis Data	33
3.4.1 Analisis <i>Location Quotient</i>	33
3.4.2 Analisis <i>Shift Share</i>	35
3.4.3 Analisis Tipologi Klassen	38
3.4.4 Analisis skalogram	39
3.4.5 Analisis Model Gravitasi	43
3.5 Definisi Operasional	45
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Gambaran Umum	47
4.1.1 Kabupaten Nganjuk	48
4.1.2 Kabupaten Tulungagung	52
4.1.3 Kabupaten Trenggalek	56
4.1.4 Kabupaten Kediri	60
4.1.5 Kota Kediri	63
4.2 Hasil Analisis Data	67
4.2.1 Analisis <i>Location Quotient</i>	67
4.2.2 Analisis <i>Shift Share</i>	88
4.2.3 Analisis Tipologi Klassen	96
4.2.4 Analisis skalogram	99

4.2.5 Analisis Model Gravitasi	100
4.3 Pembahasan	101
BAB 5. PENUTUP	108
5.1 Kesimpulan	108
5.2 Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	116



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)	12
1.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota SWP Kediri Jawa Timur Tahun 2014.....	13
1.3 Jumlah Penduduk Melek Huruf Kabupaten/Kota Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur Tahun 2013	16
1.4 Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten/Kota SWP Kediri Jawa Timur Tahun 2015	16
1.5 Unit Puskesmas di Kabupaten/Kota SWP Kediri Jawa Timur Tahun 2015	17
2.1 Penelitian Terdahulu	29
3.1 Karakteristik Pola Analisis Tipologi Klassen	39
4.1 Data Jumlah, Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk Kab. Nganjuk Tahun 2014-2015	49
4.2 Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Nganjuk Tahun 2011-2015 ADHK 2010	50
4.3 Data Jumlah, Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk Kab. Tulungagung Tahun 2014-2015	54
4.4 Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tulungagung Tahun 2011-2015 ADHK 2010	54
4.5 Data Jumlah, Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk Kab. Trenggalek Tahun 2014-2015	58
4.6 Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Trenggalek Tahun 2011-2015 ADHK 2010	58
4.7 Data Jumlah, Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk Kab. Kediri Tahun 2014-2015	61
4.8 Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Kediri Tahun 2011-2015 ADHK 2010	62
4.9 Data Jumlah, Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk Kota Kediri Tahun 2014-2015	65

4.10	Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri Tahun 2011-2015 ADHK 2010	66
4.11	Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> Sektor Ekonomi Kabupaten/Kota Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur Tahun 2011-2015	68
4.12	Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> Sektor Ekonomi Kab. Nganjuk Tahun 2011-2015	70
4.13	Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> Subsektor dan Subsubsektor Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kab. Nganjuk Tahun 2011-2015	71
4.14	Perkembangan Nilai Basis Kab. Nganjuk Tahun 2011-2015	73
4.15	Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> Sektor Ekonomi Kab. Tulungagung Tahun 2011-2015	74
4.16	Perkembangan Nilai Basis Kab. Tulungagung Tahun 2011-2015	76
4.17	Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> Sektor Ekonomi Kab. Trenggalek Tahun 2011-2015	77
4.18	Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> Subsektor dan Subsubsektor Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kab. Trenggalek Tahun 2011-2015	78
4.19	Perkembangan Nilai Basis Kab. Trenggalek Tahun 2011-2015	79
4.20	Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> Sektor Ekonomi Kab. Kediri Tahun 2011-2015	81
4.21	Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> Subsektor dan Subsubsektor Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kab. Kediri Tahun 2011-2015	82
4.22	Perkembangan Nilai Basis Kab. Kediri Tahun 2011-2015	83
4.23	Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> Sektor Ekonomi Kota Kediri Tahun 2011-2015	84
4.24	Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> Subsektor pada Sektor Industri Pengolahan Kab. Kediri Tahun 2011-2015	85
4.25	Perkembangan Nilai Basis Kota Kediri Tahun 2011-2015	87
4.26	Hasil Analisis <i>Shift Share</i> Kabupaten/Kota pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur Tahun 2011-2015	88

4.27 Hasil Analisis <i>Differential Shift (Shift Share)</i> Sektor Ekonomi Kab. Nganjuk Tahun 2011-2015	90
4.28 Hasil Analisis <i>Differential Shift (Shift Share)</i> Sektor Ekonomi Kab. Tulungagung Tahun 2011-2015	91
4.29 Hasil Analisis <i>Differential Shift (Shift Share)</i> Sektor Ekonomi Kab. Trenggalek Tahun 2011-2015	92
4.30 Hasil Analisis <i>Differential Shift (Shift Share)</i> Sektor Ekonomi Kab. Kediri Tahun 2011-2015	94
4.31 Hasil Analisis <i>Differential Shift (Shift Share)</i> Sektor Ekonomi Kota Kediri Tahun 2011-2015	95
4.32 Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur Tahun 2015	97
4.33 Hasil Analisis Skalogram Kabupaten/Kota pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur Tahun 2015	99
4.34 Hasil Analisis Model Gravitasi Kabupaten/Kota pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur Tahun 2015	100
4.35 Peringkat Wilayah Berdasarkan Alat Analisis pada Kabupaten/Kota Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur Tahun 2011-2015	107

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Produksi Bawang Merah Kabupaten/Kota Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur (Ton)	6
1.2 Produksi Komoditi Tertinggi Tanaman Sayuran Semusim Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015 (Ton)	8
1.3 Produk Domestik Regional Bruto Sektor dan Subsektor Kabupaten/Kota Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur Tahun 2015	9
1.4 Upah Minimum Kabupaten/Kota Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur Tahun 2015	10
1.5 Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2013	14
1.6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur Tahun 2015	15
2.1 Kerangka Konseptual	30
3.1 Ilustrasi Interaksi Antar Wilayah	43
4.1 Peta Kabupaten/Kota Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur	47
4.2 Peta Kabupaten Nganjuk	48
4.3 Peta Kabupaten Tulungagung	54
4.4 Kabupaten Trenggalek	56
4.5 Kabupaten Kediri	60
4.6 Kota Kediri	64

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

A. Data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur Tahun 2011-2015	116
A.1 Data Produk Domestik Regional Bruto Kab. Nganjuk Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)	116
A.2 Data Produk Domestik Regional Bruto Kab. Tulungagung Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)	117
A.3 Data Produk Domestik Regional Bruto Kab. Trenggalek Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)	118
A.4 Data Produk Domestik Regional Bruto Kab. Kediri Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah).....	119
A.5 Data Produk Domestik Regional Bruto Kota Kediri Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah).....	120
A.6 Data Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah).....	121
A.7 Data Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kab. Nganjuk Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)	122
A.8 Data Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kab. Tulungagung Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)	123
A.9 Data Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kab. Trenggalek Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)	124
A.10 Data Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kab. Kediri Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)	125
A.11 Data Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jawa Timur Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)	126

A.12 Data Produk Domestik Regional Bruto Sektor Industri Pengolahan Kota Kediri Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)	127
A.13 Data Produk Domestik Regional Bruto Sektor Industri Pengolahan Jawa Timur Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)	128
B. Perhitungan Analisis <i>Location Quotient</i>	129
B.1 Perhitungan Analisis Rata – rata Nilai <i>Location Quotient</i> Sektor Ekonomi Kab. Nganjuk Tahun 2011-2015	129
B.2 Perhitungan Analisis Rata-rata Nilai <i>Location Quotient</i> Sektor Ekonomi Kab. Tulungagung Tahun 2011-2015	132
B.3 Perhitungan Analisis Rata-rata Nilai <i>Location Quotient</i> Sektor Ekonomi Kab. Trenggalek Tahun 2011-2015	134
B.4 Perhitungan Analisis Rata-rata Nilai <i>Location Quotient</i> Sektor Ekonomi Kab. Kediri Tahun 2011-2015	137
B.5 Perhitungan Analisis Rata-rata Nilai <i>Location Quotient</i> Sektor Ekonomi Kota Kediri Tahun 2011-2015	140
B.6 Peringkat <i>Location Quotient</i> Kabupaten/Kota pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur Tahun 2011-2015	143
C. Perhitungan Analisis <i>Shift Share</i>	144
C.1 Perhitungan Analisis <i>Shift Share</i> Kab. Nganjuk Tahun 2011-2015	144
C.2 Perhitungan Analisis <i>Shift Share</i> Kab. Trenggalek Tahun 2011-2015	146
C.3 Perhitungan Analisis <i>Shift Share</i> Kab. Tulungagung Tahun 2011-2015	148
C.4 Perhitungan Analisis <i>Shift Share</i> Kab. Kediri Tahun 2011-2015	150
C.5 Perhitungan Analisis <i>Shift Share</i> Kota Kediri Tahun 2011-2015	152
C.6 Peringkat Wilayah Berdasarkan Nilai <i>Differential Shift</i> Kabupaten/Kota Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur Tahun 2011-2015	154

D. Perhitungan Analisis Tipologi Klassen	155
D.1 Data Variabel Analisis Tipologi Klassen	155
D.2 Perhitungan Laju Pertumbuhan dan Pendapatan per Kapita Kabupaten/Kota pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur Tahun 2015	155
D.3 Klasifikasi Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur Tahun 2015	156
E. Perhitungan Analisis Skalogram Kabupaten/Kota Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur Tahun 2015	157
E.1 Data Jumlah Unit Fasilitas Pelayanan Tahun 2015	157
E.2 Perhitungan Analisis Skalogram Berdasarkan Jumlah Jenis Fasilitas	158
E.3 Perhitungan Analisis Skalogram dalam Bentuk Nilai Indeks Sentralitas	159
E.4 Hirarki Wilayah Berdasarkan Nilai Indeks Sentralitas pada Kabupaten /Kota Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur Tahun 2015	160
F. Perhitungan Analisis Model Gravitasi	161
F.1 Data Jumlah Penduduk dan Jarak Antar Kabupaten/Kota pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur Tahun 2015	161
F.2 Nilai Interaksi Antar Kabupaten/Kota Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur Tahun 2015	161
F.3 Peringkat Wilayah Berdasarkan Total Nilai Interaksi Kabupaten/Kota Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur Tahun 2015	162
G. Peringkat Wilayah Berdasarkan Enam Alat Analisis pada Kabupaten/Kota Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur Tahun 2011 - 2015	163
H. Maping Kabupaten/Kota Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur	164
H.1 Peta Kabupaten Nganjuk	164
H.2 Peta Kabupaten Tulungagung	165
H.3 Peta Kabupaten Trenggalek	166

H.4 Peta Kabupaten Kediri	167
H.5 Peta Kabupaten Kota Kediri	168
H.6 Mapping Daerah Pusat Pertumbuhan dan Daerah <i>Hinterland</i> Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur	169



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar guna mengubah kondisi atas suatu bangsa menjadi lebih baik dibandingkan masa sebelumnya dan dilanjutkan dengan usaha untuk menjadi lebih baik lagi pada masa berikutnya. Pembangunan juga merupakan perubahan yang terjadi secara spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner guna mengubah kondisi keseimbangan perdagangan bebas serta ketatnya persaingan bebas antar bangsa, sehingga dibutuhkan kekuatan daya saing ekonomi antar wilayah (Adisasmita, 2005: 204).

Menurut Sukirno (2006: 10) bahwa pembangunan ekonomi merupakan kebutuhan setiap wilayah yang menjadi tolak ukur kondisi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Selain itu tidak jarang pembangunan ekonomi dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi yang memiliki perbedaan dalam segi definisi dan ukuran. Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran kuantitatif perkembangan perekonomian tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional. Sedangkan pembangunan ekonomi merupakan akumulasi dari pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan aspek lainnya seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan kemakmuran, dll. Hal tersebut berarti pembangunan ekonomi bukan diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa saja tetapi juga dari perubahan aspek-aspek lainnya. Pembangunan ekonomi didefinisikan juga sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat secara berkelanjutan dalam jangka panjang

Sukirno (2006: 11) menyatakan bahwa data pendapatan per kapita masih digunakan untuk dua tujuan yakni :

1. Sebagai tolak ukur percepatan pembangunan ekonomi pada suatu tahun
2. Sebagai pembanding tingkat kemakmuran suatu bangsa

Akan tetapi penggunaan variabel pendapatan perkapita tersebut tetap memiliki kelemahan sebagai indikator pembangunan ekonomi, yakni :

1. Tidak sesuainya penggunaan pendapatan per kapita untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat pembangunan ekonomi.
2. Lemahnya statistik dan metodologi perhitungan pendapatan perkapita.

Pembangunan dibagi atas dua macam yakni pembangunan seimbang dan pembangunan tidak seimbang. Pembangunan seimbang ditokohi oleh Lewis yang menyatakan bahwa pembangunan ditekankan pada keuntungan yang diperoleh akibat dari efisiensi yang terjadi pada berbagai sektor, yakni sektor pertanian dan sektor industri, dan sektor dalam negeri dan luar negeri. Karena apabila pembangunan dipusatkan pada satu sektor saja, maka akan menimbulkan banyak masalah ketidakstabilan dan gangguan pada pembangunan. Sedangkan pembangunan tidak yang ditokohi oleh Hirschman bahwa proses pembangunan tidak seimbang adalah program pembangunan guna mempercepat proses pembangunan dibandingkan dengan pembangunan seimbang. Pandangan tersebut dikemukakan oleh Hirschman didasarkan atas tiga pertimbangan, yakni: (a) secara historis bahwa pembangunan ekonomi yang telah berlaku ialah proses pembangunan tidak seimbang, (b) guna mempertinggi efisiensi pengelolaan sumber daya yang tersedia; dan (c) pembangunan tidak seimbang dipercaya mampu memberikan efek *bottlenecks* yang akan mendorong pembangunan selanjutnya (Sukirno, 2006: 292).

Satuan Wilayah Pengembangan merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRP) Jawa Timur guna untuk mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan yang terus membesar dan berpotensi mendorong perkembangan *mega-urban* serta menyeimbangkan perkembangan perkotaan dan mengendalikan perkembangan kawasan terbangun berkelanjutan. Penentuan sembilan SWP di Jawa Timur dilakukan berdasarkan kecenderungan pergerakan dan mobilitas manusia, barang dan jasa, serta karakteristik wilayah. Pada dasarnya orientasi pergerakan manusia, barang dan jasa cenderung memusat dan mengarah pada wilayah yang terlebih dahulu berkembang (Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2015).

Satuan Wilayah Pengembangan disingkat SWP merupakan suatu wilayah dengan satu dan atau semua kabupaten/kotaperkotaan yang mempunyai hubungan hirarki terikat oleh sistem jaringan jalan sebagai prasarana perhubungan darat, dan atau oleh sistem jaringan sungai atau perairan sebagai prasarana perhubungan air (Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2006).

Wilayah Pengembangan (WP) adalah suatu kesatuan wilayah yang terdiri atas satu dan/atau beberapa kabupaten / kota yang membentuk kesatuan struktur pelayanan serta berhierarki yang di dalamnya terdapat pusat pertumbuhan dan wilayah pendukung (Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2012).

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRP) Jawa Timur, perwilayahan sebagaimana dimaksud dalam 9 (sembilan) SWP sebagai berikut (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, 2006):

1. SWP Gerbangkertosusila Plus meliputi: Kota Surabaya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten dan Kota Pasuruan dengan pusat pelayanan di Kota Surabaya
2. SWP Malang Raya meliputi: Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang, dengan pusat pelayanan di Kota Malang
3. SWP Madiun dan sekitarnya meliputi: Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, dengan pusat pelayanan di Kota Madiun.
4. SWP Jember dan sekitarnya meliputi: Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Jember
5. SWP Probolinggo-Lumajang meliputi: Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang, dengan pusat pelayanan di Kota Probolinggo
6. SWP Kediri dan sekitarnya meliputi: Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung, dengan pusat pelayanan di Kota Kediri.

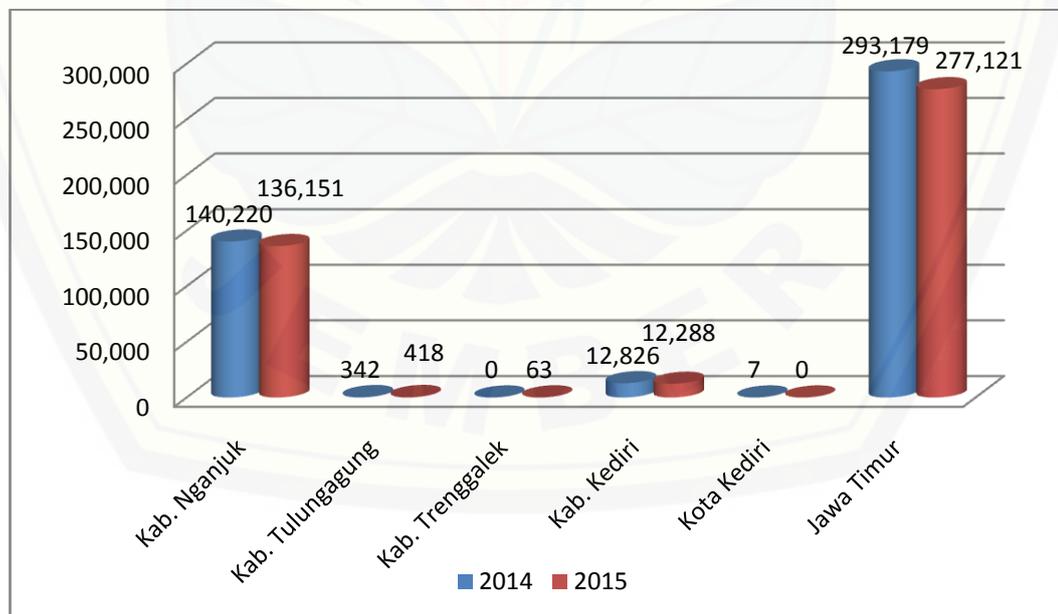
7. SWP Blitar meliputi: meliputi Kota Blitar dan Kabupaten Blitar, dengan pusat pelayanan Kota Blitar
8. SWP Banyuwangi meliputi: Kabupaten Banyuwangi, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Banyuwangi
9. SWP Madura dan Kepulauan meliputi: Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep dengan pusat pelayanan di Perkotaan Pamekasan

Setiap SWP diarahkan mempunyai fungsi wilayah sesuai dengan potensi wilayah masing-masing yang diantaranya (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, 2006):

1. SWP Gerbangkertasusila Plus diarahkan mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, industri, dan sumberdaya energi dengan fungsi pusat SWP sebagai pusat pelayanan wilayah, pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan prasarana wisata.
2. SWP Malang Raya sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, industri transportasi, dan sumberdaya energi dengan fungsi pusat SWP sebagai pusat pelayanan wilayah, pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, kesehatan, dan prasarana wisata.
3. SWP Madiun sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan kegiatan . pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, peternakan, pertambangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan industri dengan fungsi pusat SWP sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan kesehatan.
4. SWP Jember dan sekitarnya sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan. hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan.

- pendidikan, kesehatan dan pariwisata dengan fungsi pusat SWP sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
5. SWP Probolinggo - Lumajang sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, industri, dan sumberdaya energi, dan dengan fungsi pusat SWP sebagai pusat pemerintahan, industri, perdagangan, jasa, kesehatan, pariwisata.
 6. SWP Kediri dan sekitarnya sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertambangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, perikanan, industri dan sumberdaya energi dengan fungsi pusat SWP sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan kesehatan
 7. SWP Blitar sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pendidikan, kesehatan, pariwisata sumberdaya energi dengan fungsi pusat SWP sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.
 8. Banyuwangi sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, pertambangan, perikanan, industri, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata dengan fungsi pusat SWP sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pariwisata.
 9. SWP Madura dan Kepulauan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi sebagai pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, pertambangan, perikanan, industri, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata dengan fungsi pusat SWP sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata.

Pemilihan lokasi penelitian yakni pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri dan sekitarnya. Satuan Wilayah Pengembangan Kediri terdiri atas lima kabupaten/kota yang diantaranya Kab. Nganjuk, Kab. Tulungagung, Kab. Trenggalek, Kab. Kediri, dan Kota Kediri dengan fungsi wilayah sebagai pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertambangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, perikanan, industri dan sumberdaya energi dengan fungsi pusat SWP sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan kesehatan. Terdapat beberapa alasan mengenai pemilihan lokasi penelitian pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri yang diantaranya terdapat dua kabupaten/kota yang menarik untuk di analisis yakni Kota Kediri yang telah terpilih sebagai wilayah pusat pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri secara Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur terlebih dengan potensi sektor ekonomi dan Kab. Nganjuk sebagai potensi pusat pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri dengan jumlah unit fasilitas pelayanan tertinggi dan potensi sektor ekonomi Kab. Nganjuk sebagai pusat pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur.

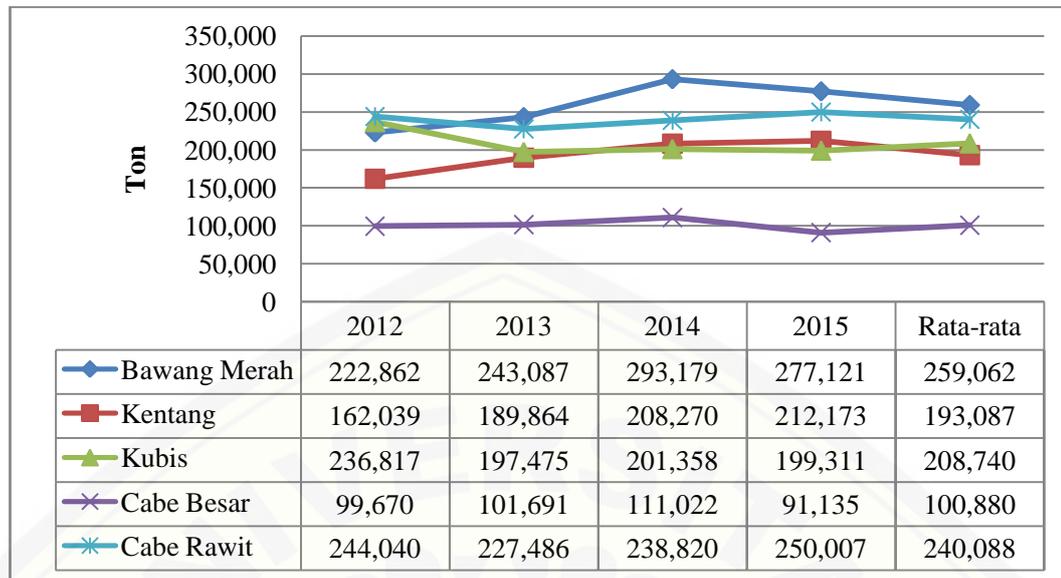


Gambar 1.1 Produksi Bawang Merah Kabupaten/Kota Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur (Ton) (Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016)

Dari Gambar 1.1 dapat diketahui produksi bawang merah pada kabupaten/kota Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur tahun 2014-2015. Produksi bawang merah pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur paling rendah dimiliki oleh wilayah Kota Kediri dengan produksi 7 ton pada tahun 2014 dan tidak berproduksi pada tahun 2015. Sedangkan produksi bawang merah terbesar dimiliki Kab. Nganjuk dengan produksi 140.220 ton pada tahun 2014 dan 136.151 ton pada tahun 2015. Sebagai bagian produsen bawang merah, Kab. Nganjuk memiliki peringkat pertama pada kontribusi produksi bawang merah se-Jawa Timur dengan persentase 49,13% dari total produksi Jawa Timur 277.121 ton dan peringkat kedua sebagai kontributor produksi bawang merah se-Indonesia dengan persentase 11,08% dari total produksi bawang merah Indonesia sebesar 1.229.189 ton, sedangkan untuk kabupaten dengan produksi bawang merah tertinggi se-Indonesia yakni Kabupaten Berbes dengan nilai produksi sebesar 311.296 ton dan persentase produksi mencapai 25,32% dari produksi bawang merah Indonesia.

Dari segi sektor ekonomi, potensi yang dimiliki oleh Kab. Nganjuk ialah sentra produksi bawang merah dengan produksi mencapai peringkat satu produksi bawang merah se-Jawa Timur dan disusul oleh Kabupaten/Kota Probolinggo dan Kab. Nganjuk menduduki peringkat dua produksi bawang merah se-Indonesia dengan peringkat pertama dimiliki oleh Kabupaten Berbes, Jawa Tengah. Berikut data produksi bawang merah.

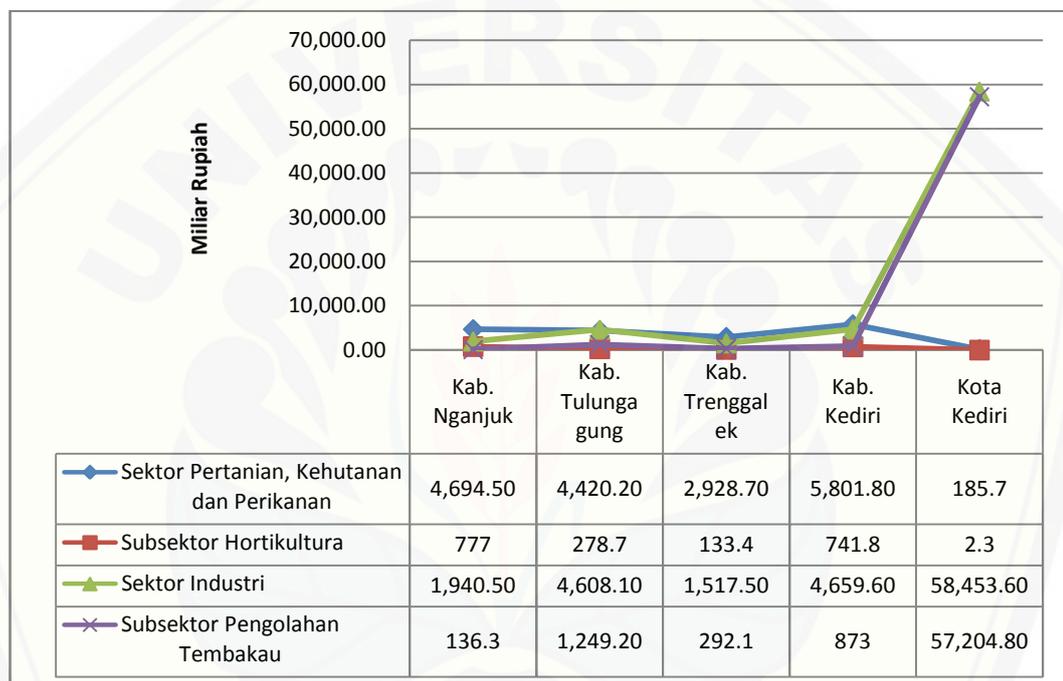
Bawang merah menjadi pertimbangan dalam meninjau potensi yang ada pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur disebabkan produksi bawang merah memiliki peringkat pertama dalam hal produksi komoditi tertinggi tanaman sayuran semusim di Jawa Timur tahun 2012-2015. Selain sektor ekonomi, Kabupaten Nganjuk juga memiliki potensi dari segi ketersediaan jumlah unit fasilitas pelayanan dengan jumlah unit fasilitas mencapai 13.842 unit dengan jenis fasilitas yang telah ditentukan.



Gambar 1.2 Produksi Komoditi Tertinggi Tanaman Sayuran Semusim Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015 (Ton) (Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016)

Dari Gambar 1.2 dapat dilihat gambar diagram tentang produksi komoditi tertinggi tanaman sayuran semusim Jawa Timur tahun 2012-2015, dari data tersebut menyatakan bahwa produksi bawang merah memiliki produksi tertinggi pada komoditi tanaman sayuran semusim di Jawa Timur. Produksi bawang merah pada tahun 2012 hingga 2015 cenderung mengalami fluktuasi, akan tetapi meskipun pada tahun 2012 produksi bawang merah sempat berada pada peringkat tiga dibawah produksi cabe rawit dan kubis, pada tahun 2013 hingga 2015 produksi bawang merah Jawa Timur menjadi peringkat pertama pada produksi komoditi tanaman sayuran semusim. Pada tingkat nasional tahun 2015 produksi bawang merah memiliki produksi terbesar ketiga produksi hortikultura dibawah produksi cabai dan kubis dengan nilai sebesar 1.915.016 ton produksi cabai, 1.442.232 ton produksi kubis, dan 1.229.189 produksi bawang merah. Provinsi Jawa Timur memiliki produksi bawang merah terbesar kedua secara nasional setelah Jawa Tengah dengan nilai sebesar 277.121 ton oleh Jawa Timur dan 471.169 ton oleh Jawa Tengah serta kontribusi produksi sebesar 22,54% oleh Jawa Timur dan 38,32% oleh Jawa Tengah terhadap produksi bawang merah di Indonesia.

Kota Kediri selain wilayah yang sudah ditetapkan sebagai pusat menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, Kota Kediri juga memiliki sektor ekonomi yang dapat menunjang sebagai pusat pada wilayah SWP Kediri yakni sektor industri lebih tepatnya industri pengolahan tembakau, selain itu Kota Kediri juga memiliki UMK yang paling tinggi diantara kabupaten kota yang ada pada wilayah Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur yang pastinya berada di atas standart kebutuhan hidup layak (KHL) Jawa Timur.



Gambar 1.3 Produk Domestik Regional Bruto Sektor dan Subsektor Kabupaten Kota Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur Tahun 2015 (Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016)

Pada Gambar 1.3 dapat diketahui produk domestik regional bruto sektor pertanian dan subsektor hortikultura serta sektor industri dan subsektor industri pengolahan tembakau pada kabupaten/kota Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur. Dari Gambar 1.3 diketahui produk domestik regional bruto sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terbesar dimiliki oleh Kab. Kediri dengan nilai sebesar 5.801,80 miliar rupiah dan diikuti oleh Kab. Nganjuk dengan nilai sebesar 4.694,50 miliar rupiah akan tetapi Kab. Nganjuk unggul pada subsektor hortikultura dengan nilai sebesar 777 miliar rupiah dan diikuti oleh Kab. Kediri

sebesar 741,8 miliar rupiah. Sedangkan untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan nilai terendah dimiliki oleh Kota Kediri dengan nilai sebesar 185,7 miliar rupiah. Untuk sektor industri secara PDRB nilai terbesar dimiliki oleh Kota Kediri dengan nilai mencapai sebesar 58.453,60 miliar rupiah yang didominasi dengan subsektor pengolahan tembakau dengan nilai produk sebesar 57.204,80 miliar rupiah dan untuk nilai terendah pada sektor industri dimiliki oleh Kab. Nganjuk dengan nilai produk sebesar 136,3 miliar rupiah. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, nilai produk sektor industri Kota Kediri menduduki peringkat kedua tertinggi setelah Kota Surabaya dengan nilai produk sebesar 63.458,6 miliar rupiah sedangkan untuk subsektor pengolahan tembakau untuk Kota Kediri menduduki peringkat terbesar pertama se-Jawa Timur dan diikuti Kota Surabaya dengan nilai sebesar 12.684,3 miliar rupiah. Dari penjelasan dan data tersebut hanya membaca keunggulan secara nilai atas PDRB dan belum digunakan analisis dalam mengetahui lebih lanjut tentang sektor tersebut seperti kemampuan ekspor dan lain-lain.



Gambar 1.4 Upah Minimum Kabupaten Kota Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur 2015 (Sumber: Gubernur Jawa Timur, 2014)

Ditinjau dari tiap-tiap upah minimum kabupaten/kota, berdasarkan Gambar 1.4 dapat diketahui upah minimum yang dimiliki oleh kabupaten/kota pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur memiliki upah minimum yang lebih

besar dari nilai standar kebutuhan layak hidup (KHL) yang telah ditetapkan oleh Provinsi Jawa Timur. Standar kebutuhan layak hidup (KHL) yang telah ditetapkan oleh Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 yakni sebesar Rp825.000,00. Untuk upah minim kabupaten/kota tertinggi dimiliki oleh kota Kediri dengan nilai sebesar Rp1.339.750,00 dan untuk upah minimum kabupaten/kota terendah dimiliki oleh Kab. Trenggalek dengan nilai sebesar Rp1.150.000,00 dan masih berada diatas standar kebutuhan hidup layak (KHL) di Provinsi Jawa Timur. Untuk nilai upah minimum kabupaten/kota terbesar kedua dimiliki oleh Kab. Kediri dengan nilai sebesar Rp1.305.250,00, untuk peringkat tiga teratas dimiliki oleh Kab. Tulungagung dengan nilai sebesar Rp1.273.050,00, dan untuk peringkat empat teratas dimiliki oleh Kab. Nganjuk dengan nilai sebesar Rp1.265.000,00.

Dari tabel 1.1 dapat dapat kita lihat total produk domestik regional bruto di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan perhitungan harga konstan pada tahun 2010. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kabupaten atau kota yang ada pada satuan wilayah pengembangan Kediri Jawa Timur bagi yang dapat menghasilkan output paling tinggi dimiliki oleh Kota Kediri dengan nilai mencapai Rp 69.220 miliar pada tahun 2014, sedangkan untuk kota/kabupaten yang memiliki kemampuan menghasilkan output terendah di satuan wilayah pengembangan Kediri Jawa Timur dimiliki oleh Kab. Trenggalek dengan nilai hanya sebesar Rp 9.995 miliar. Dari nilai tertinggi sampai terendah maka kemampuan kabupaten/kota pada satuan wilayah pengembangan Kediri Jawa Timur dalam menghasilkan output barang dan jasa yakni Kota Kediri, Kab. Kediri, Kab. Tulungagung, Kab. Nganjuk, dan Kab. Trenggalek. Kota Kediri menempati peringkat lima tertinggi dari segi tingginya nilai PDRB seluruh kabupaten/kota Jawa Timur, sedangkan Kab. Trenggalek sebagai kabupaten yang memiliki nilai PDRB terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri yakni menempati peringkat sembilan terendah nilai PDRB kabupaten/kota se-Jawa Timur. Berikut Tabel 1.1 tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010.

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)

No.	Keterangan	2011	2012	2013	2014
1	Kab. Pacitan	7.246,2	7.705,0	8.153,2	8.577,6
2	Kab. Ponorogo	9.472,2	10.038,4	10.557,3	11.114,3
3	Kab. Trenggalek	8.435,2	8.959,5	9.482,2	9.995,1
4	Kab. Tulungagung	17.845,2	18.999,0	20.144,4	21.242,1
5	Kab. Blitar	17.093,9	18.054,5	18.965,2	19.915,3
6	Kab. Kediri	19.408,3	20.644,1	21.824,1	22.980,6
7	Kab. Malang	44.091,3	47.076,0	49.711,4	52.546,6
8	Kab. Lumajang	15.144,4	16.053,4	16.940,5	17.854,7
9	Kab. Jember	35.208,2	37.262,0	39.224,5	41.465,5
10	Kab. Banyuwangi	34.720,4	37.235,7	39.649,9	41.994,2
11	Kab. Bondowoso	9.033,0	9.583,4	10.140,1	10.654,9
12	Kab. Situbondo	8.927,1	9.411,6	10.005,3	10.558,5
13	Kab. Probolinggo	15.912,5	16.936,8	17.838,2	18.751,8
14	Kab. Pasuruan	65.271,6	70.167,1	74.928,8	79.905,3
15	Kab. Sidoarjo	87.212,4	93.543,9	99.975,7	106.156,4
16	Kab. Mojokerto	36.405,8	39.047,3	41.579,2	44.225,1
17	Kab. Jombang	18.385,0	19.514,8	20.672,3	21.793,2
18	Kab. Nganjuk	12.061,2	12.767,0	13.473,8	14.161,5
19	Kab. Madiun	8.608,7	9.135,7	9.654,1	10.169,7
20	Kab.. Magetan	8.744,8	9.251,2	9.789,6	10.296,7
21	Kab. Ngawi	8.973,3	9.568,2	10.203,0	10.775,0
22	Kab. Bojonegoro	36.751,0	38.136,1	38.993,7	39.912,5
23	Kab. Tuban	29.934,3	31.816,3	33.836,7	35.611,4
24	Kab. Lamongan	17.360,5	18.562,7	19.836,1	21.107,6
25	Kab. Gresik	62.898,7	67.248,8	71.304,5	76.340,4
26	Kab. Bangkalan	16.406,5	16.173,7	16.204,0	17.369,8
27	Kab. Sampang	10.315,3	10.910,9	11.622,0	11.629,6
28	Kab. Pamekasan	7.429,4	7.894,0	8.369,6	8.856,2
29	Kab. Sumenep	16.064,8	17.665,0	20.162,8	21.478,4
30	Kota Kediri	60.020,1	63.185,1	65.407,0	69.220,0
31	Kota Blitar	3.038,4	3.236,6	3.445,2	3.648,5
32	Kota Malang	33.273,7	35.355,7	37.451,7	39.725,7
33	Kota Probolinggo	5.213,9	5.552,1	5.911,3	6.261,9
34	Kota Pasuruan	3.810,7	4.051,2	4.314,1	4.560,5
35	Kota Mojokerta	3.165,6	3.358,4	3.566,4	3.771,8
36	Kota Madiun	6.494,4	6.937,7	7.470,7	7.965,5
37	Kota Surabaya	247.686,6	265.892,1	286.057,2	305.308,0
38	Kota Batu	6.968,0	7.473,6	8.018,0	8.573,4
Total 38 Kabupaten/Kota		1.055.032,2	1.124.404,6	1.194.974	1.266.475,3
PDRB Jatim		1.055.032,2	1.124.404,6	1.194.974	1.266.475,3

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

Satuan pengembangan wilayah merupakan langkah misi dalam mewujudkan antara lain (Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2012):

1. Keseimbangan pemerataan pembangunan antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi;
2. Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dalam meningkatkan daya saing daerah dalam kancah Asia;
3. Penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara berkeadilan dan berhierarki serta bernilai tambah tinggi;
4. Pemantapan fungsi lindung dan kelestarian sumber daya alam dan buatan;
5. Optimasi fungsi budi daya kawasan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dalam persaingan global;
6. Keterpaduan program pembangunan berbasis agribisnis dan jasa komersial yang didukung seluruh pemangku kepentingan; dan
7. Kemudahan bagi pengembangan investasi daerah serta peningkatan kerja sama regional.

Selain itu Penataan Ruang Wilayah Provinsi merupakan upaya dalam mewujudkan ruang wilayah provinsi yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem agropolitan dan sistem metropolitan (Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2012).

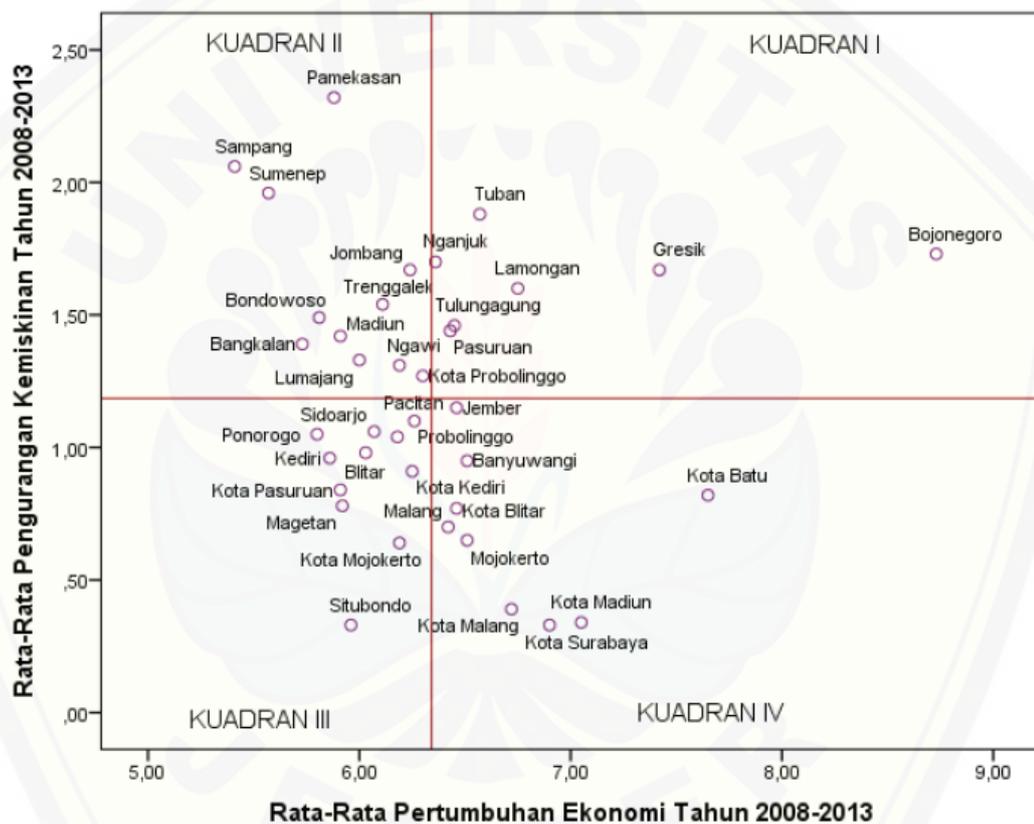
Tabel 1.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota SWP Kediri Jawa Timur Tahun 2014

No.	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin
1.	Kota Kediri	7,95	22.100
2.	Kab. Kediri	12,77	196.800
3.	Kab. Tulungagung	8,75	89.000
4.	Kab. Nganjuk	13,14	136.500
5.	Kab. Trenggalek	13,10	90.000

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015 data diolah

Tabel 1.2 menyajikan tabel tentang jumlah persentase penduduk miskin di kabupaten/kota di satuan wilayah pengembangan Kediri Provinsi Jawa Timur 2013. Dari tabel 1.2 dapat kita lihat persentase penduduk miskin tertinggi dimiliki oleh Kab. Nganjuk dan persentase penduduk miskin terendah dimiliki oleh Kota

Kediri. Jumlah penduduk miskin pada suatu wilayah tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam hal kemampuan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Akan tetapi lebih tepatnya kemampuan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tinjau dari persentase jumlah penduduk pada wilayah tersebut. Jumlah penduduk tidak dapat digunakan sebagai acuan karena pada dasarnya jumlah penduduk masing-masing daerah pastilah berbeda-beda.



Gambar 1.5 Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2013 (Sumber: Badan Pusat Statistik)

Gambar 1.5 menjelaskan kondisi wilayah tepatnya kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang menggunakan dua variabel sebagai ukuran, yakni rata-rata kemiskinan dan rata-rata pertumbuhan ekonomi. Kota Kediri dan Kab. Kediri terletak pada kuadran 3 yang berarti dengan adanya pengurangan jumlah penduduk miskin yang masih berada di bawah rata-rata maka tidak membuat

pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dan masih berada di bawah rata-rata.pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan Kab. Trenggalek yang berada pada kuadran II yang berarti pengurangan kemiskinan yang mencapai diatas rata-rata masih belum memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang masih berada di bawah rata-rata. Kab. Tulungagung dan Kab Nganjuk terletak pada kuadran I yang berarti ketika pengurangan penduduk miskin berada di atas rata-rata, maka hal tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat hingga di atas rata-rata.



Gambar 1.6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur Tahun 2015 (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015)

Berdasarkan Gambar 1.6 diketahui variasi pertumbuhan ekonomi yang dimiliki oleh kabupaten/kota pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur pada tahun 2015, Kota Kediri menempati pertumbuhan ekonomi paling tinggi diantara kabupaten/kota lain di Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,36% dan pertumbuhan ekonomi yang paling rendah dimiliki Kab. Kediri sebesar 4,88%. Sedangkan untuk kabupaten lainnya memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 5,18% pada Kab. Nganjuk, 4,99% pada Kab. Tulungagung, dan 5,03% pada Kab. Trenggalek.

Berikut pada Tabel 1.3 ditampilkan data tentang kondisi masing-masing kabupaten kota pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur tentang jumlah penduduk melek huruf.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Melek Huruf Kabupaten/Kota Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Persentase Melek Huruf	Jumlah Penduduk Melek Huruf
1.	Kota Kediri	269.193	97,53	262.544
2.	Kab. Kediri	1.503.095	92,81	1.395.022
3.	Kab. Tulungagung	992.317	93,55	928.313
4.	Kab. Nganjuk	1.019.018	90,48	922.007
5.	Kab. Trenggalek	675.584	92,83	627.145

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 1.3 memberikan informasi tentang jumlah penduduk melek huruf di satuan wilayah pengembangan Kediri provinsi Jawa Timur. Dari tabel 1.3 dapat dilihat persentase tertinggi diperoleh Kota Kediri dan yang selanjutnya Kab. Tulungagung, Kab. Trenggalek, Kab. Kediri, dan yang terakhir terendah dimiliki oleh Kab. Nganjuk. Semakin kecil persentase dari kemampuan melek huruf maka dapat disimpulkan memiliki sumber daya manusia yang lebih baik di bandingkan dengan kabupaten/kota yang memiliki persentase melek huruf yang lebih tinggi.

Tabel 1.4 Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten/Kota SWP Kediri Jawa Timur Tahun 2015

No.	Kabupaten/Kota	Rata-rata Tahun
1.	Kota Kediri	73,62
2.	Kab. Kediri	72,14
3.	Kab. Tulungagung	73,28
4.	Kab. Nganjuk	70,97
5.	Kab. Trenggalek	72,91

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari Tabel 1.4 disimpulkan bahwa Kab. Tulungagung memiliki rata-rata jumlah usia harapan hidup tertinggi dan yang terendah terdapat di Kab. Nganjuk. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa usia produktif yang tertinggi dimiliki oleh kab. Tulungagung karena memiliki usia yang lebih lama pada penduduknya yaitu mencapai 73,28 tahun.

Tabel 1.5 Unit Puskesmas di Kabupaten/Kota SWP Kediri Jawa Timur Tahun 2015

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Kota Kediri	9
2.	Kab. Kediri	37
3.	Kab. Tulungagung	31
4.	Kab. Nganjuk	20
5.	Kab. Trenggalek	22

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Dari tabel 1.5 dapat dilihat bahwa unit puskesmas termasuk dalam sarana infrastruktur sebagai pertimbangan dalam penentuan pusat pertumbuhan karena dapat membantu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Semakin banyak sarana infrastruktur, akan membantu dan menunjang meningkatkan sumber daya manusia. Jumlah unit puskesmas paling banyak terdapat di Kab. Kediri sedangkan jumlah unit puskesmas paling sedikit terdapat di Kota Kediri.

Pemusatan perkembangan memang perlu dilakukan agar perkembangan dan pertumbuhan yang diinginkan lebih terkoordinir antar wilayah dan saling mendukung antar wilayah di sekitarnya. Berikut beberapa pengaruh akan adanya pemusatan pertumbuhan, antara lain (Khosim, 2006: 104):

1. Pusat pertumbuhan sebagai pengaruh terhadap sumber daya, sebagai berikut:
 - a. Daerah pusat pertumbuhan akan menjadi pusat sumber daya alam dan sumber daya manusia
 - b. Terjadinya optimalisasi dalam mengeksploitasi sumber daya yang ada pada daerah pusat pertumbuhan
 - c. Daerah pusat pertumbuhan akan mengkoordinasikan sumber daya yang tersebar di daerah sekitarnya.
 - d. Daerah pusat pertumbuhan menjadi inti pengembangan sumber daya yang ada di daerah sekitarnya.
2. Pusat pertumbuhan sebagai pengaruh terhadap perkembangan ekonomi, sebagai berikut:
 - a. Daerah pusat pertumbuhan sebagai pengaruh akan perkembangan ekonomi di daerah sekitarnya.
 - b. Peningkatan pendapatan per kapita penduduk di daerah sekitar sebagai akibat adanya pusat pertumbuhan.

- c. Munculnya berbagai fasilitas ekonomi, seperti pabrik, bank, bursa saham, dan gudang.
 - d. Terciptanya berbagai lapangan pekerjaan sebagai akibat adanya pusat pertumbuhan.
3. Pusat pertumbuhan sebagai pengaruh terhadap perubahan sosial budaya masyarakat, antara lain :
- a. Terjadinya akulturasi dan asimilasi berbagai budaya dalam masyarakat.
 - b. Terjadinya pergeseran nilai masyarakat dari paguyuban (motif kekeluargaan) menjadi patembayan (motif ekonomi).
 - c. Menyebabkan pertumbuhan penduduk meningkat secara pesat.

1.1 Rumusan Masalah

Penentuan pusat pertumbuhan adalah salah satu cara untuk menstimulus perkembangan dan pembangunan wilayah, sehingga diharapkan dapat tercipta pemerataan dalam pembangunan. Pusat pertumbuhan dijadikan sebagai strategi untuk solusi karena memiliki sifat konsentrasi dan desentralisasi. Pengembangan wilayah sendiri akan merangsang pertumbuhan wilayah lain. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana potensi sektor ekonomi wilayah pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur ?
2. Seberapa besar nilai keunggulan kompetitif suatu wilayah pada masing-masing kabupaten/kota di Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur ?
3. Bagaimana klasifikasi wilayah pada masing-masing Kabupaten di Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur ?
4. Seberapa besar kekuatan sentralitas atas keberadaan sarana infrastruktur yang tersedia pada kabupaten/kota di Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur ?
5. Bagaimana kekuatan interaksi ekonomi diantara kelima kabupaten/kota tersebut ?

1.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi potensi sektor ekonomi pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur.
2. Mengidentifikasi keunggulan kompetitif wilayah pada kabupaten/kota di Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur.
3. Mengklasifikasikan wilayah pada masing-masing Kabupaten di Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur.
4. Mengidentifikasi kekuatan sentralitas atas ketersediaan sarana infrastruktur sebagai penunjang pusat pertumbuhan di Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur.
5. Mengidentifikasi wilayah yang memiliki kekuatan interaksi sehingga berpotensi sebagai lokasi pusat pengembangan di Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur.

1.3 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian dapat memberikan pertimbangan kepada pihak pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan, tentang pusat pertumbuhan khususnya untuk Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada instansi terutama universitas khususnya jurusan ilmu ekonomi dalam hal studi pemusatan pertumbuhan.
3. Bagi mahasiswa, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah kajian mengenai pusat pertumbuhan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pusat Pertumbuhan

Menurut Sjafrizal (2008: 126-128) seperti yang diungkapkan oleh Francois Perroux bahwa pertumbuhan ekonomi terkonsentrasi pada daerah yang memiliki keuntungan aglomerasi akibat dari konsentrasi pada daerah tersebut. Konsentrasi industri akan memberikan kontribusi dorongan pada pertumbuhan ekonomi nasional yang selanjutnya berkembang menjadi konsep pusat pertumbuhan. Terdapat empat karakteristik lokasi untuk menjadi sebuah pusat pertumbuhan, yakni: (a) adanya kelompok kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi pada lokasi tertentu; (b) adanya konsentrasi kegiatan ekonomi yang mampu menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi; (c) adanya keterkaitan input-output yang kuat antar sesama kegiatan ekonomi pada pusat; dan (d) adanya industri induk pada kelompok kegiatan ekonomi yang akan mendorong pengembangan kegiatan ekonomi pusat.

Pusat pertumbuhan dapat didefinisikan atas dua macam, yakni secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi usaha yang memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi perkembangan ekonomi baik ke dalam maupun keluar (wilayah belakang). Sedangkan secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang memiliki banyak fasilitas ekonomi dan kemudahan sehingga memiliki daya tarik dan mampu menjadi pusat pertumbuhan yang menciptakan berbagai macam usaha memiliki ketertarikan untuk berlokasi pada lokasi tersebut, meskipun terdapat kemungkinan tidak adanya interaksi antara usaha-usaha tersebut. Tidak semua kota generatif dapat dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan karena untuk menjadi pusat pertumbuhan kota harus memiliki empat ciri-ciri, yakni adanya hubungan intern antara berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi, adanya *multiplier effect* (unsur pengganda), adanya

konsentrasi geografis, dan memiliki kemampuan mendorong pertumbuhan wilayah belakangnya (Tarigan, 2014: 162-163).

2.1.2 Teori Tempat Sentral

Menurut Adisasmita (2005: 55) seperti yang diungkapkan oleh Christaller bahwa sebagai tempat sentral, pusat-pusat yang lebih tinggi ordenya akan melayani pusat-pusat yang memiliki orde lebih rendah. Respon nodal menunjukkan bahwa pertumbuhan kegiatan yang terjadi pada suatu pusat adalah untuk melayani penduduk di daerah belakang (*hinterland*). Apabila pertumbuhan terjadi di daerah belakang seperti pada bidang pertanian, maka dengan pola suplai hasil-hasil produksinya akan mendorong pertumbuhan di pusat kota. Proses seperti pola tersebut berlangsung melalui *multiplier* intra regional dan mungkin akan memberikan dampak perubahan struktural pada pusat. Gejala tersebut memperkuat terjadinya keuntungan–keuntungan aglomerasi. Dengan hal tersebut maka pendirian industri–industri baru akan meningkat, demikian pula kegiatan industri substitusi barang impor, produksi perantara, dan lapangan kerja. Pada keadaan tersebut stimulasi pertumbuhan daerah perkotaan tidak berasal dari daerah belakang.

Fungsi-fungsi pokok pusat perkotaan ialah berorientasi pada permintaan penduduk daerah belakang. Selain itu teori tempat sentral memiliki tiga konsep fundamental yakni konsep ambang (*threshold*), lingkup (*range*), dan hirarki (*hierarchy*). Proses penyebaran terjadi berdasarkan pola ambang (jumlah penduduk) dan pola lingkup (sistem lokasi). Kedua faktor tersebut menentukan hirarki tempat sentral. Ketiga konsep tersebut merupakan unsur-unsur susunan spasial yang penting dan dapat digunakan dalam menjelaskan hubungan-hubungan formal permintaan dan wilayah-wilayah perdagangan atau wilayah-wilayah pelayanan (Adisasmita, 2005: 57).

2.1.3 Teori Kutub Pertumbuhan

Menurut Gunawan (2007: 141) seperti yang dikembangkan oleh Perroux bahwa pada faktanya, perkembangan yang terjadi bukanlah merupakan suatu proses yang terjadi secara sentral, akan tetapi akibat dari kecepatan dan intensitas

yang berbeda pada tempat atau kawasan tertentu. Tempat atau kawasan yang menjadi pusat pembangunan disebut juga pusat atau kutub pertumbuhan. Dari kutub-kutub tersebut maka proses pembangunan akan menyebar ke wilayah-wilayah di sekitarnya. Adanya pusat-pusat pertumbuhan memengaruhi kehidupan manusia, terutama dari segi peningkatan kesejahteraan.

Penekanan pada aspek pemusatan pertumbuhan yakni mengenai proses pertumbuhan adalah konsisten dengan tata ruang ekonomi (*economic space theory*), dimana industri pendorong (*propulsive industries* atau *industries motrice*) sebagai titik awal dan menjadi elemen esensial guna sebagai pembangunan selanjutnya. Berikut tiga ciri dasar yang dimiliki sebagai industri pendorong, diantaranya (Adisasmita, 2005: 61):

- a. Memiliki kapasitas yang relatif besar dan berpengaruh kuat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
- b. Industri pendorong merupakan sektor yang berkembang dengan cepat.
- c. Memiliki hubungan yang erat terhadap sektor-sektor lain sehingga besar pengaruh yang ditimbulkan dapat diterapkan pada unit-unit ekonomi lainnya.

2.1.4 Teori Sektor

Adisasmita (2005: 31) mengemukakan bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan diikuti dengan penurunan proporsi sumber daya yang digunakan dalam sektor pertanian (sektor primer) dan kenaikan dalam sektor industri manufaktur (sektor sekunder) dan kemudian dalam industri jasa (sektor tersier). Anggapan ini dikembangkan atas dasar hipotesis Clark Fisher. Selain itu laju pertumbuhan pada suatu sektor akan menjadi faktor utama dalam perkembangan suatu wilayah.

Terjadinya perubahan atau pergeseran sektor ke sektor yang lain serta peninjauan dan perubahan spesialisasi (pembagian kerja) dianggap sebagai sumber pergerakan pertumbuhan pada suatu wilayah. Perluasan teori sektor adalah teori tahapan (*stages theory*), yang menjelaskan bahwa perkembangan wilayah merupakan proses perkembangan internal dengan tahapan-tahapan sebagai berikut (Adisasmita, 2005: 32):

- a. Perekonomian subsistem swasembada dengan sedikit investasi atau perdagangan dan sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian.
- b. Kemajuan transportasi akan membantu dan mendorong perdagangan serta pembagian kerja. Industri pedesaan masih bersifat sederhana (tradisional) untuk memenuhi kebutuhan para petani.
- c. Peningkatan kemajuan perdagangan antar wilayah, akan memprioritaskan pada pengembangan sub sektor tanaman pangan, dan diikuti oleh sub-sub sektor peternakan dan perikanan.
- d. Selanjutnya industri sekunder berkembang dengan pengolahan produk primer, dilanjutkan dengan perluasan dengan kemajuan dan peningkatan spesialisasi (pembagian kerja)
- e. Pengembangan industri tersier (jasa) yang melayani permintaan dalam wilayah maupun di luar wilayah.

2.1.5 Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran perkembangan perekonomian suatu wilayah pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang diukur secara kuantitatif (Sukirno, 2006: 9). Menurut Tarigan (2014: 46) bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah merupakan kenaikan pendapatan masyarakat secara menyeluruh yang terjadi di wilayah tertentu, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi.

Pertumbuhan ekonomi wilayah merupakan kenaikan volume variabel ekonomi dari suatu sub sistem spasial suatu bangsa atau negara. Terdapat beberapa variabel sebagai indikator atau tolak ukur pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai suatu peningkatan kemakmuran dalam suatu wilayah. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan output suatu wilayah baik secara kapasitas produksi ataupun volume riil produksi. Pertumbuhan ekonomi juga dinyatakan sebagai peningkatan dalam sejumlah komoditas yang dapat digunakan atau diperoleh di suatu wilayah (Adisasmita, 2005).

Sjafrizal (2008: 95-96) mengatakan bahwa pertumbuhan wilayah tergantung pada tiga faktor, yaitu: tenaga kerja, ketersediaan modal dan kemajuan teknologi.

Selain faktor tersebut, juga ditekankan pada pentingnya perpindahan (mobilitas) faktor produksi, terutama tenaga kerja dan modal antar wilayah maupun antar negara. Pola pergerakan diharapkan terciptanya keseimbangan pertumbuhan yang terjadi pada antar wilayah.

2.1.6 Teori Pembangunan Ekonomi

Membahas tentang faktor penentu pembangunan, perkembangan penduduk dapat menjadi pendorong pembangunan ekonomi seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith. Karena dengan adanya kenaikan penduduk maka akan memiliki kesempatan untuk memperluas pasar yang berpotensi meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian. Peningkatan spesialisasi dan pembagian kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi akibat dorongan dari produktivitas kerja dan mendorong perkembangan teknologi. Akan tetapi terdapat pandangan lain mengenai perkembangan penduduk seperti yang diungkapkan oleh Ricardo dan Malthus, perkembangan penduduk yang semakin tinggi maka akan menurunkan tingkat pembangunan kembali pada taraf yang lebih rendah (Sukirno, 2006: 245).

Sukirno (2006: 250) mengatakan seperti yang telah diungkapkan oleh Schumpeter bahwa pembangunan ekonomi diciptakan oleh inisiatif dan inovatif dari golongan pengusaha (*entrepreneur*), yakni golongan masyarakat yang mengorganisasi dan menggabungkan faktor-faktor produksi untuk menciptakan barang-barang sesuai dengan permintaan masyarakat.

Pembangunan ekonomi bukan hanya dikontribusi dan ditunjang oleh pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi belum tentu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh adanya faktor tingkat pertumbuhan penduduk, dimana apabila pertumbuhan ekonomi selalu rendah dan tidak melebihi tingkat pertumbuhan penduduk, maka pendapatan masyarakat (pendapatan perkapita) akan mengalami penurunan. Apabila pertumbuhan ekonomi sama dengan pertumbuhan penduduk, maka perekonomian negara mengalami keadaan yang stagnan dan tidak mengalami perkembangan dan tingkat kemakmuran masyarakat juga tidak meningkat. Jadi salah satu syarat

pembangunan ekonomi adalah : Tingkat (persentase) pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dari tingkat pertumbuhan penduduk. Semakin besar perbedaan, maka semakin besar pula tingkat pembangunan ekonomi yang dicapai. Selain pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita juga merupakan ukuran dalam pembangunan ekonomi yang menggambarkan tingkat kemakmuran diberbagai wilayah karena semakin tinggi pendapatan, maka daya beli penduduk juga seakin meningkat dan berimbas pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2006: 11-12).

2.1.7 Teori Basis Ekonomi

Didasarkan dari teori yang diungkapkan oleh Tiebout, Tarigan (2014: 55) mengatakan bahwa teori basis ekonomi membagi kegiatan produksi/jenis pekerjaan atas suatu wilayah menjadi dua, yakni pekerjaan basis (dasar) dan pekerjaan *service* (pelayanan) atau sektor nonbasis. Kegiatan basis merupakan kegiatan yang tidak terikat dengan kondisi internal perekonomian wilayah terkait (*exogenous*) dan juga berkontribusi dalam mendorong terciptanya jenis pekerjaan lainnya. Sedangkan pekerjaan *service* (nonbasis) merupakan kegiatan untuk memenuhi permintaan atas kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri, oleh karena itu pertumbuhan sektor ini bergantung pada kondisi umum perekonomian wilayah tersebut (*endogenous*).

Teori basis ekspor pada mulanya hanya memasukkan ekspor murni ke dalam pengertian ekspor. Tetapi, kini istilah ekspor menjadi lebih luas bahwa ekspor bukan hanya mengenai barang/jasa yang dijual ke luar daerah tetapi termasuk juga barang/jasa yang dibeli oleh orang dari luar daerah walaupun transaksi terjadi di daerah tersebut seperti halnya sektor pariwisata yang mendatangkan wisatawan dari luar daerah. Teori basis ekspor memiliki asumsi pokok bahwa ekspor merupakan satu-satunya unsur eksogen (independen) dalam pengeluaran, yang berarti segala unsur pengeluaran lain merupakan dependen (terikat) terhadap pendapatan. Hal tersebut juga mengartikan bahwa peningkatan ekspor saja yang dapat mendorong meningkatnya pendapatan daerah, sedangkan sektor lainnya

hanya meningkat apabila pendapatan daerah secara keseluruhan meningkat dan ekspor tidak terikat di dalam siklus pendapatan daerah (Tarigan, 2014: 56).

Sjafrizal (2008: 89) mengatakan bahwa perekonomian suatu daerah dibagi menjadi dua sektor utama yakni sektor basis dan sektor non basis. Sektor basis merupakan setor yang menjadi tulang punggung perekonomian karena memiliki keuntungan kompetitif (*competitive advantage*) yang cukup tinggi. Sedangkan sektor non basis merupakan sektor-sektor dengan potensi yang kurang meskipun berfungsi sebagai penunjuang atas sektor basis.

Teori basis ekonomi (*economic base theory*) beranggapan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya tingkat ekspor oleh wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi terbagi atas dua kelompok yakni kegiatan basis dan kegiatan non basis. Kegiatan basis merupakan kegiatan yang mendorong akan pertumbuhan ekonomi wilayah. Pada pengertiannya, ekspor merupakan menjual produk/jasa ke luar wilayah baik ke wilayah lain dalam negeri ataupun ke luar negeri. Kegiatan ekspor merupakan kegiatan usaha produk ataupun jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah atau disebut juga kegiatan ekspor. Sedangkan sektor nonbasis merupakan kegiatan ekonomi yang dimaksudkan untuk memenuhi permintaan kebutuhan konsumsi lokal, dengan hal tersebut maka permintaan pada sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat setempat (Tarigan, 2014: 28).

Aktivitas perekonomian regional digolongkan atas dua sektor yakni aktivitas sektor basis dan nonbasis. Kegiatan basis adalah kegiatan yang dilakukan dengan orientasi ekspor ke luar wilayah perekonomian yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan yang memenuhi permintaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat pada wilayah yang bersangkutan. Aktivitas basis berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan suatu wilayah jadi setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis akan memberikan dampak efek pengganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian regional (Adisasmita, 2005: 28).

2.1.8 Model Gravitasi

Tarigan (2010: 147-148) menyatakan bahwa Model gravitasi merupakan model yang digunakan untuk menghitung banyaknya kendaraan/mobilitas antara satu tempat dengan tempat lain yang berada pada wilayah berbeda, anggapan ini didasarkan pada penelitian Carey dan Ravenstein pada abad 19 yang menunjukkan bahwa jumlah migrant oleh dua variable yakni jarak antar kota dan jumlah penduduk baik jumlah penduduk tempat asal ataupun jumlah penduduk kota yang didatangi. Model ini juga digunakan dalam melihat seberapa besar daya tarik atas potensi yang dimiliki oleh suatu lokasi serta merupakan alat yang sering digunakan dalam penentuan lokasi yang optimal untuk keberadaan fasilitas kepentingan umum.

Penggunaan jumlah penduduk pada variabel sebagai alat ukur bukanlah arbiter dikarenakan jumlah penduduk sangat berkaitan langsung dengan ukuran-ukuran lain seperti halnya, total pendapatan, lapangan kerja, jumlah/luas bangunan, dll). Penggunaan jarak sebagai variabel dikarenakan jarak mempengaruhi keinginan orang dalam melakukan mobilitas karena untuk menempuh jarak diperlukan juga tenaga dan biaya. Semakin jauh jarak yang diperlukan dalam melakukan mobilitas maka semakin rendah pula keinginan ataupun minat dalam bepergian/mobilitas. Selain itu pengaruh jarak sebagai salah satu variabel yang digunakan, minat orang dalam bermobilitas akan turun seiring dengan jauhnya jarak yang dibutuhkan, penurunan minat tersebut bukan lagi bersifat proportional melainkan bersifat eksponensial seiring dengan penambahan jarak (Tarigan, 2010: 149).

2.1.9 Infrastruktur

Infrastruktur cenderung berwujud pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengeiran, drainasi, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan sebagai kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur didefinisikan juga sebagai fasilitas ataupun struktur dasar, peralatan, instalasi

yang dibangun dan dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial ekonomi masyarakat. Infrastruktur dalam ilmu ekonomi merupakan wujud dari modal publik yang dibentuk atas investasi oleh pemerintah yang meliputi: jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan (Warsilan, 2015).

Warsilan (2015) membagi infrastruktur menjadi tiga bagian, yaitu: (1) Infrastruktur ekonomi merupakan pembangunan fisik guna mendukung kegiatan ekonomi: *public utilities* (tenaga listrik, telkom, air, sanitasi, gas, dll), pekerjaan umum atau *public work* (jalan, bendungan, kanal, irigasi, dan drainase, dan sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang, dsb). (2) Infrastruktur sosial merupakan infrastruktur yang mengarah pada pembangunan manusia dan lingkungannya seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan rekreasi. (3) Infrastruktur administrasi merupakan infrastruktur dalam bentuk penegakan hukum, kontrol administrasi, dan koordinasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berbagai studi empiris telah dilakukan para peneliti terdahulu tentang penentuan pusat pertumbuhan yang dijadikan landasan berpikir penelitian ini. Pada Tabel 2.1 dapat dilihat tabel tentang lima penelitian terdahulu sebagai landasan berpikir pada penelitian ini. Dari kelima penelitian terdahulu tersebut terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan dibandingkan dengan penelitian ini yakni selain waktu dan lokasi penelitian, perbedaan yang lain yakni berkaitan dengan metode analisis yang digunakan yang antara lain analisis *differential shift (shift share)* yang bertujuan untuk memberi pertimbangan keuntungan lokasional yang dimiliki oleh suatu wilayah yang akan ditentukan sebagai daerah pusat pertumbuhan, dan analisis tipologi kelas guna untuk meninjau klasifikasi wilayah berdasarkan dua indikator yakni pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita wilayah yang diharapkan pada wilayah dengan klasifikasi tertinggi dapat memberikan stimulus pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bagi kabupaten/kota pada Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Kediri Jawa Timur.

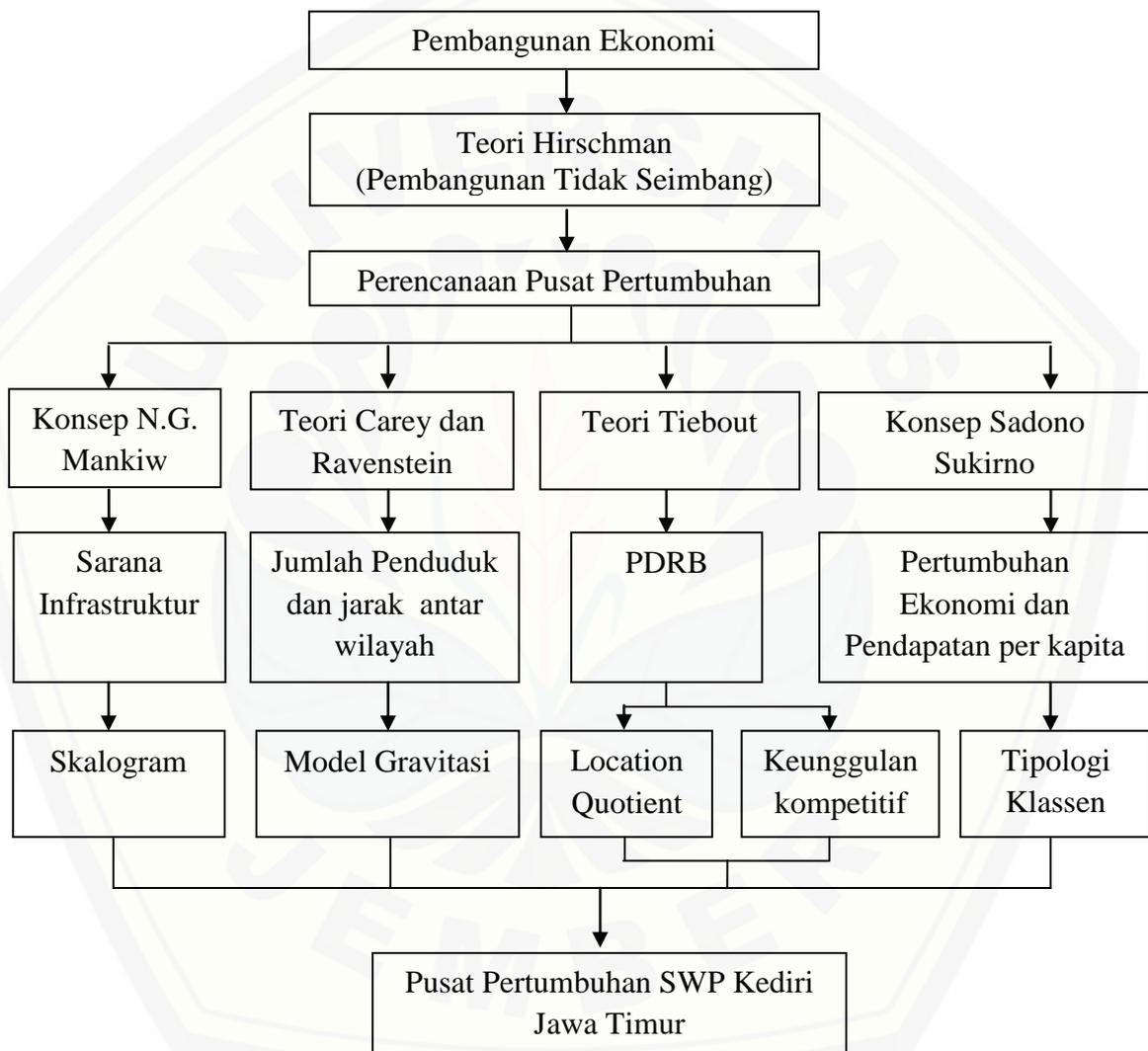
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Kajian
1.	Djuwendah, E. (2009)	Pengarahannya Pusat Pertumbuhan melalui Analisis Keunggulan Komparatif di Kabupaten Garut	1. Location Quotient 2. Analisis Hirarki Pusat Pertumbuhan	Komoditas unggulan pertanian menunjukkan kecenderungan terlokalisasi di beberapa kecamatan. Sebanyak 31 kecamatan terlokalisasi dan 11 kecamatan tidak mengkhususkan komoditas. Kecamatan Garut dan Karang pawitan merupakan titik pertumbuhan. Terdapat enam kecamatan sebagai pusat pelayanan utama, 13 kecamatan sebagai pusat pelayanan lokal dan 23 kecamatan menjadi pusat pelayanan terkecil.
2.	Andriyani, N. N. S. (2015)	Analisis Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Karangasem	1. Tipologi Klassen 2. Location Quotient 3. Analisis Model Gravitasi	Kecamatan Manggis dan Kecamatan Karangasem ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan karena memiliki kriteria sebagai daerah maju dan cepat tumbuh, memiliki keterkaitan dengan kecamatan sekitarnya, dan memiliki sektor-sektor basis yang berpotensi ekspor.
3.	Muta'ali, L. (2003)	Studi Penentuan Desa-desanya Pusat Pertumbuhan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1. Teknik Pembobotan 2. Analisis Guttman 3. Skalogram dan sentralitas 4. Location Quotient 5. Analisis statistik korelasi tata jenjang Spearman	Penelitian ini menetapkan 59 Desa Pusat Pertumbuhan Utama (DPP-U) dan 54 Desa Pusat Pertumbuhan Alternatif (DPP-A). Penetapan didasarkan asumsi satu kecamatan satu DPP-U dan didukung oleh satu DPP-A.
4.	Saputra, A. H. (2015)	Analisis Potensi Wilayah Sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan	1. Model Gravitasi 2. Analisis Skalogram	Menunjukkan bahwa Kecamatan Paringin sebagai pusat pertumbuhan. Kecamatan ini memiliki totalitas daya tarik paling tinggi sebesar 63,82 dan merupakan tujuan perpindahan penduduk dan pergerakan (mobilitas) arus uang, barang, dan jasa. Selain itu kecamatan ini merupakan kecamatan yang optimal ditetapkan sebagai pusat pelayanan.
5.	Saruhian, A. (tanpa tahun)	Identifikasi dan Analisis Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung	1. Analisis Skalogram 2. Analisis interaksi 3. Location Quotient	Penelitian ini menunjukkan sebanyak enam kecamatan yang mempunyai hirarki lebih tinggi sebagai pusat pertumbuhan, karena ketersediaan fasilitas yang bervariasi dan banyak jumlah. Masing-masing wilayah pusat pertumbuhan didukung oleh wilayah pengembangan dengan berbagai komoditas dominan yang dapat dikategorikan sebagai komoditas unggulan masing-masing kecamatan.

Sumber: Berbagai jurnal diolah

2.3 Kerangka Konseptual

Konsep pusat pertumbuhan dianggap mampu mencapai pertumbuhan dan pemerataan pada pembangunan ekonomi regional karena mengandung dua unsure penting yakni konsentrasi guna untuk keuntungan aglomerasi dan desentralisasi guna menyebarkan kegiatan ekonomi keseluruhan wilayah (Sjafrizal, 2008: 149).



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Pusat pertumbuhan wilayah pada Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Kediri dan sekitarnya Provinsi Jawa Timur akan dipilih menggunakan lima alat analisis yang sudah ditetapkan. Penentuan pusat pertumbuhan tersebut akan dilakukan dengan karakter wilayah yang antara lain :

1. Memiliki nilai terbesar pada basis wilayah dibandingkan wilayah yang lain;
2. Memiliki keuntungan lokasional wilayah yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah lain;
3. Kabupaten/kota termasuk pada klasifikasi daerah tertinggi dibandingkan wilayah yang lain;
4. Memiliki nilai indeks sentralitas terbesar atas ketersediaan fasilitas pelayanan dibandingkan dengan wilayah yang lain; dan
5. Memiliki total nilai interaksi terbesar antar kabupaten/kota pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur.

Dari kelima karakter dengan perhitungan masing-masing alat analisis, maka wilayah pusat pertumbuhan akan dipilih dan ditentukan dengan kabupaten/kota yang memiliki jumlah terbanyak peringkat tertinggi dari kelima ciri-ciri atau karakter wilayah tersebut.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan yakni bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran agar dapat memahami karakteristik obyek penelitian dari berbagai aspek secara *numeric* (kuantitatif).

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan akan suatu peristiwa. Jadi penelitian ini dapat dikatakan akan memiliki temuan-temuan yang lebih luas dan rinci karena tidak hanya tentang masalah tersebut tetapi juga faktor-faktor dan variabel lain yang berhubungan dengan masalah tersebut (Gulo, 2000: 19).

Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan penelitian/riset yang dilandasi pada perbaikan akan kelemahan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Pendekatan kuantitatif memiliki ciri yakni lebih condong pada pengumpulan dan analisis dengan data kuantitatif (*numeric*); menggunakan strategi survei dan eksperimen, mengadakan pengukuran dan observasi, dan melaksanakan pengujian teori dengan uji statistik (Zulfikar, 2014: 40).

3.2 Unit Analisis

Unit analisis penelitian ini adalah populasi wilayah pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri dan sekitarnya yaitu terdiri dari Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung, dengan periode data tahun 2011-2015.

3.3 Data dan Prosedur Pengumpulan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur, BPS Kota Kediri, BPS Kab. Kediri, BPS Kab. Nganjuk, BPS Kab. Trenggalek, dan BPS Kab. Tulungagung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maupun instansi terkait yang menyediakan data untuk penelitian ini. Beberapa data lainnya adalah jumlah

fasilitas ekonomi dan sosial, jumlah penduduk, PDRB pada tiap kabupaten, pendapatan perkapita kabupaten, dan jarak antar kabupaten/kota.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Analisis *Location Quotient*

Analisis LQ dapat juga digunakan untuk mengetahui apakah sektor-sektor ekonomi tersebut termasuk kegiatan basis atau bukan basis sehingga dapat melihat sektor-sektor yang termasuk ke dalam kategori sektor unggulan. Perhitungan LQ digunakan untuk menunjukkan perbandingan antar peranan sektor tingkat regional dengan peran sektor tingkat wilayah yang lebih luas. Tidak meratanya penyebaran ekonomi yang pada umumnya hanya terkonsentrasi pada beberapa daerah saja memberikan indikasi bahwa produk ekonomi wilayah merupakan komoditi ekspor. Berdasarkan konsep basis ekonomi dengan analisis LQ, pendapatan dari sektor basis akan memberikan dampak positif yang luas dalam pertumbuhan perekonomian wilayah. Location quotient (kuosien lokasi) adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor/industri tersebut secara nasional. Ada banyak variabel yang bisa diperbandingkan, tetapi yang umum adalah nilai tambah (tingkat pendapatan) dan jumlah lapangan kerja. Asumsi yang digunakan dalam analisis LQ adalah : (1) kondisi geografis relatif seragam, (2) pola aktivitas bersifat seragam, (3) setiap aktivitas menghasilkan produk yang seragam. Berikut digunakan adalah nilai tambah (tingkat pendapatan). Rumusnya sebagai berikut (Tarigan, 2014: 82-83).

$$LQ = \frac{S_i/S}{N_i/N}$$

Dimana:

LQ = Besarnya kuosien lokasi suatu sektor ekonomi

S_i = PDRB sektor i di Kabupaten/Kota

S = Total PDRB di Kabupaten/Kota

N_i = PDRB sektor i secara Provinsi Jawa Timur

N = Total PDRB di Provinsi Jawa Timur

Interpretasi hasil analisis LQ adalah sebagai berikut :

- a. Apabila $LQ > 1$, menunjukkan peranan sektor tersebut di daerah itu lebih menonjol daripada peranan sektor secara nasional dan sektor *i*/komoditas tersebut merupakan sektor potensial/unggulan di kabupaten tersebut, artinya sektor tersebut mempunyai peran ekspor di wilayah
- b. Apabila $LQ = 1$, menunjukkan peranan sektor tersebut di kabupaten setara dengan peranan sektor tersebut di Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- c. Apabila nilai $LQ < 1$, menunjukkan bahwa peranan sektor di daerah tersebut lebih kecil daripada peranan sektor tersebut secara nasional dan sektor *i* /komoditas tersebut bukan merupakan sektor potensial di kabupaten tersebut, artinya sektor tersebut tidak mempunyai peran sektor ekspor di wilayah dan justru akan mendatangkan impor dari wilayah lain.

Analisis *Location Quotient* dapat berperan dalam pemilihan kabupaten/kota sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan. Analisis ini dilakukan guna untuk mengetahui nilai basis suatu wilayah atas kemampuan output yang dihasilkan oleh sektor-sektor wilayah tersebut.

3.4.2 Analisis *Shift Share (differential shift)*

Pertambahan produk/output regional total (ΔY_r) terdiri atas dua komponen yakni komponen *shift* dan komponen *share*. Komponen *share* disebut juga komponen *national share*. Komponen *national share* (N) merupakan banyaknya pertambahan produk regional ketika proporsi perubahannya sama dengan laju pertumbuhan nasional selama periode penelitian. Hal ini dapat digunakan sebagai kriteria lanjutan bagi daerah yang bersangkutan untuk mengukur apakah daerah tersebut tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dari pertumbuhan nasional rata-rata (Tarigan, 2014: 86).

Komponen *shift* merupakan penyimpangan dari *national share* dalam pertumbuhan produk regional. Penyimpangan ini positif di daerah-daerah yang tumbuh lebih cepat dan negatif di daerah-daerah yang tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan produk secara nasional. Menurut Tarigan

(2014: 86-87) *shift netto* dapat dibagi menjadi dua komponen, yaitu *proportional shift component (P)* dan *differential shift component (D)*.

Proportional Shift Component (P) disebut juga komponen struktural atau *industrial mix* yang mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan komposisi sektor-sektor industri di daerah yang bersangkutan. Komponen tersebut positif di daerah-daerah yang berspesialisasi pada sektor-sektor yang secara nasional tumbuh cepat dan negatif di daerah-daerah yang berspesialisasi pada sektor-sektor yang secara nasional tumbuh lambat. Sedangkan *Differential Shift Component (D)* disebut juga komponen lokasional atau regional dari sisa atau kelebihan. Komponen tersebut mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan oleh sektor-sektor industri tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di daerah yang bersangkutan dibandingkan tingkat nasional yang disebabkan oleh faktor-faktor lokasional intern. Jadi suatu daerah yang mempunyai keuntungan lokasional seperti sumber daya yang melimpah/efisien, akan mempunyai *differential shift component* yang positif, sedangkan daerah yang secara lokasional tidak menguntungkan akan mempunyai komponen yang negatif.

Kedua komponen *shift* tersebut memisahkan unsur-unsur pertumbuhan regional yang bersifat ekstern dan bersifat intern. *Proportional shift* adalah akibat dari pengaruh unsur-unsur luar yang bekerja secara nasional, sedangkan *differential shift* adalah akibat dari pengaruh faktor-faktor yang bekerja secara khusus di daerah yang bersangkutan. Menurut Tarigan (2014: 87-88) pertumbuhan produk regional sektor *i* dapat diperinci atas pengaruh dari *National share*, *Proportional share*, dan *Differential shift*. Dalam notasi aljabar hal ini adalah.

$$\Delta Y_{r,i,t} = (N_{s_i} + P_{r,i} + D_{r,i}) \dots\dots\dots (3.1)$$

Dimana,

- $\Delta Y_{r,i,t}$: Perubahan PDRB sektor /subsektor *i* di wilayah kabupaten
- N_{s_i} : Perubahan PDRB sektor/subsektor *i* di wilayah kabupaten yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan ekonomi tingkat Propinsi
- $P_{r,i}$: Perubahan PDRB sektor/subsektor *i* di wilayah kabupaten yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan sektor *i* tingkat propinsi

$D_{r,i}$: Perubahan PDRB sektor/subsektor i di wilayah kabupaten yang disebabkan oleh keunggulan kompetitif sektor i tersebut di wilayah kabupaten

Peranan *National share* (N_{si}) terjadi apabila pertambahan produk regional sektor i sama dengan proporsi pertambahan produk nasional secara rata-rata. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut.

$$N_{s,i,t} = Y_{r,i,t-n} (Y_{N,t} / Y_{N,t-n}) - Y_{r,i,t-n} \dots\dots\dots (3.2)$$

Dimana:

- $Y_{r,i,t-n}$: PDRB sektor/subsektor i di wilayah kabupaten tahun awal analisis
- $Y_{N,t}$: PDRB total di Provinsi Jawa Timur tahun akhir analisis
- $Y_{N,t-n}$: PDRB total di Provinsi Jawa Timur tahun awal analisis

Proportional shift ($P_{r,i}$) merupakan pengaruh sektor i secara nasional terhadap pertumbuhan produk sektor i pada region yang dianalisis. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut.

$$P_{r,i,t} = \{ (Y_{N,i,t} / Y_{N,i,t-n}) - (Y_{N,t} / Y_{N,t-n}) \} \times Y_{r,i,t-n} \dots\dots\dots (3.3)$$

Dimana:

- $Y_{N,i,t}$: PDRB sektor/subsektor i di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun akhir analisis
- $Y_{N,i,t-n}$: PDRB sektor/subsektor i di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun awal analisis

Differential shift ($D_{r,i}$) menggambarkan penyimpangan antara pertumbuhan sektor i di wilayah analisis terhadap pertumbuhan sektor i secara nasional. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut

$$D_{r,i,t} = \{ Y_{r,i,t} - (Y_{N,i,t} / Y_{N,i,t-n}) Y_{r,i,t-n} \} \dots\dots\dots (3.4)$$

$$D_{r,i,t} = \left[\frac{\Delta Y_{r,i,t}}{Y_{r,i,t-n}} - \frac{\Delta Y_{N,i,t}}{Y_{N,i,t-n}} \right] \times Y_{r,i,t-n} \dots\dots\dots (3.5)$$

Dimana:

$Y_{r,i,t}$: PDRB sektor/subsektor i di wilayah kabupaten/kota tahun akhir analisis

Dari persamaan *shift share* juga menunjukkan bahwa adanya peningkatan nilai tambah suatu sektor di suatu wilayah dapat diuraikan (*decomposed*) menjadi 3 komponen berpengaruh, yaitu (Damara, 2015):

- a. *Regional Share* adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh faktor luar yaitu: peningkatan kegiatan ekonomi daerah akibat kebijaksanaan nasional atau provinsi yang berlaku pada seluruh daerah.
- b. *Proportional Shift* adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah yang baik, yaitu berspesialisasi pada sektor yang pertumbuhannya cepat secara nasional atau provinsi. Selain itu komponen pertumbuhan proporsional tumbuh karena perbedaan sektor dalam permintaan produk akhir, perbedaan dalam ketersediaan bahan mentah, perbedaan dalam kebijakan industri dan perbedaan dalam struktur, dan keragaman pasar. Disebut juga pengaruh bauran industri (*industry mix*).
- c. *Differential Shift* adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah karena kondisi spesifik daerah yang bersifat kompetitif. Unsur pertumbuhan ini merupakan keuntungan kompetitif daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor daerah. Disebut juga komponen pertumbuhan pangsa wilayah.

Berdasarkan persamaan *shift share* terdapat tiga komponen yang mempengaruhi terjadinya perubahan nilai tambah suatu sektor pada suatu wilayah, antara lain (Putra, 2015) :

- a. Komponen pertumbuhan provinsi (*regional share*) digunakan dalam melihat struktur atau posisi relatif suatu daerah yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh pada suatu daerah yang menaunginya. *Share Regional* adalah gambaran dari perubahan *output* daerah karena adanya perubahan secara umum.

- b. Pertumbuhan sektoral (*proportional shift*), digunakan dalam mengukur tingkat pertumbuhan produksi suatu wilayah apakah lebih cepat atau lebih lambat dari pada wilayah di atasnya karena adanya konsentrasi industri (sektor) regional. Dapat disebut juga bauran industri.
- c. Pertumbuhan daya saing wilayah (*different shift*), digunakan dalam mengukur tingkat daya saing suatu sektor dalam suatu wilayah dibandingkan dengan sektor yang sama pada wilayah lain.

3.4.3 Analisis Tipologi Klassen

Alat analisis *Klassen Typology* (Tipologi Klassen) digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Melalui analisis ini diperoleh empat karakteristik pola dan struktur pertumbuhan ekonomi yang berbeda, yaitu: daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh (*high growth and high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but high income*), dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) (Aswandi, 2002).

Metode Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui pengelompokan daerah menurut struktur pertumbuhannya. Dengan menggunakan *Matrix Klassen* dapat dilakukan 4 pengelompokan daerah dengan menggunakan laju pertumbuhan dan pendapatan perkapita sebagai indikator. Namun demikian perlu dicatat bahwa pengelompokan ini adalah bersifat dinamis karena perubahan laju pertumbuhan dan pendapatan perkapita mudah terjadi pada perkembangan kegiatan pembangunan (Sjafrizal, 2008: 179).

Tabel 3.1 Karakteristik Pola Analisis Tipologi Klassen

PDRB per Kapita Laju Per tumbuhan	$Y_i > Y_n$	$Y_i < Y_n$
$r_i > r_n$	Kuadran I Pertumbuhan tinggi dan pendapatan tinggi (Daerah maju dan tumbuh cepat)	Kuadran III Pertumbuhan tinggi dan pendapatan rendah (Daerah berkembang cepat)
$r_i < r_n$	Kuadran II Pertumbuhan rendah dan Pendapatan tinggi (Daerah maju tetapi tertekan)	Kuadran IV Pendapatan rendah dan Pertumbuhan rendah (Daerah relatif tertinggal)

r_i : Laju pertumbuhan PDRB kabupaten i

r_n : Laju pertumbuhan nasional

Y_i : Pendapatan per kapita kabupaten i

Y_n : Pendapatan per kapita nasional

Sumber: Sjafrizal. 2008

Dengan menggunakan analisis tipologi klassen maka akan ditemukan kabupaten/kota mana yang cocok untuk ditentukan sebagai pusat pengembangan pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur. Hal itu dilakukan dengan menentukan wilayah mana yang termasuk pada daerah dengan klasifikasi tertinggi sesuai pada analisis tersebut.

3.4.4 Analisis Skalogram

Tingkat perkembangan wilayah dapat diukur dengan kondisi karakteristik potensi dan ketersediaan sumberdaya, kelembagaan, SDM (masyarakat dan aparatur pemerintahan), dan ketersediaan infrastruktur dasar wilayah serta sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung perkembangan aktivitas masyarakat (Ermawati, 2010).

Salah satu metode penentuan tingkat perkembangan wilayah, yaitu dengan menggunakan analisis hirarki wilayah (analisis skalogram) yang didasarkan pada ketersediaan sarana dan prasarana wilayah menurut jumlah dan jenis unitnya. Metode skalogram ini bisa digunakan dengan menuliskan jumlah fasilitas yang dimiliki oleh setiap wilayah, atau menuliskan ada/tidaknya fasilitas tersebut di suatu wilayah tanpa memperhatikan jumlah/kuantitasnya. Dalam metode skalogram, seluruh fasilitas umum yang dimiliki oleh setiap unit wilayah didata

dan disusun dalam satu tabel. Tujuan digunakannya analisis skalogram adalah untuk mengidentifikasi kabupaten kota yang dapat dikelompokkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan fasilitas perkotaan yang tersedia. Dalam analisis klasifikasi kota dikelompokkan berdasarkan pada tiga komponen fasilitas utama, yaitu (Riyadi, 2003: 97) :

- a. *Differentiation* adalah fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Fasilitas ini menunjukkan adanya struktur kegiatan ekonomi lingkungan yang kompleks dimana jumlah dan tipe fasilitas komersial akan menunjukkan derajat ekonomi kawasan/kota dan kemungkinan akan menarik sebagai tempat tinggal dan untuk bekerja.
- b. *Solidarity* adalah fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas sosial. Fasilitas tersebut menunjukkan tingkat kegiatan sosial dari kawasan/kota. Fasilitas tersebut dimungkinkan tidak seratus persen merupakan kegiatan sosial namun pengelompokan tersebut masih dimungkinkan jika fungsi sosialnya relatif lebih besar dibandingkan sebagai kegiatan usaha yang berorientasi pada keuntungan (*benefit oriented*).
- c. *Centrality* adalah fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi politik/pemerintahan. Fasilitas tersebut menunjukkan bagaimana hubungan masyarakat dalam sistem kota/komunitas. Sentralitas ini diukur melalui perkembangan hierarki dari institusi sipil, misalnya kantor pos, sekolah, kantor pemerintahan dan sejenisnya. Analisis skalogram yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode menuliskan ada atau tidaknya fasilitas (fasilitas sosial, ekonomi dan pemerintahan) di suatu wilayah, yaitu dengan mengisikan angka 1 bila fasilitas tersebut terdapat pada suatu wilayah dan mengisikan angka 0 bila fasilitas tersebut tidak terdapat di suatu wilayah.

Selanjutnya analisis skalogram dapat dikembangkan untuk menentukan indeks sentralitas terbobot. Indeks sentralitas ini tidak hanya berdasarkan jumlah fungsi atau fasilitas pelayanan yang ada pada suatu wilayah, tetapi juga berdasarkan frekuensi keberadaan fungsi atau fasilitas tersebut pada wilayah yang ditinjau. Dalam prakteknya di lapangan, hendaknya matriks fungsi dengan metode skalogram ini dilengkapi dengan data-data yang disusun melalui matriks fungsi

lainnya, dimana data-data yang disampaikan dihitung secara lebih detail, dengan menggunakan teknik pembobotan, pemberian ranking, dan sebagainya . Oleh karena itu, untuk mengetahui pusat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dalam penelitian ini menggunakan analisis skalogram dengan menggabungkan analisis indeks sentralitas dengan teknik pembobotan. Fungsi alat analisis indeks sentralitas ini sama dengan analisis skalogram, yaitu digunakan untuk mengetahui struktur/hirarki pusat pertumbuhan ekonomi yang ada dalam suatu wilayah dengan menghitung berapa jumlah fungsi yang ada, berapa jenis fungsi serta seberapa besar frekuensi keberadaan suatu fungsi dalam satu satuan wilayah.

Berikut cara/langkah-langkah dalam analisis skalogram dengan indeks sentralitas (Riyadi, 2003: 98-99):

- a. Kolom (1 dan 2) diisi dengan nomor urut untuk wilayah dan nama-nama kabupaten/kota yang ada di SWP Kediri.
- b. Kolom selanjutnya adalah kolom yang diisi dengan jenis fungsi (jenis fasilitas). Pengisian kolom jenis fungsi diisi dengan nilai 1 jika ada fasilitas tersebut di suatu wilayah atau 0 jika tidak ada fasilitas yang dimaksud di suatu wilayah.
- c. Kolom “Jumlah Jenis Fungsi/Fasilitas” diisi dengan menjumlahkan masing-masing fungsi yang ada pada setiap kabupaten (setiap baris).
- d. Pada baris “Total Fungsi” diisi dengan menjumlahkan jenis fungsi yang ada dari seluruh kabupaten (setiap kolom)
- e. Pada baris “Sentralitas Total”, pada setiap kolom/baris memiliki nilai yang sama, yaitu 100. Pada baris terakhir (nilai bobot), dihitung nilai bobot yang berdasarkan pada nilai total sentralitas dibagi dengan jumlah fungsi masing-masing kolom. Rumus Indeks sentralitas:

$$C = t / T \dots\dots\dots (3.6)$$

Dimana:

C = Bobot Fungsi

t = nilai sentralitas total, yaitu 100

T = Jumlah total fungsi

Indeks sentralitas ($IS = SC$), angka nilai bobot ini menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi keberadaan suatu fungsi, akan semakin kecil nilai bobotnya, sebaliknya semakin rendah frekuensi keberadaan suatu fungsi, semakin tinggi nilai bobotnya.

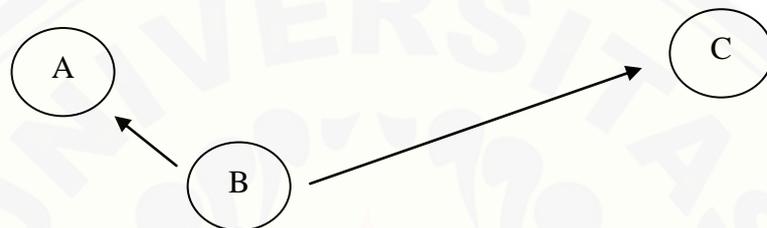
- f. Langkah selanjutnya adalah mengalikan nilai bobot fasilitas dengan nilai fungsi fasilitas setiap kabupaten (setiap kolom)
- g. Langkah selanjutnya adalah menjumlahkan seluruh nilai bobot dari berbagai jenis fungsi setiap kabupaten (berdasarkan baris/horizontal). Penjumlahan tersebut akan menghasilkan nilai indeks sentralitas.
- h. Dari nilai indeks sentralitas tersebut kemudian akan ditentukan hirarki pusat pertumbuhan ekonomi tingkat Kabupaten/Kota di SWP Kediri yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan kabupaten sebagai pusat pertumbuhan.

Analisis skalogram dan indeks sentralitas ini dapat menunjukkan bahwa wilayah yang merupakan hirarki tinggi adalah kabupaten yang memiliki jumlah jenis fungsi/fasilitas dan nilai indeks sentralitas yang tinggi atau kabupaten tersebut dapat dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sedangkan wilayah-wilayah yang merupakan hirarki paling rendah ditentukan oleh semakin sedikitnya jumlah jenis fungsi/fasilitas dan nilai indeks sentralitas yang rendah pula.

Melalui analisis skalogram dapat ditentukan kabupaten/kota yang cocok untuk dipilih sebagai wilayah pusat pengembangan. Dengan analisis ini wilayah pusat pengembangan dipilih melalui wilayah mana yang memiliki jumlah nilai indeks sentralitas terbesar dibandingkan dengan nilai indeks sentralitas kabupaten/kota lainnya, dimana dengan semakin tinggi nilai indeks sentralitas atas ketersediaan fasilitas pelayanan maka hal tersebut dapat menunjang suatu wilayah dan dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan pusat pertumbuhan demi tercapainya sinergitas antar lembaga yang saling menopang maupun dalam hal produktivitas sumber daya manusia yang semakin terjamin dengan kemudahan fasilitas pelayanan.

3.5.5 Analisis Model Gravitasi

Model Gravitasi digunakan untuk mengukur kekuatan interaksi antara dua wilayah atau lebih. Kekuatan interaksi antara dua wilayah yang berbeda dapat diukur dengan memperhatikan jumlah penduduk dan jarak antara kedua wilayah tersebut. Model gravitasi adalah model yang sering digunakan untuk melihat kaitan potensi suatu lokasi dan besarnya wilayah pengaruh dari potensi tersebut (Nisa, 2014).



Gambar 3.1 Ilustrasi Interaksi Antar Wilayah (Sumber: Nisa, 2014)

Gambar 3.1 menjelaskan bahwa misalnya ada dua kota (kota A dan kota B) yang berdekatan ingin diketahui berapa besarnya interaksi antara kedua kota tersebut. Interaksi bisa saja diukur dari banyaknya perjalanan (*trip*) dari penduduk kota A ke kota B atau sebaliknya. Interaksi tersebut ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu luas wilayah kedua kota tersebut. Sebuah daerah dapat diukur dari jumlah penduduk, banyaknya lapangan kerja, total pendapatan (nilai tambah), jumlah atau luas bangunan, banyaknya fasilitas kepentingan umum dan lain-lain. Kedua, faktor jarak antara kota A dan kota B. Jarak mempengaruhi keinginan orang untuk bepergian karena untuk menempuh jarak tersebut diperlukan waktu, tenaga dan biaya. Semakin jauh jarak yang memisahkan kedua lokasi, makin rendah keinginan orang untuk bepergian atau akan menghambat mobilitas barang. Guna mengukur kekuatan interaksi wilayah digunakan formula sebagai berikut (Nisa, 2014) :

$$I_{a,b} = k \cdot \frac{Pa \cdot Pb}{(Da \cdot b)^2}$$

Dimana:

$I_{a,b}$ = Kekuatan interaksi antar wilayah A dan B

k = Angka konstanta empiris nilainya 1

P_a = Jumlah penduduk kabupaten A

P_b = Jumlah penduduk kabupaten B

$D_{a,b}$ = Jarak kabupaten A dan kabupaten B

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa model gravitasi ini digunakan untuk mengetahui interaksi antar daerah. Sebenarnya tidak ada daerah yang bisa memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri melainkan saling membutuhkan dengan daerah lainnya sehingga terdapat interaksi ekonomi yang terjalin. Namun, yang membedakan adalah tingkat kekuatan interaksi tersebut. Kuatnya interaksi antara satu daerah tertentu dengan daerah lainnya dapat mendorong peningkatan penawaran dan permintaan antar kedua daerah tersebut (Nisa, 2014).

Tarigan (2014: 149) menyatakan bahwa penggunaan jumlah penduduk sebagai alat ukur bukanlah arbiter karena jumlah penduduk juga sangat terkait langsung dengan berbagai ukuran lain seperti lapangan kerja, total pendapatan, banyaknya fasilitas kepentingan umum, dll. Faktor kedua yang mempengaruhi interaksi itu adalah jarak antara kota A dan kota B. Jarak mempengaruhi keinginan orang untuk bepergian karena untuk menempuh jarak tersebut diperlukan waktu, tenaga, dan biaya. Semakin jauh jarak yang memisahkan kedua lokasi, semakin rendah keinginan orang untuk bepergian. Dalam hal jarak, minat orang bepergian menurun drastis apabila jarak itu semakin jauh, artinya penurunan minat itu tidak proporsional dengan penambahan jarak, melainkan eksponensial.

Sebagai pertimbangan lain untuk melengkapi analisis yang sebelumnya, pada penelitian ini menggunakan pertimbangan jarak dan kekuatan interaksi yang dilakukan oleh tiap kabupaten/kota yang ada pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur. Jadi untuk penentuan kabupaten/kota mana yang dipilih sebagai wilayah pusat pertumbuhan yakni kabupaten/kota yang memiliki total

nilai interaksi terbesar diantara ke lima kabupaten/kota yang ada pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur.

3.5 Definisi Operasional

Untuk menyamakan persepsi tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan menghindari terjadinya perbedaan penafsiran, maka dilakukan batasan definisi operasional sebagai berikut :

1. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

PDRB adalah nilai output atau produksi dari barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga konstan. PDRB penelitian ini menggunakan PDRB harga konstan tahun 2010 mulai tahun 2011-2015 di kabupaten/kota yang termasuk SWP Kediri dan PDRB Provinsi Jawa Timur sebagai pembanding dengan satuan dalam miliar rupiah.

2. Jumlah Penduduk

Penduduk adalah individu-individu atau anggota rumah tangga yang bertempat tinggal tetap di wilayah domestik daerah tersebut, dengan satuan operasional jumlah penduduk adalah jumlah jiwa.

3. Pusat Pertumbuhan

Pusat pertumbuhan diartikan sebagai wilayah yang memiliki keunggulan pada aspek tertentu sekaligus menjadi wilayah stimulus dalam pertumbuhan wilayah sekitarnya.

4. Sektor Basis dan Sektor Non Basis

Sektor basis merupakan sektor yang pertumbuhannya dapat menentukan pembangunan secara menyeluruh pada daerah tersebut, sedangkan sektor non basis adalah sektor sekunder dalam arti sektor tersebut tumbuh tergantung dari pembangunan yang menyeluruh dari wilayah tersebut.

5. Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif merupakan keunggulan yang dimiliki suatu wilayah melalui berbagai sektor yang mempunyai daya saing bila dibandingkan sektor yang sama di wilayah lain.

6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat semakin bertambah dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah laju pertumbuhan PDRB sejak tahun 2011-2015.

7. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah total pendapatan suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama dengan operasional total PDRB harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk.

8. Jarak

Jarak adalah ruang sela (panjang atau jauh) yang mengukur anantara dua tempat yang berbeda. Jarak yang digunakan antar kabupaten/kota di Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur. Satuan jarak yang dipakai adalah kilometer (Km).

9. Fasilitas Pelayanan

Fasilitas pelayanan adalah berbagai jenis fasilitas mulai dari fasilitas ekonomi (industri sedang, industri besar, bank, BPR, terminal, stasiun, pasar, SPBU, dan kantor pos) dan fasilitas sosial (sekolah, rumah sakit, hotel, masjid, langgar, gereja, pura, vihara, ponpes, puskesmas pembantu, dan pariwisata).

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kota Kediri merupakan daerah unggulan dengan kemampuan basis wilayah tertinggi dengan nilai basis sebesar 2,753.
2. Kabupaten Trenggalek merupakan daerah unggulan dari segi keunggulan kompetitif atas keuntungan lokasional wilayah tertinggi dengan nilai sebesar 70,139 miliar rupiah.
3. Kota Kediri menjadi daerah dengan klasifikasi tertinggi dibanding dengan kabupaten/kota lain pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur.
4. Kabupaten Nganjuk merupakan daerah unggulan dari segi nilai indeks sentralitas keberadaan sarana infrastruktur tertinggi dengan nilai sebesar 318.645.
5. Kabupaten Kediri merupakan daerah unggulan dari segi kekuatan interaksi antar wilayah tertinggi dengan nilai sebesar 25.851.825.728,91.

Berdasarkan dari lima kabupaten/kota pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur dengan keunggulan masing-masing wilayah maka ditentukan satu kabupaten/kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur. Berdasarkan kelima alat analisis yang digunakan, pusat pertumbuhan ekonomi Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur adalah Kota Kediri yang didukung dan unggul dari dua keunggulan yakni segi kemampuan basis (*Location Quotient*) dan klasifikasi wilayah tertinggi dibanding kabupaten/kota pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur (Tipologi Klassen).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka disarankan bahwa :

1. Kota Kediri memiliki potensi dengan keunggulan nilai basis wilayah yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, ditinjau dari hal tersebut maka disarankan penentuan lokasi pusat pertumbuhan dilokasikan di Kota Kediri. Karena dengan tingginya nilai basis yang dimiliki oleh Kota Kediri menandakan bahwa tingginya kapasitas produksi wilayah tersebut, dengan tingginya kapasitas produksi maka akan mendukung akan tingginya penyerapan tenaga kerja terlebih lagi ketika industri tersebut mendapat dukungan oleh pemerintah dari segi pengembangan produksi maka akan memberikan efek pengganda yang besar termasuk dari segi penyerapan tenaga kerja baik tenaga kerja dari Kota Kediri ataupun tenaga kerja dari wilayah sekitar.
2. Kabupaten Trenggalek memiliki potensi dengan keunggulan dari segi keunggulan kompetitif atas keuntungan lokasional dibanding dengan dengan kabupaten kota lainnya. Ditinjau dari segi tersebut maka penentuan lokasi pusat pertumbuhan dilokasikan di Kabupaten Trenggalek. Dengan tingginya pertumbuhan ekonomi yang didukung dari segi keuntungan lokasional sektor perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Trenggalek akan dapat memberikan stimulus bagi perkembangan wilayah sekitar melalui suplai perikanan dengan harga yang mampu bersaing dibanding dengan suplai dari wilayah lain. Jadi dengan hal tersebut maka diharapkan akan meningkatkan daya beli masyarakat baik masyarakat kabupaten Trenggalek ataupun masyarakat daerah sekitar.
3. Kota Kediri merupakan daerah yang memiliki potensi dengan keunggulan dari segi tingginya pendapatan perkapita dibandingkan dengan kabupaten kota disekitarnya. Ditinjau dari segi tersebut maka disarankan lokasi pusat pertumbuhan dilokasikan di Kota Kediri. Dengan tingginya pendapatan perkapita daerah kota Kediri melebihi kabupaten sekitar dan bahkan melebihi pendapatan perkapita provinsi Jawa Timur, maka diharapkan akan menjadi stimulus perkembangan dan pembangunan wilayah sekitar melalui tenaga

kerja yang terserap ataupun dari masyarakat yang mendapatkan pekerjaan di Kota Kediri yang memberikan efek pada peningkatan pendapatan para pelaju (*comuter*) bagi masyarakat daerah sekitar.

4. Kabupaten Nganjuk merupakan daerah yang memiliki potensi dengan keunggulan dari segi tingginya nilai indeks sentralitas atas keberadaan sarana infrastruktur tertinggi dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya. Ditinjau dari tingginya nilai indeks sentralitas atas keberadaan infrastruktur fasilitas pelayanan maka disarankan pusat pertumbuhan berlokasi di Kabupaten Nganjuk. Karena terkait dengan kemudahan pelayanan dan fasilitas yang ada pada suatu daerah maka akan mendukung berbagai kegiatan masyarakat pada wilayah tersebut termasuk kegiatan perekonomian dan segala perizinannya. Jadi semakin tinggi nilai indeks sentralitas suatu wilayah serta semakin banyak jumlah dan semakin kompleks fasilitas pelayanan yang tersedia maka kegiatan perekonomian juga akan semakin meningkat, dan hal tersebut akan berdampak pada pertumbuhan daerah sekitar baik dari segi permintaan tenaga kerja yang dapat menyerap masyarakat diluar wilayah, permintaan bahan baku, atau pun pendirian usaha oleh masyarakat yang berasal dari daerah sekitar.
5. Kabupaten Kediri merupakan daerah yang memiliki potensi dengan keunggulan dari segi tingginya nilai kekuatan interaksi antar wilayah dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya. Ditinjau dari tingginya nilai kekuatan interaksi maka disarankan penempatan pusat pertumbuhan berlokasi di Kabupaten Kediri. Karena terkait dengan pemerataan pembangunan diharapkan tidak terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah, dan hal itu dapat tercapai dengan kegiatan ekonomi yang dibawa oleh pelaju atau *comuter* karena semakin jauh jarak yang ditempuh maka pengorbanan yang dikeluarkan juga akan semakin banyak, bukan hanya tenaga akan tetapi waktu dan biaya.

Penelitian yang dilakukan memberikan saran pada penetapan pusat pertumbuhan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Kediri yang ditempatkan

pada Kota Kediri dengan dua keunggulan wilayah yakni tingginya kemampuan basis dan tingginya pendapatan per kapita daerah Kota Kediri. Jadi dengan penentuan Kota Kediri sebagai pusat pertumbuhan diharapkan dapat memberikan stimulus pertumbuhan wilayah daerah sekitar (*hinterland*) melalui peningkatan pendapatan masyarakat daerah (*comuter*) yang terserap oleh industri-industri pada daerah pusat pertumbuhan yakni Kota Kediri. Dengan melalui peningkatan pendapatan masyarakat maka akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat yang menjadi stimulus produsen untuk memproduksi barang lebih banyak yang selanjutnya akan memberikan dampak percepatan laju pertumbuhan ekonomi wilayah baik pada wilayah pusat pertumbuhan ataupun wilayah hinterland. Selain itu Kota Kediri juga disarankan sebagai lokasi aglomerasi industri guna mendukung industri unggulan Kota Kediri (daerah pusat pertumbuhan) dan mengingat luas Kota Kediri yang hanya 63,4 Km² maka aglomerasi industri dapat melebihi Kota Kediri selama jarak antar industri tergolong masih ideal guna mendukung tercapainya keuntungan aglomerasi industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswandi, H. dan K. Mudrajat. 2002. Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan : Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. 17(1), 27-45.
- Adisasmita, H. R. 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Edisi Pertama. Makassar: Graha Ilmu.
- Andriyani, N. N. S., dan M. S. Utama. 2015. Analisis Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal EP Unud*. 4(4). 220-229.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Kabupaten Kediri dalam Angka 2015*. Kediri: BPS Kabupaten Kediri.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kabupaten Kediri dalam Angka 2016*. Kediri: BPS Kabupaten Kediri.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Kota Kediri dalam Angka 2015*. Kediri: BPS Kota Kediri.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kota Kediri dalam Angka 2016*. Kediri: BPS Kota Kediri.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Kabupaten Nganjuk dalam Angka 2015*. Nganjuk: BPS Kabupaten Nganjuk.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kabupaten Nganjuk dalam Angka 2016*. Nganjuk: BPS Kabupaten Nganjuk.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Kabupaten Tulungagung dalam Angka 2015*. Tulungagung: BPS Kabupaten Tulungagung.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kabupaten Tulungagung dalam Angka 2016*. Tulungagung: BPS Kabupaten Tulungagung.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Kabupaten Trenggalek dalam Angka 2015*. Trenggalek: BPS Kabupaten Trenggalek.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kabupaten Trenggalek dalam Angka 2016*. Trenggalek: BPS Kabupaten Trenggalek.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Jawa Timur dalam Angka 2015*. Jawa Timur: BPS Jawa Timur.

- Badan Pusat Statistik. 2016. *Jawa Timur dalam Angka 2016*. Jawa Timur: BPS Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2010-2014*. Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2011-2015*. Jawa Timur.
- Bank Indonesia. (tanpa tahun). *Kajian Ekonomi Regional*. <http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/bali/Documents/dee001b345494b26971c3430b237dfd5Boks.pdf> [Diakses pada 25 Desember 2016].
- Budiharsono, S. 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Cahyadinata, I. 2008. Pemetaan Produk Andalan Sektor Pertanian di Kabupaten Mukomuko. *Jurnal Agrisepe*. 7(2): 69-81.
- Damara, A. C. 2015. Analisis Penentu Sektor Basis dan Daya Saing Sektor Pertanian Antar Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. *Skripsi*. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Djuwendah, E. 2009. Pengarahan Pusat Pertumbuhan melalui Analisis Keunggulan Komparatif di Kabupaten Garut. *Jurnal Agrikultura*. 20(3): 153-158.
- Ermawati. 2010. Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pada Tingkat Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Gubernur Jawa Timur. 2014. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014. http://jdih.jatimprov.go.id/?wpfb_dl=13695. [Diakses pada 26 Januari 2017].
- Gulo, W. 2000. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Gulo, Y. 2015. Identifikasi Pusat-pusat Pertumbuhan dan Wilayah Pendukungnya dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Nias. *Widyariset*. 18(1): 37-48.
- Gunawan, T. 2007. *Fakta dan Konsep Geografi*. Jakarta: Interplus.
- Kembauw, E. 2015. *Pembangunan Perekonomian Maluku*. Yogyakarta: Deepublish.

- Khairunnisa, A. 2015. Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. 13(6).
- Khosim, A. 2006. *Geografi*. Jakarta: Grasindo.
- Kuncoro, M, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Muta'ali, L. 2003. *Studi Penentuan Desa – Desa Pusat Pertumbuhan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Majalah Geografi Indonesia*. 17(1): 33-51.
- Nisa, H. 2014. Analisis Potensi dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten. *Skripsi*. Semarang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Novrilasari, D. 2008. Analisis Sektor Unggulan dalam Meningkatkan Perekonomian dan Pembangunan Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. repository.ipb.ac.id/bitstream/123456789/1698/4/A08dno.pdf [Diakses pada 26 Januari 2017].
- Oetama, J. 2001. *Pers Indonesia Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 2015. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015*. Jawa Timur: PPID.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2006. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 02 Tahun 2006. https://jawatimuran.files.wordpress.com/2012/05/perdano2_2006.pdf [Diakses pada 26 Januari 2017].
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2009. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2009. http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/P_JATIM%20_1_2009%20.pdf. [Diakses pada 26 Januari 2017].
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2012. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2012. http://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perprop_20.pdf. [Diakses pada 26 Januari 2017].
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2015. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015*. Surabaya: Pemerintah Jawa Timur.

- Pradana, D. 2016. Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Strategi Pengembangannya (Studi Kasus di Satuan Wilayah Pengembangan IV Jawa Timur). *Skripsi*. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Putra, N. A. 2015. Penentuan Pusat Pertumbuhan Ekonomi dalam Pengembangan Wilayah di Eks Karesidenan Besuki. *Skripsi*. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Riyadi dan D. S. Bratakusumah. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rustiadi, E. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Crestpent Press.
- Saputra, A. H. 2015. Analisis Potensi Wilayah Sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. *Skripsi* Solo: Program Studi Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Saruhian, A. (tanpa tahun). Identifikasi dan Analisis Pusat – Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung. *Tesis*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduouse Media.
- Sukirno, S. 2006. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suparmoko. 2007. *Ekonom 2*. Jakarta: Yudhistira.
- Tarigan, R. 2010. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Medan: PT Bumi Aksara.
- Tarigan, R. 2014. *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi*. Medan: PT Bumi Aksara.
- Warsilan. 2015. Peranan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasi pada Kebijakan Pembangunan di Kota Samarinda. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*. 31(2).
- Widjajanta, B. (tanpa tahun). *Ekonomi dan Akuntansi*. Jakarta: CV Citra Praya.
- Zulfikar. 2014. *Manajemen Riset dengan Pendekatan Komputasi Statistika*. Yogyakarta: Deepublish.

Lampiran A. Data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur Tahun 2011-2015

A.1 Data Produk Domestik Regional Bruto Kab. Nganjuk Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar rupiah)

Kategori	Uraian Sektor	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.233,50	4.397,20	4.433,50	4.538,50	4.694,50
B	Pertambangan dan Penggalian	251,4	260,7	270	283,3	296,1
C	Industri Pengolahan	1.582,80	1.650,90	1.745,50	1.836,10	1.940,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,6	7,1	7,3	7,5	7,6
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	14,9	15,2	15,7	16	16,9
F	Konstruksi	1.074,00	1.141,20	1.226,50	1.308,90	1.352,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil	1.994,30	2.212,90	2.457,00	2.655,90	2.850,80
H	Transportasi dan Pergudangan	158,8	170	183,7	198,6	213
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	203,2	216,4	233,9	250,5	271,1
J	Informasi dan Komunikasi	540,2	590,9	650,9	700,1	748
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	252,2	276,1	307,7	331,1	353,4
L	Real Estate	204,6	217,2	233,3	248,3	261,5
M,N	Jasa Perusahaan	40,4	42,2	44,8	47,6	50,4
O	Adm. Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	653,1	671,8	687,1	696,1	737,7
P	Jasa Pendidikan	419,5	442,7	476,5	504,3	537
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	66,6	72,4	78	87,3	88,9
R,S,T,U	Jasa Lainnya	365,3	382,4	404,8	432,6	456,4
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		12.061,20	12.767,00	13.456,00	14.142,60	14.875,70

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

A.2 Data Produk Domestik Regional Bruto Kab. Tulungagung Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar rupiah)

Kategori	Uraian Sektor	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.830,00	4.018,60	4.162,60	4.286,40	4.420,20
B	Pertambangan dan Penggalian	774,7	786,7	794,2	820	832,3
C	Industri Pengolahan	3.687,10	3.894,10	4.085,90	4.341,60	4.608,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,7	9,7	9,9	10	10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	17,2	17,6	18,7	18,9	19,8
F	Konstruksi	1.595,10	1.695,60	1.821,60	1.938,80	1.989,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil	3.678,10	3.990,30	4.305,70	4.540,80	4.800,80
H	Transportasi dan Pergudangan	343	367,5	404,6	443,4	475,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	304,5	332,5	356,8	389,3	422,3
J	Informasi dan Komunikasi	1.014,80	1.129,50	1.262,80	1.355,20	1.453,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	356	401,1	453,7	480,5	507,8
L	Real Estate	365,7	391,7	422,8	454,4	478,3
M,N	Jasa Perusahaan	64,1	66,8	71,6	78,2	82,8
O	Adm. Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	674	682,5	687,7	690,3	726,3
P	Jasa Pendidikan	703,1	759,8	820,8	886,1	949,1
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	176,6	197,6	213	244,8	249,7
R,S,T,U	Jasa Lainnya	252,5	257,4	272,1	286,4	299,7
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		17.845,20	18.999,00	20.164,30	21.265,20	22.326,60

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

A.3 Data Produk Domestik Regional Bruto Kab. Trenggalek Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar rupiah)

Kategori	Uraian Sektor	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.434,70	2.575,30	2.693,40	2.809,90	2.928,70
B	Pertambangan dan Penggalian	622,4	625,8	634,6	653,5	680,6
C	Industri Pengolahan	1.196,40	1.264,20	1.335,00	1.429,40	1.517,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4	4,3	4,4	4,4	4,3
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	5,1	5,5	5,8	6	6,3
F	Konstruksi	605,1	647,6	703,5	749,1	770,6
G	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil	1.414,90	1.504,40	1.594,50	1.659,50	1.747,70
H	Transportasi dan Pergudangan	107,9	117,2	128,5	140,7	150,3
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	142,2	153,1	164,5	176,7	189,7
J	Informasi dan Komunikasi	424,7	486,3	553,7	598,9	642,7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	196,7	218,4	243,4	256,5	270,2
L	Real Estate	170,1	184,9	198,7	212,6	224,5
M,N	Jasa Perusahaan	20,2	21,5	22,7	24,5	25,9
O	Adm. Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	420,6	429,6	436	440,2	463,2
P	Jasa Pendidikan	360,9	393,2	428,4	455,1	482,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	67,8	75,3	80,9	92,1	93,4
R,S,T,U	Jasa Lainnya	241,8	252,8	268,7	289,1	302,7
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		8.435,20	8.959,50	9.496,70	9.998,40	10.500,80

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

A.4 Data Produk Domestik Regional Bruto Kab. Kediri Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar rupiah)

Kategori	Uraian Sektor	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.107,20	5.350,60	5.472,10	5.636,30	5.801,80
B	Pertambangan dan Penggalian	354,50	359	364,9	372,3	380,5
C	Industri Pengolahan	3.788,40	3.958,30	4.138,10	4.392,60	4.659,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,9	17,2	17,5	17,6	17,9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	11,4	12	12,9	13,2	13,9
F	Konstruksi	1.791,70	1.924,90	2.081,70	2.205,40	2.272,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil	3.761,10	4.064,00	4.421,60	4.673,20	4.908,70
H	Transportasi dan Pergudangan	324,4	352,1	385,6	422,5	450,1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	241,1	256,2	274,8	293,6	314
J	Informasi dan Komunikasi	949,2	1.050,60	1.176,40	1.300,90	1.444,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	320,2	350,2	388,5	414	434,5
L	Real Estate	388	414,8	444,9	474,7	498,3
M,N	Jasa Perusahaan	55,7	59,1	64,2	68,8	72,6
O	Adm. Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	821,3	847,3	868,3	873,8	909
P	Jasa Pendidikan	915,8	978,7	1.041,00	1.105,20	1.174,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	147,4	161,6	172,9	189,4	196,8
R,S,T,U	Jasa Lainnya	361,8	382,1	407,9	435,6	456,9
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		19.354,90	20.538,30	21.733,50	22.889,30	24.005,50

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

A.5 Data Produk Domestik Regional Bruto Kota Kediri Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar rupiah)

Kategori	Uraian Sektor	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	173,4	174,1	177,9	181,1	185,7
B	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0
C	Industri Pengolahan	48.831,00	50.953,00	52.260,90	55.466,00	58.453,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,7	7,3	7,6	7,8	7,9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	13,6	14,3	15,3	15,4	15,9
F	Konstruksi	1.070,50	1.156,60	1.251,60	1.293,90	1.330,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil	5.697,10	6.299,00	6.712,50	6.952,30	7.296,30
H	Transportasi dan Pergudangan	237,5	247,3	267,3	288,6	304,4
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	844,3	889	952,7	1.025,20	1.100,40
J	Informasi dan Komunikasi	1.243,40	1.415,90	1.582,10	1.696,30	1.818,80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	517,5	563,7	619,6	655,5	687,1
L	Real Estate	275,9	289,9	310	331,7	349,2
M,N	Jasa Perusahaan	113,1	120,2	128,8	139,4	148,5
O	Adm. Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	250,9	259,5	264,5	265	274,1
P	Jasa Pendidikan	431,9	465,1	502,8	538,9	575,4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	95,1	103,4	113,2	122,1	131,1
R,S,T,U	Jasa Lainnya	218,1	226,7	242	253,8	267
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		60.020,10	63.185,10	65.408,80	69.232,90	72.945,50

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

A.6 Data Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar rupiah)

Kategori	Uraian Sektor	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	138.870,10	146.002,60	150.463,70	155.771,10	161.154,00
B	Pertambangan dan Penggalian	58.140,30	58.287,90	59.050,00	60.887,40	65.707,00
C	Industri Pengolahan	306.072,40	326.681,80	345.794,60	372.726,40	392.489,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.405,00	4.259,00	4.380,30	4.502,10	4.367,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	1.171,30	1.182,00	1.231,00	1.234,10	1.299,30
F	Konstruksi	95.157,70	102.250,90	110.485,50	116.498,20	120.688,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil	190.771,70	206.433,70	219.246,10	229.725,70	243.497,80
H	Transportasi dan Pergudangan	29.399,90	31.528,70	34.241,20	36.453,40	38.844,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	51.667,00	54.601,20	57.684,90	62.807,80	67.773,10
J	Informasi dan Komunikasi	51.881,60	58.299,20	65.313,90	69.155,10	73.640,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	24.088,30	26.668,00	30.348,40	32.399,60	34.730,30
L	Real Estate	17.737,70	19.153,80	20.565,10	21.998,30	23.092,60
M,N	Jasa Perusahaan	8.156,70	8.416,90	9.044,10	9.815,00	10.349,10
O	Adm. Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	27.823,80	28.210,10	28.564,70	28.729,60	30.275,50
P	Jasa Pendidikan	26.494,10	28.789,40	31.265,50	33.306,70	35.392,80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.353,00	7.033,10	7.592,80	8.212,80	8.743,30
R,S,T,U	Jasa Lainnya	16.211,20	16.666,30	17.517,90	18.473,70	19.374,40
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		1.054.401,80	1.124.464,60	1.192.789,80	1.262.697,10	1.331.418,20

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

A.7 Data Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kab. Nganjuk Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar rupiah)

Kategori	Uraian Subsektor	PDRB Kab. Nganjuk ADHK 2010 (Miliar Rupiah)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	3.977,00	4.100,60	4.101,70	4.194,30	4.333,60
(a)	Tanaman Pangan	1.685,80	1.736,50	1.753,30	1.807,40	1.872,30
(b)	Tanaman Hortikultura	736,00	757,70	712,00	734,50	777,00
(c)	Perkebunan	305,5	311,5	328	332,9	340
(d)	Peternakan	1.204,20	1.244,80	1.255,20	1.261,70	1.285,00
(e)	Jasa Pertanian dan Perkebunan	45,50	50,00	53,20	57,80	59,30
2.	Kehutanan dan Penebangan Kayu	138,00	175,70	201,50	207,40	216,20
3.	Perikanan	118,5	120,9	130,4	136,7	144,8
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		12.061,20	12.767,00	13.456,00	14.142,60	14.875,70

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

A.8 Data Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kab. Tulungagung Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar rupiah)

Kategori	Uraian Subsektor	PDRB Kab. Tulungagung ADHK 2010 (Miliar Rupiah)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	3.259,70	3.370,40	3.414,70	3.490,40	3.582,10
(a)	Tanaman Pangan	1.297,40	1.338,20	1.344,50	1.382,10	1.429,40
(b)	Tanaman Hortikultura	258,00	261,40	262,10	266,10	278,70
(c)	Perkebunan	608,4	647,3	671,4	697,3	709,4
(d)	Peternakan	1.050,50	1.075,70	1.086,60	1.091,90	1.110,40
(e)	Jasa Pertanian dan Perkebunan	45,50	47,80	50,10	53,10	54,30
2.	Kehutanan dan Penebangan Kayu	117,00	149,50	165,90	168,30	171,40
3.	Perikanan	453,3	498,6	582	627,6	666,7
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		17.845,20	18.999,00	20.164,30	21.265,20	22.326,60

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

A.9 Data Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kab. Trenggalek Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar rupiah)

Kategori	Uraian Subsektor	PDRB Kab. Trenggalek ADHK 2010 (Miliar Rupiah)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	1.784,00	1.849,50	1.867,30	1.918,30	1.974,70
(a)	Tanaman Pangan	814,2	831,4	830	861,4	890,5
(b)	Tanaman Hortikultura	122,20	123,50	123,40	126,40	133,40
(c)	Perkebunan	272,6	294,1	304,7	314,4	320,7
(d)	Peternakan	549,7	574,6	582,5	588	601,4
(e)	Jasa Pertanian dan Perkebunan	25,2	25,9	26,7	28,2	28,8
2.	Kehutanan dan Penebangan Kayu	109,10	133,60	153,20	151,80	159,00
3.	Perikanan	541,5	592,2	672,9	739,7	795
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		8.435,20	8.959,50	9.496,70	9.998,40	10.500,80

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

A.10 Data Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kab. Kediri Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar rupiah)

Kategori	Uraian Subsektor	PDRB Kab. Kediri ADHK 2010 (Miliar Rupiah)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	4.715,10	4.924,60	5.011,20	5.148,00	5.292,40
(a)	Tanaman Pangan	1.441,10	1.476,40	1.488,70	1.526,70	1.575,60
(b)	Tanaman Hortikultura	669,70	684,50	694,20	710,10	741,80
(c)	Perkebunan	1.137,10	1.209,40	1.249,90	1.308,10	1.339,30
(d)	Peternakan	1.400,70	1.484,30	1.506,30	1.528,10	1.559,00
(e)	Jasa Pertanian dan Perkebunan	66,50	70,00	72,10	75,00	76,70
2.	Kehutanan dan Penebangan Kayu	88,60	90,80	97,70	98,50	97,80
3.	Perikanan	303,4	335,2	363,2	389,8	411,5
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		19.354,90	20.538,30	21.733,50	22.889,30	24.005,50

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

A.11 Data Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jawa Timur Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar rupiah)

Kategori	Uraian Subsektor	PDRB Jawa Timur ADHK 2010 (Miliar Rupiah)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	112.521,80	116.214,20	117.512,80	120.992,30	124.505,40
(a)	Tanaman Pangan	46.435,30	47.585,50	48.241,20	49.679,10	51.363,70
(b)	Tanaman Hortikultura	14.305,90	14.461,70	14.298,00	14.735,30	15.485,30
(c)	Perkebunan	22.121,00	23.452,40	23.877,70	25.064,60	25.467,70
(d)	Peternakan	28.126,70	29.055,80	29.365,60	29.704,60	30.302,80
(e)	Jasa Pertanian dan Perkebunan	1.532,80	1.658,80	1.730,20	1.808,70	1.885,90
2.	Kehutanan dan Penebangan Kayu	4.501,00	5.675,80	6.046,90	6.054,20	6.322,30
3.	Perikanan	21.847,30	24.112,60	26.903,90	28.724,60	30.326,30
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		1.054.401,80	1.124.464,60	1.192.789,80	1.262.697,10	1.331.418,20

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

A.12 Data Produk Domestik Regional Bruto Sektor Industri Pengolahan Kota Kediri Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar rupiah)

Kategori	Uraian Subsektor	2011	2012	2013	2014	2015
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Industri Makanan dan Minuman	839,8	901,1	965,8	1026	1112,4
3	Pengolahan Tembakau	47.875,80	49.932,40	51.167,80	54.307,20	57.204,80
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	9	9,6	10,2	10,8	11,1
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1,2	1,2	1,3	1,4	1,4
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus	31,5	31,8	33,8	35,5	35,6
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	9,60	9,80	10,20	10,30	10,70
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	17,6	19,2	21,2	22,7	23,7
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	5,2	5,7	5,9	6,2	6,4
10	Industri Barang Galian bukan Logam	5,8	6,1	6,6	6,7	7
11	Industri Logam Dasar	0	0	0	0	0
12	Industri Barang dari Logam, Komputer,	19,1	19,5	21,2	21,6	22,5
13	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0	0	0	0	0
14	Industri Alat Angkutan	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
15	Industri Furnitur	6	6,2	6,4	6,7	6,9
16	Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi	6,8	6,9	6,9	7,3	7,5
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		60.020,10	63.185,10	65.408,80	69.232,90	72.945,50

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

A.13 Data Produk Domestik Regional Bruto Sektor Industri Pengolahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar rupiah)

Kategori	Uraian Subsektor	2011	2012	2013	2014	2015
1	Industri Batubara dan Pengecilan Migas	930,80	962,70	979,20	979,60	1.006,00
2	Industri Makanan dan Minuman	80.576,80	87.332,10	94.379,90	101.489,50	111.508,80
3	Pengolahan Tembakau	76.309,50	81.024,80	80.949,20	90.098,80	94.893,30
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	4.951,70	5.145,00	5.541,10	5.946,10	6.100,50
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3.819,80	3.878,30	4.263,30	4.600,40	4.690,60
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus	20.825,20	20.840,90	22.730,50	23.653,10	23.205,00
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	18.838,30	18.874,70	18.544,40	18.638,30	19.511,70
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	22.640,90	27.028,90	30.696,40	33.530,20	34.963,10
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	16.837,80	18.748,30	18.420,90	19.898,70	20.503,60
10	Industri Barang Galian bukan Logam	14.548,80	15.176,20	16.283,50	16.371,20	17.362,80
11	Industri Logam Dasar	12.443,00	12.759,30	15.116,80	17.881,60	17.619,50
12	Industri Barang dari Logam, Komputer,	13.677,10	15.500,90	17.394,40	18.186,00	19.078,30
13	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	687,3	693,4	696,9	727,5	732,4
14	Industri Alat Angkutan	3.938,60	4.087,40	4.611,80	4.830,80	4.949,40
15	Industri Furnitur	11.125,30	10.680,60	11.333,00	11.807,30	12.224,80
16	Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi	3.921,40	3.948,40	3.853,30	4.087,20	4.139,30
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		1.054.401,80	1.124.464,60	1.192.789,80	1.262.697,10	1.331.418,20

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Lampiran B. Perhitungan Analisis *Location Quotient*

B.1 Perhitungan Analisis Rata-rata Nilai *Location Quotient* Sektor Ekonomi Kab. Nganjuk Tahun 2011-2015

Kategori	Uraian Sektor	Nilai LQ					Rata - rata	Keterangan
		2011	2012	2013	2014	2015		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,67	2,65	2,61	2,60	2,61	2,63	Sektor Basis
B	Pertambangan dan Penggalian	0,38	0,39	0,41	0,42	0,40	0,40	Sektor Non Basis
C	Industri Pengolahan	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,45	Sektor Non Basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,15	0,15	0,15	0,16	0,15	Sektor Non Basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	1,11	1,13	1,13	1,16	1,16	1,14	Sektor Basis
F	Konstruksi	0,99	0,98	0,98	1,00	1,00	0,99	Sektor Non Basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil	0,91	0,94	0,99	1,03	1,05	0,99	Sektor Non Basis
H	Transportasi dan Pergudangan	0,47	0,47	0,48	0,49	0,49	0,48	Sektor Non Basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,35	Sektor Non Basis
J	Informasi dan Komunikasi	0,91	0,89	0,88	0,90	0,91	0,90	Sektor Non Basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,92	0,91	0,90	0,91	0,91	0,91	Sektor Non Basis
L	Real Estate	1,01	1,00	1,01	1,01	1,01	1,01	Sektor Basis
M,N	Jasa Perusahaan	0,43	0,44	0,44	0,43	0,44	0,44	Sektor Non Basis
O	Adm. Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,05	2,10	2,13	2,16	2,18	2,13	Sektor Basis
P	Jasa Pendidikan	1,38	1,35	1,35	1,35	1,36	1,36	Sektor Basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,92	0,91	0,91	0,95	0,91	0,92	Sektor Non Basis
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,97	2,02	2,05	2,09	2,11	2,05	Sektor Basis

Lanjutan

Nilai *Location Quotient* Sektor Basis Kab. Nganjuk Tahun 2011-2015

Tahun	Kab. Nganjuk		Jawa Timur		S / N	Si / Ni	LQ
	PDRB Sektor Basis	PDRB Total	PDRB Sektor Basis	PDRB Total			
2011	5.890,90	12.061,20	228.308,20	1.054.401,80	0,488	0,217	2,256
2012	6.126,50	12.767,00	240.004,20	1.124.464,60	0,480	0,213	2,248
2013	6.250,90	13.456,00	249.607,90	1.192.789,80	0,465	0,209	2,220
2014	6.435,80	14.142,60	259.513,50	1.262.697,10	0,455	0,206	2,214
2015	6.704,00	14.875,70	270.588,60	1.331.418,20	0,451	0,203	2,217
Rata-rata							2,231

Lanjutan

Perhitungan Analisis Rata-rata Nilai *Location Quotient* Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kab. Nganjuk Tahun 2011-2015

Kategori	Uraian Subsektor	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata	Keterangan
1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	3,09	3,11	3,094	3,095	3,115	3,10	Sektor Basis
(a)	Tanaman Pangan	3,17	3,21	3,222	3,248	3,263	3,22	Sektor Basis
(b)	Tanaman Hortikultura	4,50	4,61	4,414	4,450	4,491	4,49	Sektor Basis
(c)	Perkebunan	1,21	1,17	1,218	1,186	1,195	1,20	Sektor Basis
(d)	Peternakan	3,74	3,77	3,789	3,792	3,795	3,78	Sektor Basis
(e)	Jasa Pertanian dan Perkebunan	2,60	2,65	2,726	2,853	2,814	2,73	Sektor Basis
2.	Kehutanan dan Penebangan Kayu	2,68	2,73	2,954	3,059	3,061	2,90	Sektor Basis
3.	Perikanan	0,47	0,44	0,430	0,425	0,427	0,44	Sektor Non Basis

B.2 Perhitungan Analisis Rata-rata Nilai *Location Quotient* Sektor Ekonomi Kab. Tulungagung Tahun 2011-2015

Kategori	Uraian Sektor	Nilai LQ					Rata - rata	Keterangan
		2011	2012	2013	2014	2015		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,63	1,63	1,64	1,63	1,64	1,63	Sektor Basis
B	Pertambangan dan Penggalian	0,79	0,80	0,80	0,80	0,76	0,79	Sektor Non Basis
C	Industri Pengolahan	0,71	0,71	0,70	0,69	0,70	0,70	Sektor Non Basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,13	Sektor Non Basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,87	0,88	0,90	0,91	0,91	0,89	Sektor Non Basis
F	Konstruksi	0,99	0,98	0,98	0,99	0,98	0,98	Sektor Non Basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil	1,14	1,14	1,16	1,17	1,18	1,16	Sektor Basis
H	Transportasi dan Pergudangan	0,69	0,69	0,70	0,72	0,73	0,71	Sektor Non Basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,35	0,36	0,37	0,37	0,37	0,36	Sektor Non Basis
J	Informasi dan Komunikasi	1,16	1,15	1,14	1,16	1,18	1,16	Sektor Basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,87	0,89	0,88	0,88	0,87	0,88	Sektor Non Basis
L	Real Estate	1,22	1,21	1,22	1,23	1,24	1,22	Sektor Basis
M,N	Jasa Perusahaan	0,46	0,47	0,47	0,47	0,48	0,47	Sektor Non Basis
O	Adm. Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,43	1,43	1,42	1,43	1,43	1,43	Sektor Basis
P	Jasa Pendidikan	1,57	1,56	1,55	1,58	1,60	1,57	Sektor Basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,64	1,66	1,66	1,77	1,70	1,69	Sektor Basis
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,92	0,91	0,92	0,92	0,92	0,92	Sektor Non Basis

Lanjutan

Nilai *Location Quotion* Sektor Basis Kab. Tulungagung Tahun 2011-2015

Tahun	Kab. Tulungagung		Jawa Timur		S / N	Si / Ni	LQ
	PDRB Sektor Basis	PDRB Total	PDRB Sektor Basis	PDRB Total			
2011	10.442,30	17.845,20	459.932,00	1.054.401,80	0,585	0,436	1,341
2012	11.170,00	18.999,00	493.921,90	1.124.464,60	0,588	0,439	1,338
2013	11.875,40	20.164,30	523.011,80	1.192.789,80	0,589	0,438	1,343
2014	12.458,00	21.265,20	546.899,30	1.262.697,10	0,586	0,433	1,353
2015	13.078,30	22.326,60	575.796,00	1.331.418,20	0,586	0,432	1,354
Rata-rata							1,346

B.3 Perhitungan Analisis Rata-rata Nilai *Location Quotient* Sektor Ekonomi Kab. Trenggalek Tahun 2011-2015

Kategori	Uraian Sektor	Nilai LQ					Rata - rata	Keterangan
		2011	2012	2013	2014	2015		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,19	2,21	2,25	2,28	2,30	2,25	Sektor Basis
B	Pertambangan dan Penggalian	1,34	1,35	1,35	1,36	1,31	1,34	Sektor Basis
C	Industri Pengolahan	0,49	0,49	0,48	0,48	0,49	0,49	Sektor Non Basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	Sektor Non Basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,54	0,58	0,59	0,61	0,61	0,59	Sektor Non Basis
F	Konstruksi	0,79	0,79	0,80	0,81	0,81	0,80	Sektor Non Basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil	0,93	0,91	0,91	0,91	0,91	0,92	Sektor Non Basis
H	Transportasi dan Pergudangan	0,46	0,47	0,47	0,49	0,49	0,47	Sektor Non Basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,34	0,35	0,36	0,36	0,35	0,35	Sektor Non Basis
J	Informasi dan Komunikasi	1,02	1,05	1,06	1,09	1,11	1,07	Sektor Basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,02	1,03	1,01	1,00	0,99	1,01	Sektor Basis
L	Real Estate	1,20	1,21	1,21	1,22	1,23	1,22	Sektor Basis
M,N	Jasa Perusahaan	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	Sektor Non Basis
O	Adm. Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,89	1,91	1,92	1,94	1,94	1,92	Sektor Basis
P	Jasa Pendidikan	1,70	1,71	1,72	1,73	1,73	1,72	Sektor Basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,33	1,34	1,34	1,42	1,35	1,36	Sektor Basis
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,86	1,90	1,93	1,98	1,98	1,93	Sektor Basis

Lanjutan

Nilai *Location Quotion* Sektor Basis Kab. Trenggalek Tahun 2011-2015

Tahun	Kab. Trenggalek		Jawa Timur		S / N	Si / Ni	LQ
	PDRB Sektor Basis	PDRB Total	PDRB Sektor Basis	PDRB Total			
2011	4.939,70	8.435,20	367.600,10	1.054.401,80	0,586	0,349	1,680
2012	5.241,60	8.959,50	389.110,40	1.124.464,60	0,585	0,346	1,691
2013	5.537,80	9.496,70	410.682,00	1.192.789,80	0,583	0,344	1,694
2014	5.807,90	9.998,40	428.934,30	1.262.697,10	0,581	0,340	1,710
2015	6.088,50	10.500,80	452.109,90	1.331.418,20	0,580	0,340	1,707
Rata-rata							1,696

Lanjutan

Perhitungan Analisis Rata-rata Nilai *Location Quotient* Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kab. Trenggalek Tahun 2011-2015

Kategori	Uraian Subsektor	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata	Keterangan
1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	1,98	2,00	1,996	2,002	2,011	1,998	Sektor Basis
(a)	Tanaman Pangan	2,19	2,19	2,161	2,190	2,198	2,187	Sektor Basis
(b)	Tanaman Hortikultura	1,07	1,07	1,084	1,083	1,092	1,080	Sektor Basis
(c)	Perkebunan	1,54	1,57	1,603	1,584	1,597	1,580	Sektor Basis
(d)	Peternakan	2,44	2,48	2,491	2,500	2,516	2,487	Sektor Basis
(e)	Jasa Pertanian dan Perkebunan	2,06	1,96	1,938	1,969	1,936	1,972	Sektor Basis
2.	Kehutanan dan Penebangan Kayu	3,03	2,95	3,182	3,167	3,189	3,104	Sektor Basis
3.	Perikanan	3,10	3,08	3,141	3,252	3,324	3,180	Sektor Basis

B.4 Perhitungan Analisis Rata-rata Nilai *Location Quotient* Sektor Ekonomi Kab. Kediri Tahun 2011-2015

Kategori	Uraian Sektor	Nilai LQ					Rata - rata	Keterangan
		2011	2012	2013	2014	2015		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,00	2,01	2,00	2,00	2,00	2,00	Sektor Basis
B	Pertambangan dan Penggalian	0,33	0,34	0,34	0,34	0,32	0,33	Sektor Non Basis
C	Industri Pengolahan	0,67	0,66	0,66	0,65	0,66	0,66	Sektor Non Basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,20	0,22	0,22	0,22	0,23	0,22	Sektor Non Basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,53	0,56	0,58	0,59	0,59	0,57	Sektor Non Basis
F	Konstruksi	1,03	1,03	1,03	1,04	1,04	1,04	Sektor Basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil	1,07	1,08	1,11	1,12	1,12	1,10	Sektor Basis
H	Transportasi dan Pergudangan	0,60	0,61	0,62	0,64	0,64	0,62	Sektor Non Basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	Sektor Non Basis
J	Informasi dan Komunikasi	1,00	0,99	0,99	1,04	1,09	1,02	Sektor Basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,72	0,72	0,70	0,70	0,69	0,71	Sektor Non Basis
L	Real Estate	1,19	1,19	1,19	1,19	1,20	1,19	Sektor Basis
M,N	Jasa Perusahaan	0,37	0,38	0,39	0,39	0,39	0,38	Sektor Non Basis
O	Adm. Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,61	1,64	1,67	1,68	1,67	1,65	Sektor Basis
P	Jasa Pendidikan	1,88	1,86	1,83	1,83	1,84	1,85	Sektor Basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,26	1,26	1,25	1,27	1,25	1,26	Sektor Basis
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,22	1,26	1,28	1,30	1,31	1,27	Sektor Basis

Lanjutan

Nilai *Location Quotion* Sektor Basis Kab. Kediri Tahun 2011-2015

Tahun	Kab. Kediri		Jawa Timur		S / N	Si / Ni	LQ
	PDRB Sektor Basis	PDRB Total	PDRB Sektor Basis	PDRB Total			
2011	13.294,30	19.354,90	519.419,30	1.054.401,80	0,687	0,493	1,394
2012	14.124,00	20.538,30	554.539,90	1.124.464,60	0,688	0,493	1,394
2013	14.910,40	21.733,50	585.701,30	1.192.789,80	0,686	0,491	1,397
2014	16.894,50	22.889,30	681.871,20	1.262.697,10	0,738	0,540	1,367
2015	17.662,30	24.005,50	715.858,70	1.331.418,20	0,736	0,538	1,368
Rata-rata							1,384

Lanjutan

Perhitungan Analisis Rata-rata Nilai *Location Quotient* Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kab. Kediri Tahun 2011-2015

Kategori	Uraian Subsektor	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata	Keterangan
1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	2,28	2,32	2,340	2,347	2,358	2,330	Sektor Basis
(a)	Tanaman Pangan	1,69	1,70	1,694	1,695	1,701	1,696	Sektor Basis
(b)	Tanaman Hortikultura	2,55	2,59	2,665	2,658	2,657	2,624	Sektor Basis
(c)	Perkebunan	2,80	2,82	2,873	2,879	2,917	2,858	Sektor Basis
(d)	Peternakan	2,71	2,80	2,815	2,838	2,853	2,803	Sektor Basis
(e)	Jasa Pertanian dan Perkebunan	2,36	2,31	2,287	2,288	2,256	2,301	Sektor Basis
2.	Kehutanan dan Penebangan Kayu	1,07	0,88	0,887	0,898	0,858	0,918	Sektor Non Basis
3.	Perikanan	0,76	0,76	0,741	0,749	0,753	0,752	Sektor Non Basis

B.5 Perhitungan Analisis Rata-rata Nilai *Location Quotient* Sektor Ekonomi Kota Kediri Tahun 2011-2015

Kategori	Uraian Sektor	Nilai LQ					Rata - rata	Keterangan
		2011	2012	2013	2014	2015		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	Sektor Non Basis
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sektor Non Basis
C	Industri Pengolahan	2,80	2,78	2,76	2,71	2,72	2,75	Sektor Basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	Sektor Non Basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,20	0,22	0,23	0,23	0,22	0,22	Sektor Non Basis
F	Konstruksi	0,20	0,20	0,21	0,20	0,20	0,20	Sektor Non Basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil	0,52	0,54	0,56	0,55	0,55	0,54	Sektor Non Basis
H	Transportasi dan Pergudangan	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	Sektor Non Basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,29	0,29	0,30	0,30	0,30	0,29	Sektor Non Basis
J	Informasi dan Komunikasi	0,42	0,43	0,44	0,45	0,45	0,44	Sektor Non Basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,38	0,38	0,37	0,37	0,36	0,37	Sektor Non Basis
L	Real Estate	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28	0,27	Sektor Non Basis
M,N	Jasa Perusahaan	0,24	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26	Sektor Non Basis
O	Adm. Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,16	Sektor Non Basis
P	Jasa Pendidikan	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	0,29	Sektor Non Basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27	Sektor Non Basis
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	Sektor Non Basis

Lanjutan

Nilai *Location Quotion* Sektor Basis Kota Kediri Tahun 2011-2015

Tahun	Kota Kediri		Jawa Timur		S / N	Si / Ni	LQ
	PDRB Sektor Basis	PDRB Total	PDRB Sektor Basis	PDRB Total			
2011	48.831,00	60.020,10	306.072,40	1.054.401,80	0,814	0,290	2,803
2012	50.953,00	63.185,10	326.681,80	1.124.464,60	0,806	0,291	2,776
2013	52.260,90	65.408,80	345.794,60	1.192.789,80	0,799	0,290	2,756
2014	55.466,00	69.232,90	372.726,40	1.262.697,10	0,801	0,295	2,714
2015	58.453,60	72.945,50	392.489,80	1.331.418,20	0,801	0,295	2,718
Rata-rata							2,753

Lanjutan

Perhitungan Analisis Rata-rata Nilai *Location Quotient* Sektor Industri Pengolahan Kota Kediri Tahun 2011-2015

Kategori	Uraian Subsektor	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata	Keterangan
1	Industri Batubara dan Pengecilan Migas	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Sektor Non Basis
2	Industri Makanan dan Minuman	0,183	0,184	0,187	0,184	0,182	0,184	Sektor Non Basis
3	Pengolahan Tembakau	11,022	10,967	11,527	10,993	11,003	11,102	Sektor Basis
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,032	0,033	0,034	0,033	0,033	0,033	Sektor Non Basis
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,006	0,006	0,006	0,006	0,005	0,006	Sektor Non Basis
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus	0,027	0,027	0,027	0,027	0,028	0,027	Sektor Non Basis
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	0,009	0,009	0,010	0,010	0,010	0,010	Sektor Non Basis
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,014	0,013	0,013	0,012	0,012	0,013	Sektor Non Basis
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,005	0,005	0,006	0,006	0,006	0,006	Sektor Non Basis
10	Industri Barang Galian bukan Logam	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	Sektor Non Basis
11	Industri Logam Dasar	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Sektor Non Basis
12	Industri Barang dari Logam, Komputer,	0,025	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	Sektor Non Basis
13	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Sektor Non Basis
14	Industri Alat Angkutan	0,016	0,016	0,014	0,014	0,013	0,015	Sektor Non Basis
15	Industri Furnitur	0,009	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	Sektor Non Basis
16	Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi	0,030	0,031	0,033	0,033	0,033	0,032	Sektor Non Basis

B.6 Peringkat Hasil Analisis *Location Quotient* Kabupaten/Kota pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri dan Sekitarnya Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015

No.	Daerah	Nilai LQ Sektor Basis	Peringkat
1	Kab. Nganjuk	2,231	II
2	Kab. Tulungagung	1,346	V
3	Kab. Trenggalek	1,696	III
4	Kab. Kediri	1,384	IV
5	Kota Kediri	2,753	I

Lampiran C Perhitungan Analisis *Shift Share*

C.1 Perhitungan Analisis *Shift Share* Kab. Nganjuk Tahun 2011-2015

Kategori	Uraian Sektor	Y r.i.t-n	Y r.i.t	Y N.i.t/ Y N.i.t-n	Y N.t/ Y N.t-n	(e)	(f)	(g)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(a) x (d)	(c) - (d)	(c) x (a)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.233,50	4.694,50	1,160	1,263	5345,741	-0,102	4912,832
B	Pertambangan dan Penggalian	251,40	296,10	1,130	1,263	317,449	-0,133	284,119
C	Industri Pengolahan	1.582,80	1.940,50	1,282	1,263	1998,639	0,020	2029,693
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,60	7,60	0,991	1,263	8,334	-0,271	6,543
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	14,90	16,90	1,109	1,263	18,815	-0,153	16,528
F	Konstruksi	1.074,00	1.352,00	1,268	1,263	1356,165	0,006	1362,152
G	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil	1.994,30	2.850,80	1,276	1,263	2518,250	0,014	2545,491
H	Transportasi dan Pergudangan	158,80	213,00	1,321	1,263	200,521	0,059	209,811
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	203,20	271,10	1,312	1,263	256,585	0,049	266,543
J	Informasi dan Komunikasi	540,20	748,00	1,419	1,263	682,123	0,157	766,752
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	252,20	353,40	1,442	1,263	318,459	0,179	363,620
L	Real Estate	204,60	261,50	1,302	1,263	258,353	0,039	266,367
M,N	Jasa Perusahaan	40,40	50,40	1,269	1,263	51,014	0,006	51,259
O	Adm. Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	653,10	737,70	1,088	1,263	824,685	-0,175	710,648
P	Jasa Pendidikan	419,50	537,00	1,336	1,263	529,713	0,073	560,399
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	66,60	88,90	1,376	1,263	84,097	0,114	91,658
R,S,T,U	Jasa Lainnya	365,30	456,40	1,195	1,263	461,273	-0,068	436,579

Lanjutan

Kategori	Uraian Sektor	National Share	Proportional Share	Differential Shift
		(e) - (a)	(f) x (a)	(b) - (g)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1112,241	-432,909	-218,332
B	Pertambangan dan Penggalian	66,049	-33,330	11,981
C	Industri Pengolahan	415,839	31,053	-89,193
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,734	-1,791	1,057
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	3,915	-2,286	0,372
F	Konstruksi	282,165	5,987	-10,152
G	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil	523,950	27,241	305,309
H	Transportasi dan Pergudangan	41,721	9,291	3,189
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	53,385	9,958	4,557
J	Informasi dan Komunikasi	141,923	84,629	-18,752
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	66,259	45,161	-10,220
L	Real Estate	53,753	8,014	-4,867
M,N	Jasa Perusahaan	10,614	0,245	-0,859
O	Adm. Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	171,585	-114,037	27,052
P	Jasa Pendidikan	110,213	30,687	-23,399
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	17,497	7,561	-2,758
R,S,T,U	Jasa Lainnya	95,973	-24,694	19,821
JUMLAH		3168,816	-349,222	-5,195
PERTAMBAHAN NILAI PDRB TAHUN 2011 – 2015				2814,400

C.2 Perhitungan Analisis *Shift Share* Kab. Trenggalek Tahun 2011-2015

Kategori	Uraian Sektor	Y r.i.t-n	Y r.i.t	Y N.i.t/ Y N.i.t-n	Y N.t/ Y N.t-n	(e)	(f)	(g)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(a) x (d)	(c) - (d)	(c) x (a)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.434,70	2.928,70	1,160	1,263	3074,354	-0,102	2825,386
B	Pertambangan dan Penggalian	622,40	680,60	1,130	1,263	785,919	-0,133	703,403
C	Industri Pengolahan	1.196,40	1.517,50	1,282	1,263	1510,723	0,020	1534,195
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,00	4,30	0,991	1,263	5,051	-0,271	3,965
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	5,10	6,30	1,109	1,263	6,440	-0,153	5,657
F	Konstruksi	605,10	770,60	1,268	1,263	764,074	0,006	767,447
G	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil	1.414,90	1.747,70	1,276	1,263	1786,628	0,014	1805,955
H	Transportasi dan Pergudangan	107,90	150,30	1,321	1,263	136,248	0,059	142,561
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	142,20	189,70	1,312	1,263	179,559	0,049	186,528
J	Informasi dan Komunikasi	424,70	642,70	1,419	1,263	536,279	0,157	602,813
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	196,70	270,20	1,442	1,263	248,378	0,179	283,600
L	Real Estate	170,10	224,50	1,302	1,263	214,789	0,039	221,452
M,N	Jasa Perusahaan	20,20	25,90	1,269	1,263	25,507	0,006	25,629
O	Adm. Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	420,60	463,20	1,088	1,263	531,102	-0,175	457,661
P	Jasa Pendidikan	360,90	482,50	1,336	1,263	455,717	0,073	482,117
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	67,80	93,40	1,376	1,263	85,613	0,114	93,310
R,S,T,U	Jasa Lainnya	241,80	302,70	1,195	1,263	305,327	-0,068	288,981

Lanjutan

Kategori	Uraian Sektor	National Share	Proportional Share	Differential Shift
		(e) - (a)	(f) x (a)	(b) - (g)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	639,654	-248,967	103,314
B	Pertambangan dan Penggalian	163,519	-82,517	-22,803
C	Industri Pengolahan	314,323	23,472	-16,695
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,051	-1,085	0,335
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	1,340	-0,783	0,643
F	Konstruksi	158,974	3,373	3,153
G	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil	371,728	19,327	-58,255
H	Transportasi dan Pergudangan	28,348	6,313	7,739
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	37,359	6,969	3,172
J	Informasi dan Komunikasi	111,579	66,534	39,887
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	51,678	35,223	-13,400
L	Real Estate	44,689	6,663	3,048
M,N	Jasa Perusahaan	5,307	0,122	0,271
O	Adm. Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	110,502	-73,440	5,539
P	Jasa Pendidikan	94,817	26,400	0,383
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	17,813	7,697	0,090
R,S,T,U	Jasa Lainnya	63,527	-16,346	13,719
JUMLAH		2216,206	-221,045	70,139
PERTAMBAHAN NILAI PDRB TAHUN 2011 – 2015				2065,300

C.3 Perhitungan Analisis *Shift Share* Kab. Tulungagung Tahun 2011-2015

Kategori	Uraian Sektor	Y r.i.t-n	Y r.i.t	Y N.i.t / Y N.i.t-n	Y N.t / Y N.t-n	(e)	(f)	(g)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(a) x (d)	(c) - (d)	(c) x (a)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.830,00	4.420,20	1,160	1,263	4836,232	-0,102	4444,584
B	Pertambangan dan Penggalian	774,70	832,30	1,130	1,263	978,232	-0,133	875,524
C	Industri Pengolahan	3.687,10	4.608,10	1,282	1,263	4655,789	0,020	4728,127
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,70	10,00	0,991	1,263	10,986	-0,271	8,625
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	17,20	19,80	1,109	1,263	21,719	-0,153	19,080
F	Konstruksi	1.595,10	1.989,50	1,268	1,263	2014,171	0,006	2023,062
G	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil	3.678,10	4.800,80	1,276	1,263	4644,424	0,014	4694,665
H	Transportasi dan Pergudangan	343,00	475,90	1,321	1,263	433,114	0,059	453,182
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	304,50	422,30	1,312	1,263	384,499	0,049	399,421
J	Informasi dan Komunikasi	1.014,80	1.453,90	1,419	1,263	1281,412	0,157	1440,393
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	356,00	507,80	1,442	1,263	449,530	0,179	513,278
L	Real Estate	365,70	478,30	1,302	1,263	461,778	0,039	476,103
M,N	Jasa Perusahaan	64,10	82,80	1,269	1,263	80,941	0,006	81,329
O	Adm. Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	674,00	726,30	1,088	1,263	851,076	-0,175	733,390
P	Jasa Pendidikan	703,10	949,10	1,336	1,263	887,821	0,073	939,254
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	176,60	249,70	1,376	1,263	222,997	0,114	243,045
R,S,T,U	Jasa Lainnya	252,50	299,70	1,195	1,263	318,838	-0,068	301,769

Lanjutan

Kategori	Uraian Sektor	National Share	Proportional Share	Differential Shift
		(e) - (a)	(f) x (a)	(b) - (g)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1006,232	-391,648	-24,384
B	Pertambangan dan Penggalian	203,532	-102,708	-43,224
C	Industri Pengolahan	968,689	72,338	-120,027
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,286	-2,361	1,375
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	4,519	-2,639	0,720
F	Konstruksi	419,071	8,891	-33,562
G	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil	966,324	50,241	106,135
H	Transportasi dan Pergudangan	90,114	20,067	22,718
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	79,999	14,922	22,879
J	Informasi dan Komunikasi	266,612	158,981	13,507
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	93,530	63,748	-5,478
L	Real Estate	96,078	14,324	2,197
M,N	Jasa Perusahaan	16,841	0,389	1,471
O	Adm. Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	177,076	-117,686	-7,090
P	Jasa Pendidikan	184,721	51,432	9,846
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	46,397	20,048	6,655
R,S,T,U	Jasa Lainnya	66,338	-17,069	-2,069
JUMLAH		4688,358	-158,729	-48,328
PERTAMBAHAN NILAI PDRB TAHUN 2011 – 2015				4481,300

C.4 Perhitungan Analisis *Shift Share* Kab. Kediri Tahun 2011-2015

Kategori	Uraian Sektor	Y r.i.t-n	Y r.i.t	Y N.i.t / Y N.i.t-n	Y N.t / Y N.t-n	(e)	(f)	(g)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(a) x (d)	(c) - (d)	(c) x (a)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.107,20	5.801,80	1,160	1,263	6448,983	-0,102	5926,731
B	Pertambangan dan Penggalian	354,50	380,50	1,130	1,263	447,636	-0,133	400,637
C	Industri Pengolahan	3.788,40	4.659,60	1,282	1,263	4783,703	0,020	4858,028
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,90	17,90	0,991	1,263	20,077	-0,271	15,763
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	11,40	13,90	1,109	1,263	14,395	-0,153	12,646
F	Konstruksi	1.791,70	2.272,10	1,268	1,263	2262,422	0,006	2272,409
G	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil	3.761,10	4.908,70	1,276	1,263	4749,230	0,014	4800,605
H	Transportasi dan Pergudangan	324,40	450,10	1,321	1,263	409,628	0,059	428,607
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	241,10	314,00	1,312	1,263	304,443	0,049	316,258
J	Informasi dan Komunikasi	949,20	1.444,30	1,419	1,263	1198,577	0,157	1347,281
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	320,20	434,50	1,442	1,263	404,324	0,179	461,662
L	Real Estate	388,00	498,30	1,302	1,263	489,937	0,039	505,135
M,N	Jasa Perusahaan	55,70	72,60	1,269	1,263	70,334	0,006	70,671
O	Adm. Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	821,30	909,00	1,088	1,263	1037,075	-0,175	893,669
P	Jasa Pendidikan	915,80	1.174,40	1,336	1,263	1156,402	0,073	1223,394
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	147,40	196,80	1,376	1,263	186,125	0,114	202,859
R,S,T,U	Jasa Lainnya	361,80	456,90	1,195	1,263	456,853	-0,068	432,396

Lanjutan

Kategori	Uraian Sektor	National Share	Proportional Share	Differential Shift
		(e) - (a)	(f) x (a)	(b) - (g)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1341,783	-522,252	-124,931
B	Pertambangan dan Penggalian	93,136	-46,999	-20,137
C	Industri Pengolahan	995,303	74,326	-198,428
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,177	-4,314	2,137
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	2,995	-1,749	1,254
F	Konstruksi	470,722	9,987	-0,309
G	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil	988,130	51,375	108,095
H	Transportasi dan Pergudangan	85,228	18,979	21,493
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	63,343	11,815	-2,258
J	Informasi dan Komunikasi	249,377	148,703	97,019
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	84,124	57,337	-27,162
L	Real Estate	101,937	15,198	-6,835
M,N	Jasa Perusahaan	14,634	0,338	1,929
O	Adm. Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	215,775	-143,406	15,331
P	Jasa Pendidikan	240,602	66,992	-48,994
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	38,725	16,733	-6,059
R,S,T,U	Jasa Lainnya	95,053	-24,457	24,504
JUMLAH		5085,045	-271,395	-163,350
PERTAMBAHAN NILAI PDRB TAHUN 2011 - 2015				4650,300

C.5 Perhitungan Analisis *Shift Share* Kota Kediri Tahun 2011-2015

Kategori	Uraian Sektor	Y r.i.t-n	Y r.i.t	Y N.i.t/ Y N.i.t-n	Y N.t/ Y N.t-n	(e)	(f)	(g)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(a) x (d)	(c) - (d)	(c) x (a)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	173,40	185,70	1,160	1,263	218,956	-0,102	201,225
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	1,130	1,263	0,000	-0,133	0,000
C	Industri Pengolahan	48.831,00	58.453,60	1,282	1,263	61660,064	0,020	62618,091
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,70	7,90	0,991	1,263	8,460	-0,271	6,642
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	13,60	15,90	1,109	1,263	17,173	-0,153	15,086
F	Konstruksi	1.070,50	1.330,20	1,268	1,263	1351,746	0,006	1357,713
G	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil	5.697,10	7.296,30	1,276	1,263	7193,864	0,014	7271,683
H	Transportasi dan Pergudangan	237,50	304,40	1,321	1,263	299,897	0,059	313,792
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	844,30	1.100,40	1,312	1,263	1066,118	0,049	1107,493
J	Informasi dan Komunikasi	1.243,40	1.818,80	1,419	1,263	1570,071	0,157	1764,864
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	517,50	687,10	1,442	1,263	653,460	0,179	746,127
L	Real Estate	275,90	349,20	1,302	1,263	348,385	0,039	359,192
M,N	Jasa Perusahaan	113,10	148,50	1,269	1,263	142,814	0,006	143,500
O	Adm. Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	250,90	274,10	1,088	1,263	316,817	-0,175	273,008
P	Jasa Pendidikan	431,90	575,40	1,336	1,263	545,370	0,073	576,964
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	95,10	131,10	1,376	1,263	120,085	0,114	130,881
R,S,T,U	Jasa Lainnya	218,10	267,00	1,195	1,263	275,400	-0,068	260,657

Lanjutan

Kategori	Uraian Sektor	National Share	Proportional Share	Differential Shift
		(e) - (a)	(f) x (a)	(b) - (g)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	45,556	-17,732	-15,525
B	Pertambangan dan Penggalian	0,000	0,000	0,000
C	Industri Pengolahan	12829,064	958,027	-4164,491
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,760	-1,818	1,258
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	3,573	-2,087	0,814
F	Konstruksi	281,246	5,967	-27,513
G	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil	1496,764	77,819	24,617
H	Transportasi dan Pergudangan	62,397	13,895	-9,392
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	221,818	41,375	-7,093
J	Informasi dan Komunikasi	326,671	194,793	53,936
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	135,960	92,667	-59,027
L	Real Estate	72,485	10,807	-9,992
M,N	Jasa Perusahaan	29,714	0,686	5,000
O	Adm. Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	65,917	-43,809	1,092
P	Jasa Pendidikan	113,470	31,594	-1,564
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	24,985	10,796	0,219
R,S,T,U	Jasa Lainnya	57,300	-14,743	6,343
JUMLAH		15768,680	1358,238	-4201,318
PERTAMBAHAN NILAI PDRB TAHUN 2011 - 2015				12925,600

C.6 Peringkat Wilayah Berdasarkan Nilai *Differential Shift* Kabupaten/Kota Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur 2011-2015

No.	Kabupaten / Kota	Differential Shift	Persentase	Peringkat
1	Kab. Nganjuk	-5,195	-0,18%	II
2	Kab. Trenggalek	70,139	3,40%	I
3	Kab. Tulungagung	-48,328	-1,08%	III
4	Kab. Kediri	-163,350	-3,51%	IV
5	Kota Kediri	-4201,318	-32,50%	V

Lampiran D Perhitungan Analisis Tipologi Klassen

D.1 Data Variabel Analisis Tipologi Klassen

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk (2015)	PDRB (juta Rupiah)	
			2014	2015
1	Kab. Nganjuk	1041716	14.161.523,92	14.875.704,80
2	Kab. Tulungagung	1021190	21.265.193,56	22.326.624,60
3	Kab. Trenggalek	689200	9.998.366,00	10.500.809,10
4	Kab. Kediri	1546883	22.886.269,10	24.002.323,29
5	Kota Kediri	280004	69.232.890,11	72.945.528,50
Jawa Timur		38847561	1.262.697.100,00	1.331.418.200,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

D.2 Perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita Kabupaten/Kota pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur Tahun 2015

No	Kabupaten / Kota	Pendapatan Perkapita (juta rupiah / jiwa)	Pertumbuhan Ekonomi (persen)
1	Kab. Nganjuk	14,280	5,04
2	Kab. Tulungagung	21,863	4,99
3	Kab. Trenggalek	15,236	5,03
4	Kab. Kediri	15,517	4,88
5	Kota Kediri	260,516	5,36
Jawa Timur		34,273	5,44

D.3 Klasifikasi Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur Tahun 2015

Pendapatan Per kapita / Pertumbuhan Ekonomi	$Y_i > Y_n$	$Y_i < Y_n$
$r_i > m$	Kuadran I (Daerah maju dan cepat tumbuh)	Kuadran III (Daerah Berkembang cepat)
$r_i < m$	Kuadran II (Daerah maju tapi tertekan) a. Kota Kediri	Kuadran IV (Daerah relatif tertinggal) a. Kab. Nganjuk b. Kab. Tulungagung c. Kab. Trenggalek d. Kab. Kediri

Lampiran E Perhitungan Analisis Skalogram Kabupaten/ Kota Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur Tahun 2015

E.1 Data Jumlah Unit Fasilitas Pelayanan

No.	Kabupaten / Kota	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Kab. Nganjuk	668	79	76	8	5	20	13	47	24	8347	0	1.046	3.235
2	Kab. Tulungagung	776	113	91	0	12	31	24	59	17	39	14	1.340	69
3	Kab. Trenggalek	445	79	49	8	4	22	13	26	8	0	0	2.235	2.190
4	Kab. Kediri	887	187	112	9	11	37	20	303	39	197	38	1.782	5.246
5	Kota Kediri	140	30	46	5	12	9	21	701	8	25	9	199	533

No.	Kabupaten / Kota	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Jumlah
1	Kab. Nganjuk	44	1	0	89	2	5	83	18	9	23	13842
2	Kab. Tulungagung	5	1	6	43	1	2	67	13	68	27	2818
3	Kab. Trenggalek	12	0	0	62	2	0	66	81	8	13	5323
4	Kab. Kediri	168	49	0	253	2	1	80	6	231	34	9692
5	Kota Kediri	39	2	1	40	1	1	26	9	4	14	1875

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016 (diolah)

Keterangan:

- | | | | | |
|----------------------|---------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| A : SD sederajat | F : Puskesmas | K : Industri Besar | P : Vihara | U : Pasar |
| B : SMP sederajat | G : Hotel | L : Masjid | Q : Pondok Pesantren | V : Destinasi Wisata |
| C : SMA sederajat | H : Bank | M : Langgar | R : Terminal | W : SPBU |
| D : Perguruan Tinggi | I : BPR | N : Gereja | S : Stasiun | |
| E : Rumah Sakit | J : Industri Sedang | O : Pura | T : Puskesmas Pembantu | |

E.2 Perhitungan Analisis Skalogram Berdasarkan Jumlah Jenis Fasilitas

No.	Kabupaten / Kota	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Kab. Nganjuk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
2	Kab. Tulungagung	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Kab. Trenggalek	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
4	Kab. Kediri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Kota Kediri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Jumlah Unit Tiap Fasilitas	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	3	5	5
	Bobot	20	20	20	25	20	20	20	20	20	25	33,33	20	20

No.	Kabupaten / Kota	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Jumlah
1	Kab. Nganjuk	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	21
2	Kab. Tulungagung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22
3	Kab. Trenggalek	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	18
4	Kab. Kediri	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22
5	Kota Kediri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23
	Jumlah Unit Tiap Fasilitas	5	4	2	5	5	4	5	5	5	5	
	Bobot	20	25	50	20	20	25	20	20	20	20	

E.3 Perhitungan Analisis Skalogram dalam Bentuk Nilai Indeks Sentralitas

No.	Kabupaten / Kota	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Kab. Nganjuk	13360	1580	1520	200	100	400	260	940	480	208675	0	20920	64700
2	Kab. Tulungagung	15520	2260	1820	0	240	620	480	1180	340	975	466,7	26800	1380
3	Kab. Trenggalek	8900	1580	980	200	80	440	260	520	160	0	0	44700	43800
4	Kab. Kediri	17740	3740	2240	225	220	740	400	6060	780	4925	1266,7	35640	104920
5	Kota Kediri	2800	600	920	125	240	180	420	14020	160	625	300	3980	10660

No.	Kabupaten / Kota	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Jumlah
1	Kab. Nganjuk	880	25	0	1780	40	125	1660	360	180	460	318645
2	Kab. Tulungagung	100	25	300	860	20	50	1340	260	1360	540	56937
3	Kab. Trenggalek	240	0	0	1240	40	0	1320	1620	160	260	106500
4	Kab. Kediri	3360	1225	0	5060	40	25	1600	120	4620	680	195627
5	Kota Kediri	780	50	50	800	20	25	520	180	80	280	37815

E.4 Hirarki Wilayah Berdasarkan Nilai Indeks Sentralitas pada Kabupaten/Kota Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Fasilitas	Jumlah Indeks Sentralitas	Hirarki
1	Kab. Nganjuk	21	318.645	I
2	Kab. Tulungagung	22	56.937	IV
3	Kab. Trenggalek	18	106.500	III
4	Kab. Kediri	22	195.627	II
5	Kota Kediri	23	37.815	V

Lampiran F Perhitungan Analisis Model Gravitasi

F.1 Data Jumlah Penduduk dan Jarak Antar Kabupaten/Kota pada Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk (Km)	Kab. Tulungagung (Km)	Kab. Trenggalek (Km)	Kab. Kediri (Km)	Kota Kediri (Km)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Kab. Nganjuk	0	94,3	70	33,3	31,5	1.041.716
Kab. Tulungagung	94,3	0	34,8	61,5	57,9	1.021.190
Kab. Trenggalek	70	34,8	0	43,8	38,8	689.200
Kab. Kediri	33,3	61,5	43,8	0	4,3	1.546.883
Kota Kediri	31,5	57,9	38,8	4,3	0	280.004

Sumber: Google Maps, 2017

F.2 Nilai Interaksi Antar Kabupaten/Kota Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	Kab. Tulungagung	Kab. Trenggalek	Kab. Kediri	Kota Kediri	Jumlah
Kab. Nganjuk	0,00	119.627.906,47	146.520.544,33	1.453.176.393,72	293.962.859,02	2.013.287.703,54
Kab. Tulungagung	119.627.906,47	0,00	581.156.813,98	417.651.252,76	85.293.053,28	1.203.729.026,50
Kab. Trenggalek	146.520.544,33	581.156.813,98	0,00	555.718.064,47	128.187.610,80	1.411.583.033,57
Kab. Kediri	1.453.176.393,72	417.651.252,76	555.718.064,47	0,00	23.425.280.017,96	25.851.825.728,91
Kota Kediri	293.962.859,02	85.293.053,28	128.187.610,80	23.425.280.017,96	0,00	23.932.723.541,06

F.3 Peringkat Wilayah Berdasarkan Total Nilai Interaksi Kabupaten/Kota Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur Tahun 2015

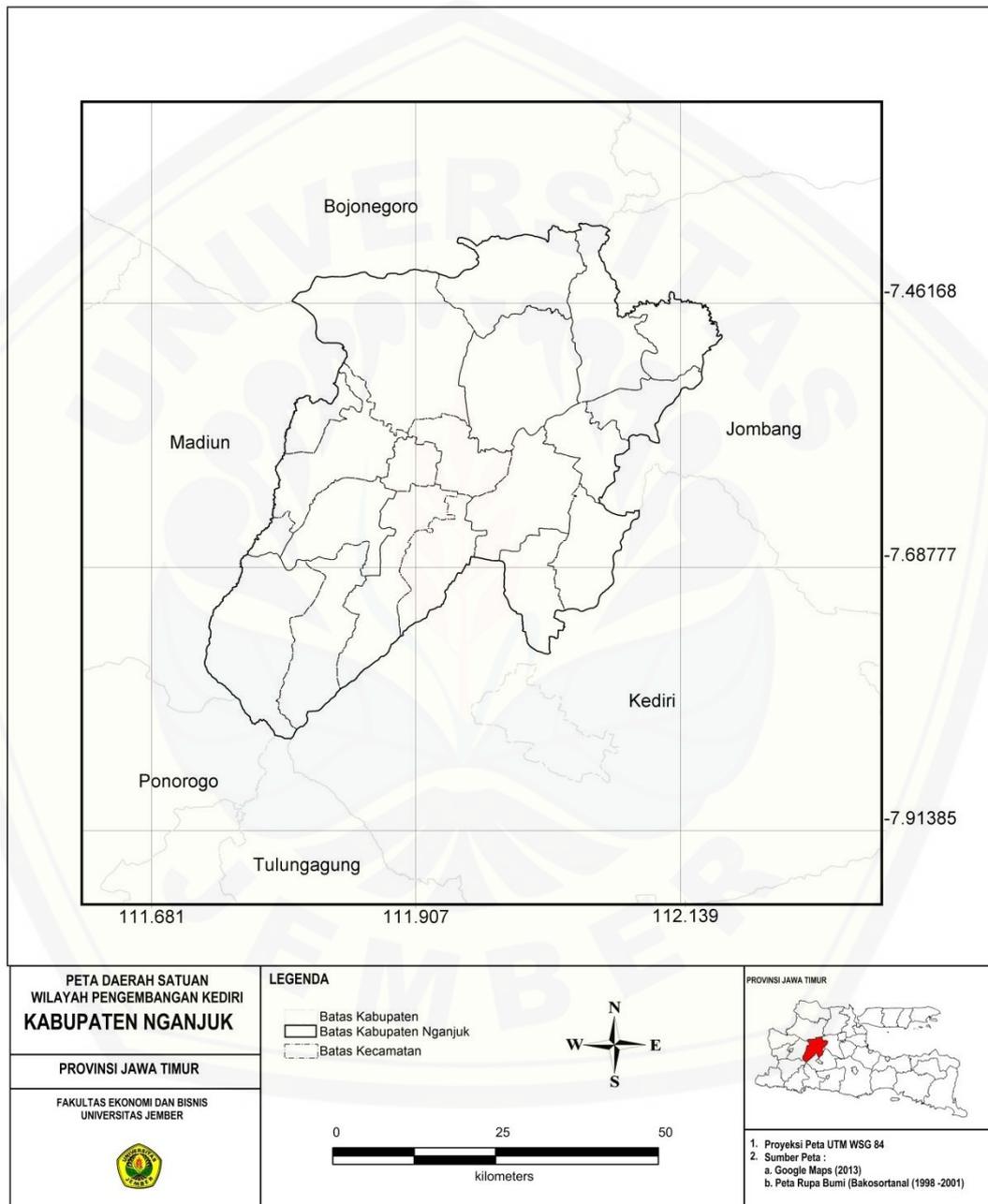
Kabupaten/Kota	Peringkat				Total Nilai Interaksi	Peringkat
	1	2	3	4		
Kab. Nganjuk	Kab. Kediri	Kota Kediri	Kab. Tulungagung	Kab. Trenggalek	2.013.287.703,54	III
Kab. Tulungagung	Kab. Trenggalek	Kab. Kediri	Kab. Nganjuk	Kota Kediri	1.203.729.026,50	V
Kab. Trenggalek	Kab. Tulungagung	Kab. Kediri	Kab. Nganjuk	Kota Kediri	1.411.583.033,57	IV
Kab. Kediri	Kota Kediri	Kab. Nganjuk	Kab. Trenggalek	Kab. Tulungagung	25.851.825.728,91	I
Kota Kediri	Kab. Kediri	Kab. Nganjuk	Kab. Trenggalek	Kab. Tulungagung	23.932.723.541,06	II

Lampiran G Peringkat Wilayah Berdasarkan Enam Alat Analisis pada Kabupaten/Kota Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur

Analisis Wilayah	Location Quotient	Shift Share (Differential Shift)	Tipologi Klassen	Skalogram	Model Gravitasi	Karakter Wilayah
Kab. Nganjuk	II	II	IV	I (Unggul)	III	<i>Hinterland</i>
Kab. Tulungagung	V	III	IV	IV	V	<i>Hinterland</i>
Kab. Trenggalek	III	I (Unggul)	IV	III	IV	<i>Hinterland</i>
Kab. Kediri	IV	IV	IV	II	I (Unggul)	<i>Hinterland</i>
Kota Kediri	I (Unggul)	V	II (Unggul)	V	II	Pusat Pertumbuhan

**Lampiran H Mapping Kabupaten/Kota Satuan Wilayah Pengembangan
Kediri Jawa Timur**

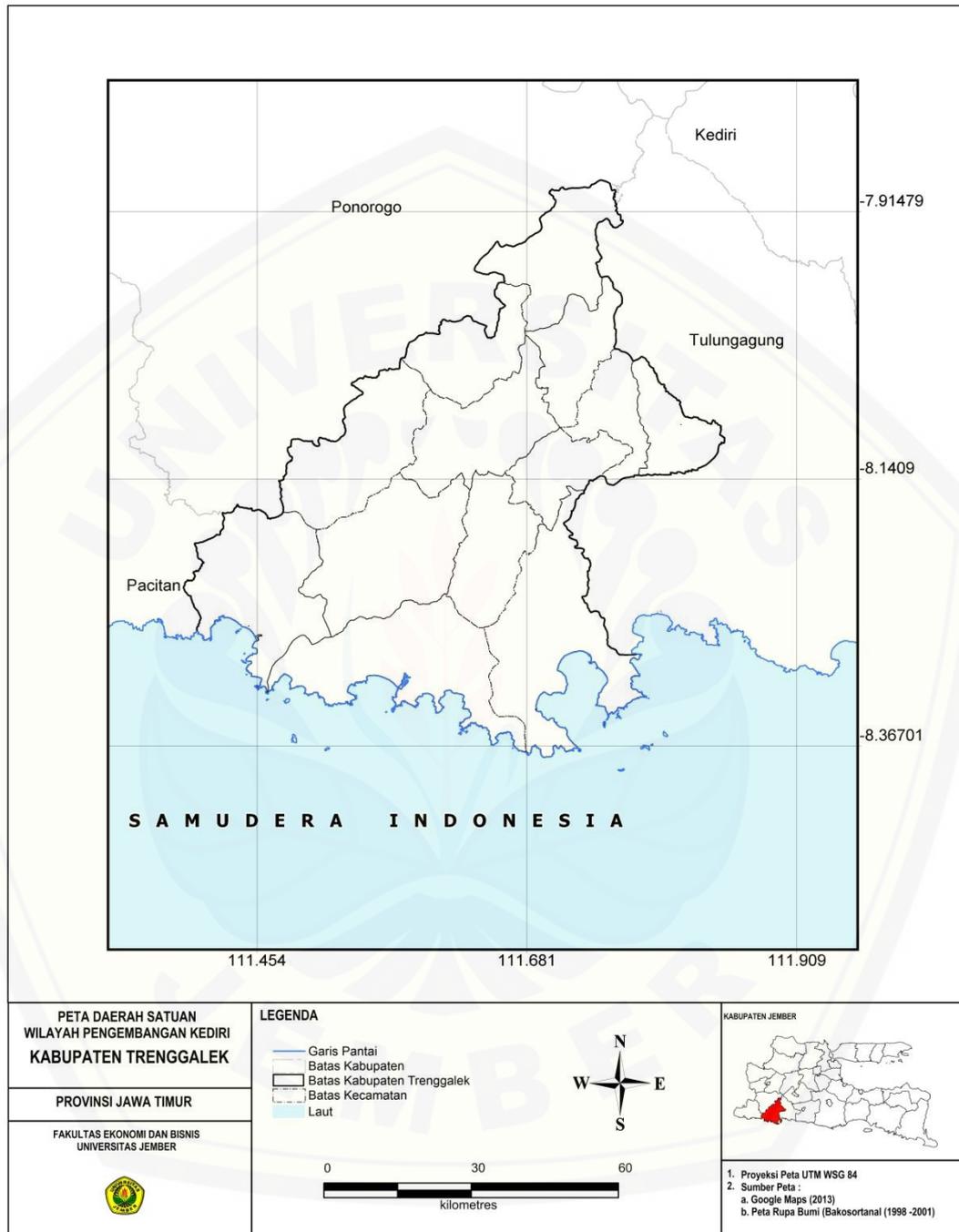
H.1 Peta Kabupaten Nganjuk



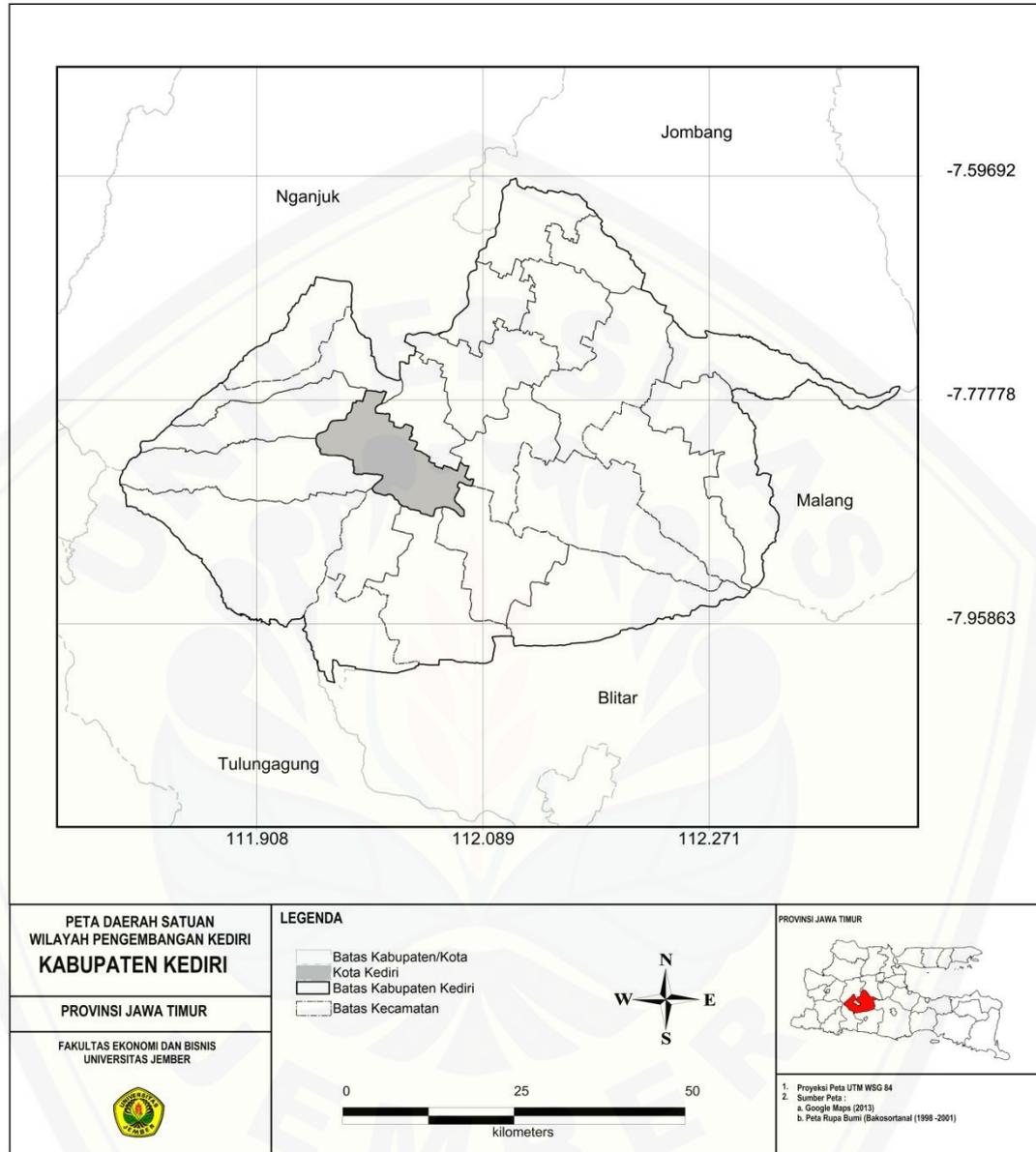
H.2 Peta Kabupaten Tulungagung



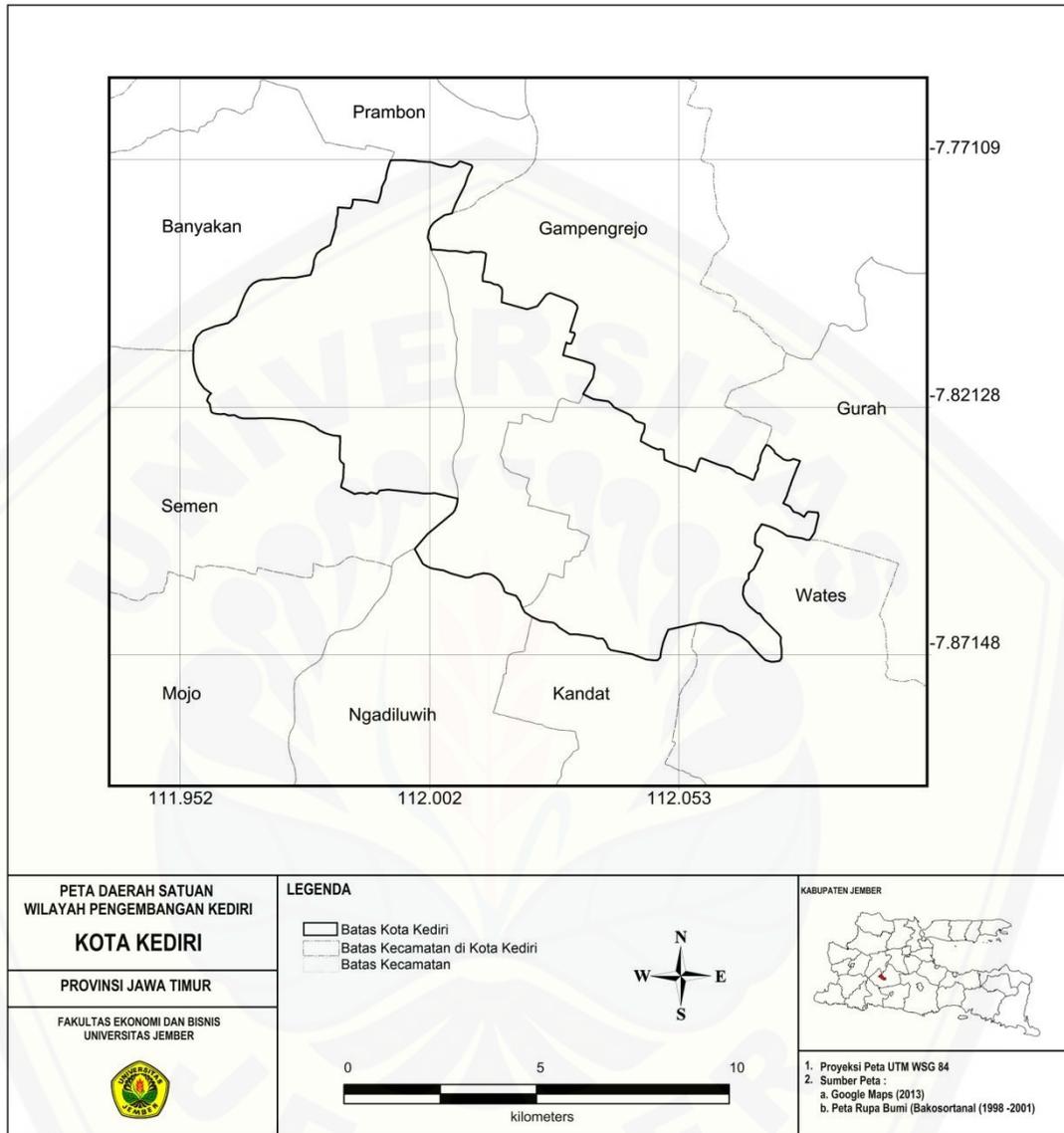
H.3 Peta Kabupaten Trenggalek



H.4 Peta Kabupaten Kediri



H.5 Peta Kota Kediri



H.6 Mapping Daerah Pusat Pertumbuhan dan Daerah Hinterland Satuan Wilayah Pengembangan Kediri Jawa Timur

